

SEMINAR NASIONAL PANGAN
HASIL RALLY FGD NAGARA INSTITUTE

PEMBENAHAN KEBIJAKAN PANGAN MENUJU INDONESIA EMAS

LAPORAN KEGIATAN SEMINAR
JAKARTA, 16 MARET 2023

2023

DISUSUN OLEH
Tim Peneliti Nagara Institute

KATA PENGANTAR

Pandemi Covid-19, tren de-globalisasi dan kenaikan harga pangan dunia akibat konflik Rusia-Ukraina telah menyentak kesadaran berbagai negara di dunia akan pentingnya kedaulatan pangan. Bahkan sebelum berbagai perkembangan tersebut, banyak pihak telah menyerukan pentingnya dunia mengantisipasi ancaman ketersediaan pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi dunia, instabilitas geopolitik dan geoekonomi, perubahan iklim serta semakin berkurangnya luasan dan kualitas lahan.

Indonesia tidak terkecualikan dari berbagai tantangan global tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pembenahan kebijakan pangan yang menyeluruh meliputi sisi produksi-pertanian, pengolahan, distribusi dan akses pangan. Tidak kalah penting, seluruh kebijakan tersebut harus didasari oleh politik pangan yang kuat yang berpihak pada produsen dan konsumen nasional.

Pembenahan kebijakan secara menyeluruh harus mengarah pada dua hal. Pertama, harga yang menguntungkan produsen, dalam hal ini petani dan industri pengolahan pangan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan tidak kurang dari 30 juta pekerja mengandalkan mata pencahariannya di pertanian saat ini. Tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pada masa depan masih terdapat insentif bagi generasi muda untuk bertani. Kedua, harga pangan yang terjangkau untuk konsumen, untuk memastikan kecukupan pangan bagi 319 juta penduduk pada saat Indonesia mencapai usia emas tahun 2045 nanti.

Berbagai pekerjaan rumah menanti, seperti penguatan kelembagaan, penguatan SDM petani, penguatan riset pertanian dan pangan, perbaikan pengolahan pasca panen, penguatan industri makanan dan minuman, efisiensi distribusi, penguatan peran pemerintah dalam cadangan pangan dan stabilisasi harga. Dengan pembenahan menyeluruh tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu menjadi lumbung pangan dunia. Bukan hanya mengatasi ketergantungan impor, Indonesia akan mampu memiliki daya saing internasional pada sektor pertanian dan produk pangan.

Sebagai langkah awal untuk pembenahan ini, Nagara Institute mengadakan serangkaian Focus Group Discussion dan Seminar Nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hasil dari rangkaian kegiatan tersebut dituangkan dalam laporan ini, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan riil yang dihadapi serta opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Apresiasi kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan dari berbagai organisasi petani dan pelaku pasar lain yang telah berpartisipasi mendukung terselesainya kegiatan ini.

Jakarta, April 2023

Dr. Akbar Faizal, M.Si

RINGKASAN (1/2)

- Rally FGDs Nagara Institute di empat kota menghasilkan temuan yang dirangkum dalam berbagai tantangan pengelolaan pangan meliputi aspek kelembagaan, SDM dan riset, produksi pertanian, pasca panen dan tata niaga hulu, efisiensi distribusi, manajemen perdagangan dalam dan luar negeri, akses pangan masyarakat, serta kesejahteraan petani.
- Lembaga pemerintah yang hadir, meliputi Kepala BULOG, Kepala Bapanas, Menteri Perdagangan, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, BPS dan Komisi IV DPR RI mengkonfirmasi berbagai temuan tersebut. Perwakilan pemerintah memberikan penekanan pada beberapa temuan yang memang menjadi tantangan paling serius saat ini meliputi luas dan kualitas tanah yang menurun, rendahnya keterampilan petani dan pemanfaatan mesin dan teknologi, kejelasan mekanisme impor pangan, kurangnya diversifikasi komoditas pangan, peningkatan harga input produksi akibat melonjaknya harga bahan baku pupuk impor dan harga energi dunia, serta perubahan kondisi alam dan cuaca yang mempengaruhi produksi.
- Pengelolaan pangan nasional memerlukan kebijakan yang komprehensif lintas sektor, wilayah, dan berbagai tingkat kelembagaan, pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pangan memerlukan komitmen politik dan ruh kebijakan yang berpihak pada kedaulatan pangan. Perwakilan pemerintah sepakat bahwa kebijakan pangan memerlukan koordinasi antar lembaga yang diperkuat oleh kehadiran Bapanas. Meskipun demikian, diperlukan peraturan turunan untuk memperjelas pembagian tugas dan wewenang kementerian/lembaga dibawah koordinasi Bapanas.
- Salah satu bentuk konkrit dari penguatan koordinasi antar lembaga adalah penguatan sistem Neraca Komoditas pada lima produk, yang telah ditetapkan yaitu beras, gula, garam, daging sapi, dan ikan. Neraca komoditas yang akurat dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebutuhan impor dan mengantisipasi risiko kelangkaan pangan maupun gejolak harga pangan.

RINGKASAN (2/2)

- Satu data pertanian dan pangan telah menjadi komitmen berbagai lembaga terkait. Akan tetapi masih diperlukan kesepahaman dalam melihat dan memaknai satu data tersebut, mengingat masing-masing lembaga memiliki prioritas dan indikator kinerja yang berbeda. Selain itu, terdapat kritik atas perbedaan data dengan realitas lapangan.
- Salah satu kunci kedaulatan pangan adalah pembentukan harga yang wajar sepanjang rantai produksi untuk menjadi panduan utama penentuan harga oleh pemerintah. Harga yang wajar pada tingkat petani diperlukan untuk menjamin kesejahteraan petani dan juga keberlanjutan sektor pertanian, terutama investasi pertanian dan minat generasi muda untuk bertani. Harga yang wajar pada tingkat pengecer dan konsumen diperlukan untuk menjamin akses pangan bagi masyarakat dan mencegah peningkatan angka kemiskinan.
- Kebijakan berbagai negara produsen pangan dunia yang cenderung self interest dan inward looking memunculkan keharusan untuk lepas dari ketergantungan impor pangan. Diperlukan komitmen dan politik pangan yang kuat untuk melakukan upaya substitusi impor pangan. Di dalam negeri, petani harus menjadi bagian dari rantai pasok pangan dan untuk itu diperlukan perbaikan infrastruktur, fasilitas pergudangan, bantuan teknologi pasca panen (contoh: dryer) untuk memperkuat cadangan pangan.
- Dalam hal anggaran, ketahanan pangan menjadi prioritas tidak hanya dari sisi produksi dan sektor pertanian, tetapi juga melalui perlindungan konsumen melalui program PKH, subsidi harga, sembako, pemberantasan stunting, serta cadangan pemerintah.

LATAR BELAKANG ACARA

TUJUAN

- Melakukan diseminasi hasil rally FGD pangan Nagara Institute dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah
- Mengumpulkan aspirasi dan masukan dari stakeholder kebijakan pangan tingkat nasional sebagai bahan memperkuat referensi akhir riset Nagara Institute

DESKRIPSI PROGRAM

Seminar Nasional berfokus pada tema “Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas”. Seminar dimulai dengan pemaparan hasil dari putaran FGD di beberapa daerah dilanjutkan dengan presentasi dari pembicara dan tanggapan dari peserta. Fokus utama seminar ini di antaranya mengenai pembenahan kebijakan pangan dari pihak pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional berkelanjutan.

TOPIK ACARA

Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas.

PEMBICARA

Moeldoko, Ketua HKTl
Budi Waseso, Kepala Bulog
Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan
Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas
Yohanis Fransiskus Lema, Komisi IV DPR
Titik Anas, Staf Ahli Kementerian Keuangan
Muh. Habibullah, Deputi BPS
Vivi Yulaswati, Plt. Deputi Bappenas

TARGET

Kehadiran stakeholder yang diundang dalam diskusi.

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (1/7)

PESERTA SEMINAR

1. Menteri Perdagangan Zukfli Hasan
2. Ketua Umum HKTI/KSP Moeldoko
3. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
4. Direktur Utama Bulog Budi Waseso
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Keuangan
7. Kementerian ART/BPN
8. Kementerian Desa PDTT
9. Anggota DPR RI
10. Biro Pusat Statistik
11. BMKG Indonesia
12. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
13. Kepala Pusat Riset Teknologi Dan Proses Pangan BRIN
14. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN
15. Ketua Dewan Tani Aliansi Petani Indonesia
16. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
17. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
18. Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
19. Ketua Umum PERHEPI
20. Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia
21. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
22. DKPP Provinsi Jawa Barat
23. Guru Besar dan Ahli Pangan IPB
24. PT Pupuk Kalimantan Timur
25. PT Indomarco Prismatama
26. PT Perkebunan Nusantara III

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (2/7)

PESERTA SEMINAR

27. PT Berdikari
28. PT Rolas Pangan Nusantara
29. PT Sang Hyang Seri
30. AOI Indonesia
31. Gerakan Pangan Nusantara
32. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan
33. FIAN Indonesia
34. Pusat Studi Agraria IPB
35. Persatuan Wartawan Indonesia
36. Perempuan Tani HKTI
37. Pemuda Tani HKTI
38. Aliansi Petani Indonesia
39. Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara
40. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (3/7)

LAPORAN LIPUTAN MEDIA (1/5):

- Selama dua hari, pada 16 dan 17 Maret 2023, seminar memperoleh pemberitaan luas dari media nasional. Sedikitnya ada 39 yang memberitakan seminar ini, yaitu:

Kehadiran Media:

- kompas.com
- tempo.co
- detik.com
- antara.com
- mediaindonesia.com
- republika.co.id
- beritasatu.com
- pikiranrakyat.com
- indonesiadaily.co.id
- wartaekonomi.co.id
- kontan.co.id
- beritabarur.co
- voi.id
- tribunnews.com
- elshinta.com
- harianterbit.com
- indoposco.id
- kanalindonesia.com
- rotasi.co
- fintechnesia.com
- disway.id
- kagama.co
- redaksibaru.id
- herald.id
- tangerangraya.id
- askara.co
- buddyku.com
- faktapers.id
- tajuk24.com
- validnews.id
- akurat.co
- era.id
- pajakonline.com
- sukabumiberita.com
- harianaceh.co.id
- beritamerdekaonline.com
- eropongnews.com
- inilah.com
- bergelora.com

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (4/7)

LAPORAN LIPUTAN MEDIA (2/5):

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6622746/ancaman-krisis-pangan-menghantui-ri-pemerintah-perlu-lakukan-ini>
- <https://www.antaranews.com/berita/3443940/ksp-presiden-inginkan-korporasi-petani-untuk-tingkatkan-kesejahteraan>
- <https://www.inilah.com/penuhi-cadangan-beras-nasional-zulhas-buka-opsi-import-beras-dari-india>
- <https://teropongnews.com/mendag-zulhas-buka-opsi-import-beras-india/>
- <https://www.beritamerdekaonline.com/2023/03/ancam-krisis-pangan-dunia-indonesia-benahi-kebijakan-pangan-terbaru/>
- <https://www.harianaceh.co.id/2023/03/16/ksp-presiden-ingin-korporasi-petani-dimudahkan-akses-modal/>
- <https://sukabumiberita.com/krisis-pangan-global-mengancam-indonesia-harus-benahi-kebijakan/>
- <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrlwr5502/ksp-presiden-ingin-korporasi-petani-dimudahkan-akses-modal>
- <https://www.pajakonline.com/krisis-pangan-global-mengancam-indonesia-harus-benahi-kebijakan/>
- <https://era.id/nasional/121037/mendag-buka-opsi-import-beras-dari-india-kita-harus-punya-cadangan-di-luar-negeri-kalau-sewaktu-waktu-diperlukan>

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (5/7)

LAPORAN LIPUTAN MEDIA (3/5):

- <https://akurat.co/hadiri-seminar-nasional-pangan-mendag-sinergi-pemerintah-jaga-harga-di-tingkat-petani>
- <https://validnews.id/ekonomi/jaga-stok-beras-mendag-buka-opsi-impor-dari-india>
- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/566092/mendag-usul-impor-beras-saat-panen-roya-badan-pangan-kita-fokus-serap-gabah>
- <https://indoposco.id/nasional/2023/03/16/jaga-stok-kemendag-usulkan-impor-beras-dari-india>
- <https://www.tajuk24.com/nasional/5228031663/mendag-usul-impor-beras-dari-india-untuk-stok-bulog>
- <https://www.harianterbit.com/nasional/2748031520/nagara-institute-krisis-pangan-global-mengancam-indonesia-harus-benahi-kebijakan>
- <https://faktapers.id/2023/03/seminar-nasional-pembenahan-kebijakan-pangan-menuju-indonesia-emas-upaya-membenahi-kebijakan-di-bidang-tata-kelola-pangan/>
- <https://buddyku.com/keuangan-dan-bisnis/f9aeb261ac9040c591df99f85b44a043/hadiri-seminar-nasional-pangan-mendag-sinergi-pemerintah-jaga-harga-di-tingkat-petani>
- <https://jakarta.tribunnews.com/2023/03/16/kabulog-budi-waseso-ungkap-banyak-penyelundupan-beras-dari-luar-negeri>
- <https://www.askara.co/read/2023/03/16/34894/buwas:-banyak-penyelundupan-beras-dari-luar>

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (6/7)

LAPORAN LIPUTAN MEDIA (4/5):

- <https://elshinta.com/news/296639/2023/03/16/jaga-stok-beras-mendag-buka-opsi-impor-beras-dari-india>
- <https://www.tangerangraya.id/tangerang-raya/1958033921/krisis-pangan-global-mengancam-indonesia-harus-benahi-kebijakan>
- <https://herald.id/2023/03/16/harga-beras-di-indonesia-lebih-mahal-buwas-banyak-penyelundupan-dari-luar/>
- <https://pressrelease.kontan.co.id/news/hadiri-seminar-pangan-mendag-sinergi-pemerintah-jaga-harga-di-tingkat-petani>
- <https://redaksibaru.id/2023/03/17/indonesia-bakal-kembali-buka-keran-impor-beras-dari-india-kekurangan-stok/>
- <https://voi.id/berita/264337/bicara-ketahanan-pangan-moeldoko-tekankan-pentingnya-korporasi-petani>
- <https://wartaekonomi.co.id/read487312/bicara-ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-moeldoko-tekankan-pentingnya-korporasi-petani>
- <https://money.kompas.com/read/2023/03/17/000800426/siap-siap-harga-beras-terus-naik-ri-jajaki-impor-beras-dari-india?page=all>
- <https://kagama.co/2023/03/17/ini-syaratnya-agar-indonesia-mampu-hadapi-ancaman-krisis-pangan-global/>
- <https://beritabarur.co/157020/khawatir-stok-tak-tercukupi-mendag-buka-opsi-impor-beras-dari-india>
- <https://voi.id/en/amp/264337>

DETAIL KEGIATAN SEMINAR (7/7)

LAPORAN LIPUTAN MEDIA (5/5):

- <https://bergelora.com/kapan-bisa-kemandirian-pangan-mendag-buka-opsi-impor-beras-dari-india-jaga-pemenuhan-stok-beras/>
- <https://kanalindonesia.com/nagara-institute-ingatkan-indonesia-harus-benahi-kebijakan-menghadapi-krisis-pangan-global/>
- <https://nasional.tempo.co/read/1703765/sinergi-pemerintah-menjaga-harga-produk-petani>
- <https://rotasi.co/sinergi-pemerintah-menjaga-harga-produk-petani/>
- <https://fintechnesia.com/2023/03/17/indonesia-harus-benahi-kebijakan-untuk-hadapi-ancaman-krisis-pangan-global/>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016435770/usulan-impor-beras-dari-indiamendag-zulkifli-hasan-jelaskan-pertimbangannya>
- <https://www.indonesiadaily.co.id/indonesia-terkini/7208035147/nagara-institute-gelar-seminar-pembenahan-kebijakan-pangan-menuju-indonesia-emas>
- <https://www.antaranews.com/berita/3444456/nagara-institute-sebut-kondisi-pangan-indonesia-tidak-baik-baik-saja>
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1033088/nagara-institute-kondisi-pangan-indonesia-tidak-baikbaik-saja>
- <https://disway.id/read/690455/mendag-zulkifli-hasan-hadiri-seminar-nasional-pangan-dukung-sinergi-pemerintah-jaga-harga-di-tingkat-petani>

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (1/5)

TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL (1/3):

Sistem tata kelola pangan nasional relatif lemah dari berbagai aspek. Kelemahan itu meliputi aspek kelembagaan, data, sumber daya manusia dan riset pertanian, produksi, pascapanen dan tata niagahulu, distribusi pangan, manajemen perdagangan dalam dan luar negeri, akses pangan, dan kesejahteraan petani. Dari aspek kelembagaan, kelemahannya meliputi koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antar lembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan, serta kedudukan dan daya tawar petani:

- Kebijakan pangan berada di bawah koordinasi antar kementerian/lembaga dengan wewenang masing-masing, khususnya untuk impor-ekspor pangan. Neraca komoditas menjadi acuan dalam kebijakan perdagangan dari berbagai komoditas pangan (i.e. gula, garam, daging, ikan, beras). Menteri perdagangan hanya berperan sebagai pelaksana otorisasi impor yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan lintas kementerian/lembaga dan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berdasarkan neraca komoditas tersebut. Bapanas dan kementerian terkait memiliki fungsi rekomendasi berdasarkan penugasan dan wewenang masing-masing.
- Kebijakan penentuan impor, pengiriman, hingga pembelian dan harga acuan berada di bawah kendali Bapanas. Badan usahaseperti Bulog akan berada di bawah koordinasi Bapanas untuk melaksanakan fungsinya (PSO) pada komoditas yang sudah ditentukan. Lebih jauh lagi, jenis pangan yang berada di bawah tanggung jawab Bapanas adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (1/5)

TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL (2/3):

- *DPR dan pemerintah diharapkan untuk menempatkan dana talangan/cadangan di Bapanas untuk meningkatkan kapasitas melaksanakan program yang sudah ada. Bapanas perlu wewenang untuk membeli beberapa produk pertanian yang sedang mengalami kejatuhan harga dan diperuntukan untuk cadangan pangan. Kewenangan pembelian dari badan usaha seperti Bulog juga perlu diberikan fleksibilitas untuk merespon kondisi harga jika harga pembelian yang ditetapkan terlalu rendah.*
- *Terkait data, lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam bidang pangan telah sepakat untuk mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS). Proses integrasi data pangan menghadapi tantangan, terutama dari perlunya melakukan integrasi data dari tingkat terendah hingga tingkat pemerintah pusat.*
- *Integrasi dan perbaikan data ketersediaan pangan, terutama di masyarakat dan swasta masih perlu perbaikan. Selama beberapa tahun terakhir, BPS mengembangkan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk mendapatkan data yang mutakhir dan akurat dalam estimasi luas lahan panen dengan tambahan metode ubinan untuk mengukur produktivitas. Metode estimasi BPS tersebut membantu dalam estimasi lahan panen secara akurat dapat memprakirakan perkembangan dari produksi, terutama dalam jangka pendek (setiap 4 bulan untuk produktivitas) menggabungkan oleh survei dengan 6.223 petugas per bulannya untuk luas panen.*
- *Akses dari informasi untuk pemegang kebijakan dan publik secara umum menjadi prasyarat pelaksanaan kebijakan sektor pangan. Transparansi data pangan terkait harga dan ketersediaan menjadi langkah awal yang diambil karena data-data tersebut dijadikan acuan dalam identifikasi permasalahan sektor pangan.*

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (1/5)

TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL (3/3):

- *Ketersediaan dan reliabilitas data membantu dalam membuat prognosa neraca pangan nasional. Kerja sama lembaga-lembaga diperlukan untuk menentukan jumlah stok awal, jumlah panen, hingga realisasi impor pada komoditas pangan. Prognosa ini membutuhkan data mulai dari kementerian pertanian, BPS, kementerian perdagangan, hingga sistem neraca dari kementerian koordinator terkait. Neraca nasional dapat menggambarkan bagaimana kebutuhan dan ketersediaan dari komoditas-komoditas pangan tidak hanya secara nasional tetapi juga dari masing-masing provinsi/daerah. Lebih jauh lagi, data dan prognosa neraca pangan yang tepat membuka pintu untuk intervensi kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.*
- *Alokasi anggaran untuk melakukan penyerapan lewat BUMN dan difungsikan sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP). CPP pada kelompok komoditas pangan banyak yang masih rendah jauh di bawah kebutuhan. Diperlukan penambahan fasilitas penyimpanan berbagai tipe (e.g. cold chain utility) untuk stok pangan sehingga disimpan lebih lama. Untuk mendukung dapat memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur dari pihak swasta. Kapasitas persediaan gudang dari BULOG dan PT RNI masih under-utilised.*
- *Peran Koperasi Unit Desa (KUD) juga dapat kembali diperkuat. Peran KUD saat ini banyak digantikan pihak swasta. KUD dapat menguntungkan petani karena bisa memperoleh ketetapan harga yang jelas. Struktur KUD sudah sangat jelas tapi tidak berjalan optimal lagi saat ini. Posisi tawar pertanian bisa berpihak pada kesejahteraan petani sehingga kedaulatan pangan bisa terealisasi dengan baik. Sistem insentif yang tepat dapat dibangun sehingga petani bisa memaksimalkan peran di pasar.*

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (2/5)

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ADOPSI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI (1/2):

Dari aspek ini, kelemahan meliputi belum memadainya pendidikan formal non-formal maupun keterampilan teknis bagi petani. Petani belum memperoleh literasi keuangan dan literasi teknologi secara memadai. Riset-riset pertanian yang spesifik untuk setiap daerah di Indonesia juga belum tersedia, terutama riset tentang pengembangan pertanian berkelanjutan.

- Pemanfaatan teknologi dan modernisasi pada rantai pasca-panen, terutama dalam pengolahan hasil panen (off-farm), harus menunjang keberlangsungan pertanian. Pemanfaatan teknologi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dari produk pertanian, contohnya menjaga kadar air pada jagung pada tingkat tertentu.
- Secara nasional, losses dari pasca-panen masih tinggi hingga mencapai 20%. Penyebab dari banyaknya food loss dapat dikaji kepada permasalahan terkait teknologi dan transportasi. Masalah yang ada dapat terjadi dari pada power thresher, alat jemur, hingga angkutan dari produk pertanian. Pemanfaatan teknologi dan ketersediaan infrastruktur penyimpanan (e.g. silo untuk hasil tanaman padi, sistem resi gudang) membantu petani menjaga kualitas dan mencegah produk terbuang.
- Pemanfaatan bioteknologi perlu dikaji untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pada komoditas seperti kedelai, produksi Indonesia hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan domestik dan mengandalkan impor (2,5 juta ton dari Amerika Serikat). Ini menyebabkan harga kedelai domestik bergantung kepada kondisi pasar kedelai internasional dan fluktuasi nilai tukar.
- Pemanfaatan teknologi telah menjadi salah satu cara efektif untuk menunjang produktivitas pertanian, khususnya teknologi tepat guna. Petani di Jawa Barat dianggap menjadi salah satu yang terdepan dalam mengadopsi teknologi baru. Ke depannya, BPTP beralih menjadi BPSIP yang bertugas untuk standardisasi produk pertanian. Teknologi akan dibuatkan standar SOP-nya termasuk untuk alokasi pupuk dan pengairan.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (2/5)

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ADOPSI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI (2/2):

- Perluasan pengembangan dan pemanfaatan benih unggul diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sehingga mengimbangi luas lahan yang terus menurun. Terdapat potensi dari pemanfaatan bibit (varietas) unggul serta kualitas hasil panen bersama BPPT. Benih unggul yang dikembangkan disebut memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas lahan di atas rata-rata produktivitas nasional, terutama di wilayah seperti Sumedang dan Cirebon.
- Dari sisi pendidikan, petani generasi muda membutuhkan pendidikan yang memadai terutama yang aplikatif pada bidang pertanian. Peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui ekspansi pendidikan vokasi di kabupaten-kabupaten produsen produk pertanian. Jenis pendidikan bisa mengadaptasi pendidikan di beberapa negara yang memiliki jurusan spesifik untuk komoditas tertentu.
- Penyuluh petani berperan penting sebagai tangan dari negara ke petani di lapangan, namun kualitas dan kuantitas nya masih relatif kurang memadai. Hingga saat ini, pemerintah belum memprioritaskan keterampilan dan kesejahteraan penyuluh pertanian, terutama jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Penyuluh pertanian jumlahnya menurun dan umur rata-rata mulai banyak mencapai usia pensiun tanpa diberikan prioritas regenerasi oleh pemerintah. Penyuluh pertanian sendiri berfungsi dalam membantu petani dalam aktivitas tani dan dapat memberikan bimbingan, contohnya adalah dalam penyesuaian penggunaan pupuk dan benih dan adopsi teknologi terbaru.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (3/5)

TANTANGAN SISI PRODUKSI (1/2):

Dari aspek produksi, kelemahan meliputi kurangnya jaminan akses terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan dan input untuk produksi pangan. Selain itu, investasi untuk penguatan infrastruktur pertanian dan bantuan teknis pemerintah untuk produksi juga belum memadai.

Peningkatan produktivitas dan permasalahan lahan pertanian yang berkurang menjadi topik utama dalam menjawab tantangan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi.

- Wilayah pertanian di Indonesia mengalami penurunan luas lahan pertanian. Hal ini terjadi akibat alih fungsi yang tidak dapat dicegah, terutama di tengah keterbatasan pemerintah provinsi dalam mengatur kepentingan tata ruang wilayah (RTRW) administrasi kab/kota.
- Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan mempertegas perlunya intensifikasi produksi dari lahan yang sudah ada. Pemanfaatan bibit dan pupuk pada lahan yang ada juga perlu mempertimbangkan kualitas lahan yang sudah ada. Secara nasional, rendahnya kandungan organik dari tanah mengancam produktivitas. Kandungan c-organik dari 70% lahan kurang dari 22%, 20% hanya mencapai 2-3%, dan hanya 10% yang masih subur. Dari beragam indikator kesejahteraan bagi petani, produktivitas lahan pertanian menjadi indikator dengan proporsi di bawah standar terbesar (89,54% dari lahan pertanian).
- Perencanaan alokasi pupuk subsidi dan penggunaan pupuk yang sesuai menjadi perhatian utama. Dosis ditentukan sesuai kebutuhan lahan dan perlu kerja sama lebih jauh antara petani, pemerintah, dan produsen pupuk untuk bisa mewujudkan pemanfaatan pupuk yang tepat guna. Selain dampak terhadap produktivitas, pemanfaatan pupuk yang sesuai kebutuhan (jenis dan kualitas tanah melalui soil test) juga menghindari dampak negatif dari pemupukan berlebih, baik pupuk kimia maupun urea.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (3/5)

TANTANGAN SISI PRODUKSI (2/2):

- Harga dan ketersediaan pupuk masih menjadi permasalahan utama sebagai input yang menunjang produksi pertanian. Kekurangan bahan baku produksi pupuk terjadi pada pupuk NPK karena kalium dan fosfat terganggu akibat perang Russia-Ukraina. Sebagai akibatnya, harga pupuk NPK meningkat drastis karena harga bahan baku meningkat. Kandungan fosfat dan kalium pada 2022 dikurangi dari menjadi masing-masing 10% dan 12% dari sebelumnya keduanya mencapai 15% untuk mengurangi biaya produksi. Beberapa pabrik produsen pupuk nasional seperti Pupuk Iskandar Muda juga terpaksa menghentikan produksi karena kekurangan bahan baku (gas alam).
- Di beberapa wilayah, terjadi kekurangan dari ketersediaan benih setelah subsidi benih dicabut. Kelangkaan dan harga benih yang tidak terjangkau secara tidak langsung mempengaruhi kualitas benih yang digunakan petani. Benih digunakan secara berulang sehingga kualitas genetik dari bibit berkurang. Teknik penggunaan benih juga berpengaruh terhadap kualitas panen yang dihasilkan. Terdapat perbedaan hasil sebagai dampak dari perbedaan pola tanam antara bibit yang ditanam dengan bibit yang ditebar.
- Secara komersial, penggunaan bibit dihadapkan pada permasalahan trade-off antara keterjangkauan harga dan kualitas. PT SHS sebagai salah satu penyedia benih nasional tidak berada dalam kondisi finansial yang sehat (utang cadangan benih nasional Rp 240 Miliar dengan Kementan). Benih yang berkualitas juga berada pada tingkat harga Rp. 11-12.000 sementara harga dari Kementan berada pada tingkat Rp. 8.000. Selisih harga mengharuskan produsen benih memproduksi benih dengan kualitas (produktivitas) rendah.
- Juga diperlukan program sertifikasi tanah pertanian yang diperkuat dengan literasi keuangan petani. Penguatan lahan pertanian juga bisa dilakukan dengan program kewajiban pemulihan lahan bekas tambang. Langkah-langkah itu juga masih perlu didukung peremajaan sistem irigasi dan pengembangan teknologi hemat air agar sistem irigasi semakin memadai.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (4/5)

PASCA-PANEN DAN DISTRIBUSI (1/2):

Dari aspek Pascapanen dan tata niaga hulu, kesadaran petani untuk melakukan pemrosesan pasca panen dan pemanfaatan produk sampingan hasil pengolahan ternyata masih rendah. Kapasitas petani dalam hal Pascapanen untuk meminimalisasi variasi kualitas produk juga belum memadai. Di saat yang sama, mekanisme pembelian produk pertanian oleh Bulog seringkali masih memberatkan petani.

- Perencanaan rantai pasok pasca-panen menjadi aspek penting dalam kebijakan pangan nasional. Distribusi pangan menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur distributor pangan. Biaya logistik masih tinggi dan tatanan logistik belum memadai.
- Petani cenderung menjual sebelum hasil panen siap (penjualan tebasan) untuk mendapatkan uang lebih cepat dan pasti. Akses pasar yang memadai bagi petani dapat berpotensi mensejahterakan petani dan mengurangi ketergantungan tersebut. Penyediaan offtaker juga menjadi beberapa contoh lain dari partisipasi pemerintah untuk membuka pasar bagi petani (contoh: program Petani Millennial dan food estate).
- Daerah dengan permintaan besar dan kapasitas produksi pangan rendah seharusnya dapat menjadi pasar utama bagi hasil produksi wilayah-wilayah lain. Sebagai contoh adalah Jakarta yang membutuhkan persediaan beras dari produsen surplus beras seperti Sumatera Selatan atau Sulawesi Selatan. Namun, keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi hambatan, terutama di wilayah Indonesia timur. Produksi yang tidak merata menyebabkan pelayaran dari barat ke timur Indonesia terhambat dari sisi efisiensi dan biaya akibat ketidakseimbangan muatan berangkat dan balik. Infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan juga masih terbatas.
- Permasalahan distribusi dihadapi melalui penyediaan infrastruktur dan kapasitas BUMN untuk mobilisasi persediaan antar daerah. Nusa Tenggara Barat sebagai sentra produksi jagung nasional adalah salah satu contohnya. Sebagai produsen jagung keterbatasan akses untuk distribusi dan penyimpanan berpotensi menyebabkan harga jagung jatuh terlalu rendah saat panen. Hal ini mendasari pembangunan fasilitas silo (kapasitas 30,000-50,000 ton) dan pelabuhan untuk menyimpan dan mendistribusikan hasil panen ke daerah-daerah lain.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (4/5)

PASCA-PANEN DAN DISTRIBUSI (2/2):

- *Partisipasi petani dalam meningkatkan nilai tambah produk yang dijual terkait juga dengan tendensi petani menjual hasil panen sebelum dijadikan gabah. Keterlibatan petani dalam rantai produksi beras diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani. Resi gudang juga didorong untuk difungsikan sebagai kapasitas penyimpanan petani untuk menghadapi fluktuasi harga dan akses terhadap pembiayaan dari persediaan tersebut. Penjualan hasil panen yang sudah diolah meningkatkan peluang petani mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga beras secara langsung dibandingkan perantara. Sementara sistem resi gudang memastikan petani memiliki fasilitas penyimpanan dan responsif terhadap fluktuasi harga dengan manajemen stok dan penjualan.*
- *Untuk memastikan harga tetap stabil, BUMN pangan sebagai pemain utama dapat dan telah berperan sebagai off-taker dan stand-by buyer produk pertanian. Dari segi kapasitas, Bulog adalah badan usaha dengan kapasitas gudang penyimpanan pangan terbesar dengan 3,8 juta ton. Saat ini, kapasitas yang digunakan hanya sekitar 300.000 ton (beras). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kewenangan Bulog dapat diperluas ke komoditas lain atau jika diperlukan, melalui badan usaha pangan lainnya (contoh: ID Food).*
- *BULOG dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap beras dari petani dapat bermitra dengan pihak swasta. Swasta dapat mengisi celah tersebut dengan menjual berdasarkan kontrak untuk memasok beras ke BULOG berdasarkan presentase tertentu dari persediaan yang dimiliki masing-masing. Swasta juga dapat menyediakan kapasitas tambahan dengan fasilitas yang sesuai atau bahkan melebihi standar Gudang penyimpanan BULOG sehingga cadangan pangan pemerintah bertambah kapasitasnya, baik dari sisi jumlah dan juga jenis komoditas pangan yang disimpan.*
- *Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung petani-petani di wilayahnya melalui anggaran DAU & anggaran untuk biaya tidak terduga (BTT) dalam komponen APBD. Pemerintah daerah telah diberi mandat salah satunya melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga karena berpengaruh secara langsung terhadap daya beli. Anggaran yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk secara langsung membeli dari petani (sebagai off-taker) dan berkoordinasi langsung dengan daerah lainnya ataupun melalui badan pangan. Anggaran juga dapat dialokasikan untuk membiayai mobilisasi stok pangan antar daerah.*

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (5/5)

TATA NIAGA DAN AKSES PANGAN (1/2):

Kelemahan sistem pangan nasional juga ada pada aspek akses pangan masyarakat dan kesejahteraan petani. Dalam hal akses pangan terdapat tiga masalah, yaitu keterjangkauan harga pangan, masalah instabilitas harga di tingkat pengecer-konsumen, dan mutu nutrisi masyarakat.

- Desain intervensi kebijakan pemerintah, masih terlalu menitikberatkan kepada subsidi terhadap input produksi (e.g. pupuk & alat produksi), sedangkan harga sebagai insentif utama petani belum maksimal. Produksi seharusnya bukan masalah karena pangan Indonesia diproduksi jutaan petani bukan segelintir produsen. Konsumen juga lebih banyak karena jumlah penduduk besar. Namun masalah ada dalam harmoni penawaran dan permintaan pangan. Penyelarasan produksi seharusnya bersifat sementara, termasuk subsidi teknologi terhadap petani. Petani akan memproduksi berdasarkan utamanya berdasarkan acuan harga produk pangan yang wajar dan sesuai dengan insentif terhadap petani sendiri.
- Pada beberapa komoditas utama seperti beras dan cabai, harga pada tingkat produsen terlalu rendah dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan. Harga yang rendah menjadi risiko terbesar, apalagi bila mempertimbangkan fluktuasi harga saat sedang panen. Peran pemerintah melalui harga acuan pembelian juga dianggap masih belum maksimal mempertimbangkan harga yang dapat menguntungkan bagi petani. Risiko harga dan kerugian secara langsung mempengaruhi minat bagi petani muda karena petani menjadi profesi yang tidak menguntungkan baik secara prestise maupun ekonomi.
- Salah satu sumber fluktuasi harga gabah/beras adalah pola produksi antar waktu yang tidak merata. Dalam produksi beras, terdapat periode surplus dan defisit yang harus diperhitungkan untuk memastikan ketersediaan, kebutuhan, dan harga beras. Kebutuhan tidak hanya terbatas untuk konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan cadangan dari pemerintah dan cadangan rumah tangga.
- Keterbatasan instrumen dan dominasi pasar secara tidak langsung mengakibatkan konsentrasi impor pada sejumlah komoditas pangan, termasuk di dalamnya kedelai, terigu, kedelai, daging sapi, dan gula. Harga pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat dan diversifikasi sumber pangan juga masih termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagian besar masyarakat tidak mampu memenuhi kriteria pangan sehat, terutama di Indonesia Timur.

ANALISIS TEMUAN SEMINAR NASIONAL (5/5)

TATA NIAGA DAN AKSES PANGAN (2/2):

- HPP sebagai panduan pembelian beras pemerintah dan floor price harus segera ditetapkan untuk menjaga harga gabah, terutama bagi petani. Penetapan HPP tidak efektif dalam penerapannya karena harus mempertimbangkan biaya-biaya yang muncul (e.g. biaya transportasi) yang akan ditanggung petani. Infrastruktur juga mempengaruhi juga efektivitas harga yang ditetapkan karena produktivitas relatif lebih rendah, terutama di wilayah ekstensifikasi lahan dengan irigasi yang terbatas. HPP belum ditetapkan karena harga produk pangan saat ini sedang tidak stabil dibandingkan pola historisnya. HPP perlu didiskusikan kembali dengan perwakilan dari stakeholder pangan (BPS, KTNA, Food Station, BRIN, PSEKP, & HKTII).
- Kebijakan penetapan HET baru disahkan oleh Bapenas melalui surat edaran sebagai panduan untuk pelaku pasar dan mengikat bagi Bulog. Harga gabah sejak akhir tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Harga gabah saat ini disebut membatasi akses bagi penggilingan padi yang berjumlah hingga 160.000 penggilingan untuk beroperasi. Penggilingan padi kecil tidak mampu untuk membeli gabah pada tingkat tersebut selain penggiling-penggiling besar yang sudah dominan. Saat harga gabah sedang relatif tinggi, penetapan HET saat ini merugikan karena harga yang diterima petani turun dibandingkan sebelum ada HET.
- Harga pangan di tingkat konsumen harus menunjang keberlangsungan usaha produsen. Komponen biaya produksi memiliki peran yang menentukan keberlangsungan usaha tani. Biaya untuk pembelian pupuk misalnya, memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembelian pupuk dari petani dan dampaknya terhadap penggunaan pupuk. Pengurangan penggunaan pupuk di bawah tingkat yang direkomendasikan berisiko mengakibatkan penurunan hasil produksi per ha dan berpotensi merugikan. Harga pupuk dan input produksi lainnya seperti komponen biaya sewa lahan & herbisida dapat mempengaruhi pendapatan petani dan komponen-komponen biaya tersebut banyak yang belum bisa dikendalikan. Harga herbisida sejak tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat akibat bahan baku yang mahal. Sementara itu, alokasi subsidi pupuk juga sangat terbatas. Alokasi subsidi pupuk berdasarkan jenis dan jumlahnya juga semakin terbatas. Ditambah lagi harga pupuk non-subsidi dengan pupuk subsidi memiliki selisih harga yang cukup besar sehingga terdapat potensi kerugian bila harga input produksi tidak berimbang dengan harga konsumen (hilir).

KESIMPULAN RANGKAIAN FGD & SEMINAR NASIONAL (1/3)

- Tantangan dan kondisi sektor pangan Indonesia, terutama pertanian, cukup beragam dan telah dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga terkait. Dalam hal tantangan eksternal, kondisi ekonomi dan perubahan arah kebijakan politik ekonomi global, perubahan iklim, dan konflik geopolitik menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, dari sisi internal, permasalahan harga pangan dan keberlanjutan bagi produsen, permasalahan hulu tingkat produksi hingga konsumsi, dan dukungan pemerintah dari hulu ke hilir menjadi temuan-temuan utama dalam rangkaian FGD dan Seminar Nasional yang dilakukan.
- Dari sisi kelembagaan dan tata kelola kebijakan, koordinasi antar kementerian/lembaga terus dilakukan untuk memastikan integrasi dan akurasi dari penentuan kebijakan pangan oleh pemerintah. Bapanas menjadi lembaga yang menjalankan peran harmonisasi koordinasi kebijakan pangan yang diurus oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Koordinasi meliputi integrasi ekspor/impor kebutuhan pangan melalui neraca komoditas hingga integrasi proses pengambilan keputusan di bawah kementerian koordinator terkait. Reliabilitas dan akurasi data pertanian juga ditingkatkan dan dipusatkan di bawah Badan Pusat Statistik dengan berkoordinasi dengan BULOG sehingga tidak ada referensi kebijakan yang berbeda-beda. Hal tersebut diperkuat dengan peningkatan metode statistik dan prognosa neraca pangan nasional sebagai referensi kebijakan utama. Orientasi kebijakan melalui diversifikasi dan penguatan sentra produksi pangan diharapkan menjadi pilihan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjawab tantangan di masa depan.

KESIMPULAN RANGKAIAN FGD & SEMINAR NASIONAL (2/3)

- Partisipasi BUMN diperkuat, baik dalam perannya sebagai produsen, distributor, maupun sebagai instrumen utama intervensi pemerintah dalam kebijakan pangan. Lembaga pemerintah dalam hal ini BUMN pangan (i.e. BULOG) perlu melakukan pembenahan diri untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas cadangan pangan sebagai bagian dari intervensi kebijakan pemerintah. BUMN dapat berperan lebih dalam menjamin penyerapan produk pangan dalam manajemen fluktuasi persediaan antar wilayah dan antar waktu melalui penyimpanan dan distribusi produk pangan. Dalam jangka pendek, peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam ekspansi kapasitas BUMN pangan dalam manajemen cadangan pangan serta peningkatan peran dan efektivitas BUMN dalam penyerapan pangan, khususnya terkait harga, menjadi prioritas penyesuaian kebijakan dalam menjawab tantangan.
- Peningkatan produktivitas menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan masalah pertanian. Peningkatan produktivitas berhubungan langsung dengan keberlanjutan sektor pertanian, terutama yang terkait dengan kesejahteraan petani. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan benih dan pupuk yang tepat sehingga hasil dan kualitas panen meningkat. Sementara itu, petani juga didorong untuk berpartisipasi dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui koperasi dan pengolahan pasca-panen hingga pengelolaan stok dengan resi gudang. Pengembangan model korporasi petani dengan badan usaha terintegrasi hulu ke hilir perlu diperkuat, salah satunya adalah melalui BUMDes. Integrasi produksi hulu ke hilir terus dilakukan dengan atau tanpa melalui partisipasi langsung pemerintah, e.g. Program Makmur BUMN, KUR, dan perluasan akses alat dan teknologi pertanian.

KESIMPULAN RANGKAIAN FGD & SEMINAR NASIONAL (3/3)

- Bagi konsumen, bauran kebijakan penguatan ketahanan pangan perlu terus dilakukan. Diversifikasi sumber pangan pokok utama (peningkatan konsumsi produk alternatif, e.g. sorgum), perbaikan sarana distribusi, dan intervensi langsung kepada masyarakat menjadi beberapa kebijakan utama yang dilakukan. Substitusi impor melalui penguatan konsumsi produk pangan dalam negeri dianggap krusial sebagai upaya mitigasi faktor eksternal terhadap ketahanan pangan. Dalam rantai pasok, maksimalisasi konsumsi produk pangan, terutama yang berpotensi terbuang (food loss & waste) menjadi salah satu langkah yang diambil dari pemerintah mengingat skala yang besar. Pengurangan food loss & waste sepanjang rantai pasok penting dilakukan. Dengan kondisi saat ini, terdapat potensi minimalisir kerawanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang berpotensi mendapatkan manfaat.
- Untuk mendukung ketahanan pangan dari sisi konsumen, alokasi anggaran berperan penting, terutama untuk memperbaiki capaian ketahanan pangan. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, PKH, Kartu Sembako, dan pemberantasan utama alokasi anggaran ketahanan pangan pemerintah pusat. Sementara dari sisi penawaran, alokasi anggaran dimanfaatkan untuk mendukung sarana dan aktivitas produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kapasitas fiskal bagi BUMN dan dukungan terhadap program pemerintah dalam sektor pertanian diharapkan meningkat untuk menghadapi tantangan ke depan.

CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI



HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE
FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF

KSP: Presiden inginkan korporasi petani untuk tingkatkan kesejahteraan

© Kamis, 16 Maret 2023 15:50 WIB



VGI

Talking About Food Security, Moeldoko Emphasized The Importance Of Farmers' Corporations

16 Mar 2023 22:01



CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

detikfinance

Home **Ekonomi Bisnis** Finansial Infrastruktur Properti Energi Industri Fintech Infografis Loker Indeks

Adsmart SolusiUKM Terpopuler Bursa Valas Moneter Market Research Foto Biz Video Biz Perencanaan Keuangan

ADVERTISEMENT



Lazada Bunda Fest LazMail Daily Festival Ibu & Anak DISKON hingga 80% Supported By Lazada

detikFinance > Berita Ekonomi Bisnis

Ancaman Krisis Pangan Menghantui RI, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

Shafira Cendra Arini - detikFinance

Kamis, 16 Mar 2023 16:38 WIB



ADVERTISEMENT

ANALISIS ARTIKEL-ARTIKEL LIPUTAN

- Seminar nasional ini memperoleh liputan luas dari berbagai media massa. Pada umumnya, artikel-artikel liputan media memberikan sorotan yang positif terhadap penyelenggaraan seminar nasional tentang yang diselenggarakan oleh Nagara Institue di Jakarta dengan topik Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas.
- Mayoritas liputan media memberikan perhatian utama pada isu ancaman krisis pangan global dan bagaimana langkah pemerintah mengantisipasinya sehingga Indonesia mampu terhindar ancaman krisis pangan dunia..
- Isu seputar rencana impor beras sebagai salah satu dari upaya pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional juga memperoleh liputan dari banyak media. Namun, liputan media belum menguraikan secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dan usulan-usulan dari seminar untuk membenahi kebijakan pangan nasional.

DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Penyelenggaraan kegiatan berjalan secara lancar melalui kehadiran dari stakeholder kebijakan pangan, mulai dari kementerian/lembaga pemerintah, BUMN pangan, petani, hingga berbagai pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi dan ikut terdampak dari kebijakan pangan nasional.
2. Secara keseluruhan, jalannya seminar sesuai dengan topik yang membahas masalah usul-usul pembenahan kebijakan pemerintah di bidang pangan demi keberlanjutan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Poin seminar melakukan identifikasi masalah dari temuan riset dan putaran FGD dari berbagai daerah, dan bagaimana langkah pemerintah membenahi kebijakan pangan. Informasi baru banyak didapatkan terutama terkait rencana-rencana pemerintah dalam kebijakan pangan.
3. Temu dari tim peneliti berdasarkan rangkaian FGD yang dilakukan sebelumnya banyak dikonfirmasi oleh pemangku kebijakan, terutama perihal tantangan eksternal dan internal yang dihadapi sektor pangan, khususnya pertanian. Di antara permasalahan utama yang dibahas adalah terkait dengan tata kelola lembaga dan keterkaitan dengan manajemen kebijakan pangan (produksi pangan dan ekspor-impor), kesejahteraan petani, dan kondisi ketahanan pangan Indonesia (harga & tingkat konsumsi produk pangan).
4. Perdebatan dan pertukaran informasi serta ide dari peserta dan pembicara sebenarnya berlangsung cukup menarik dan mendalam. Namun, karena keterbatasan waktu, isu-isu strategis terkait persoalan pangan belum memperoleh rumusan jawaban yang mendetail dan konkret. Masih diperlukan tindak lanjut untuk memperoleh rumusan jawaban yang mendetail dan konkret terkait kebijakan pangan yang komprehensif.
5. Forum diskusi lanjutan dapat dilakukan berdasarkan masing-masing topik yang lebih spesifik agar menghasilkan rekomendasi yang lebih granular. Sebagai contoh, topik seperti tata niaga pupuk, kebutuhan penyuluh pertanian, harga pembelian pemerintah dan adopsi teknologi tepat guna, masing-masing memerlukan forum diskusi yang khusus.

LAMPIRAN

HASIL FGD DI 3 (TIGA)
KOTA YAKNI BANDUNG,
MAKASSAR DAN
PALEMBANG.
SERTA, SEBELUMNYA
SEBUAH KEGIATAN
ROUNDTABLE
DISCUSSION DI
JAKARTA.

FOCUS GROUP
DISCUSSION:

MENGUKUR KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PANGAN NASIONAL: ANTISIPASI KRISIS PANGAN GLOBAL

Bandung
19 Januari 2023

Disusun oleh
Tim Peneliti Nagara Institute

RINGKASAN

- Pada 19 Januari 2023, diadakan *focus group dicussion* dengan tema “Mengukur Kebijakan & Perencanaan Pangan Nasional: Antisipasi Krisis Pangan Global.” Diskusi dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah (SKPD) yang terkait dengan kebijakan pangan, Perum Bulog, BPN, PT Pupuk Kujang, pakar, organisasi-organisasi petani di Jawa Barat (Gapoktan, HKTI, dan lain lain), serta beberapa stakeholder terkait pangan.
- Diskusi membahas secara khusus perencanaan kebijakan pangan dan dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan pangan. Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait memberikan penjelasan mengenai aspek teknis dan rencana kebijakan yang dilaksanakan (contoh: pemilihan lahan untuk food estate) dari sisi pemerintahan dalam desain kebijakan pangan.
- Diskusi juga membahas mengenai teknis dan dampak dari pemanfaatan teknologi (bio-teknologi) dan persebarannya dari BPPT Jawa Barat serta perbaikan metode statistik sektor pangan. Dari perspektif para petani, serangkaian pertanyaan diajukan kepada lembaga terkait mengenai pemilihan dari jenis produk komoditas yang diproduksi serta keberpihakan kebijakan pangan (subsidi pupuk, harga pangan, dan mekanisme pasar). Diskusi serta pertanyaan yang ada ditujukan untuk memahami permasalahan serta tantangan dari perencanaan kebijakan pangan, khususnya di Jawa Barat.

LATAR BELAKANG ACARA

TUJUAN

Mengumpulkan aspirasi dan masukan dari *stakeholder* tiap daerah untuk mendapatkan gambaran informasi secara riil terkait kondisi pangan di daerah-daerah sebagai bahan memperkuat referensi riset akhir Nagara Institute.

DESKRIPSI PROGRAM

FGD Bandung berfokus kepada tema perencanaan kebijakan pangan. Diskusi dimulai dengan pemaparan dari tim peneliti yang kemudian dengan pemaparan dan tanya jawab antara *stakeholder* yang hadir. Fokus utama kegiatan di antaranya mengenai perencanaan kebijakan pangan dari pihak pemerintah dan dampaknya terhadap pelaku sektor pangan (petani, produsen pupuk, dan lain lain).

TOPIK ACARA Mengukur Kebijakan & Perencanaan Pangan Nasional: Antisipasi Krisis Pangan Global.

PEMBICARA Ir. Umad Muhamad, MM
(Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat).
Khudori (Pengamat Pangan).

TARGET Kehadiran *stakeholder* yang diundang dalam diskusi.

DETAIL HASIL ACARA/ AKTIVITAS

LAPORAN KEHADIRAN (FGD)

- 24 orang / instansi menerima undangan untuk hadir pada acara FGD Nagara Institute dengan topik Mengukur Kebijakan & Perencanaan Pangan Nasional: Antisipasi Krisis Pangan Global
- 16 Instansi hadir pada acara FGD

LAPORAN KEHADIRAN MEDIA

Kehadiran Media:

- Kampung Berita
- Suara Indonesia
- Harian Bhirawa
- Tepas.id

LAPORAN LIPUTAN (AMPLIFIKASI MEDIA KESELURUHAN):

- Pada tanggal 6 Februari 2023 , telah ada 4 artikel media online
- Nilai PR Value: [Rp. 18.375.000]

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (1/6)

DATA: ABSTRAK

Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Banyak faktor yang menenpatkan dunia menghadapi masalah pangan yang pelik. Di antaranya, populasi dunia yang terus meningkat signifikan, sementara daya dukung lahan pangan terus mengalami penurunan. Di saat yang sama, perubahan iklim juga menekan kapasitas produksi pangan dunia. Belum lagi masalah politik dan keamanan yang mengancam mobilitas distribusi pangan dan proteksionisme.

Situasi dalam negeri ternyata juga mengalami ancaman pangan yang nyaris sama. Pertumbuhan penduduk terus naik yang diperkirakan mencapai 319 juta pada 2045, sementara alih fungsi lahan pertanian terus terjadi secara masif disertai dengan penurunan kualitas lahan. Karena itu, masih sering terjadi instabilitas dan disparitas antarwaktu dan antardaerah baik dalam produksi maupun harga pangan. Hal ini yang membuat ketahanan pangan nasional cenderung melemah dan karena itu negara harus terus melakukan impor berbagai jenis pangan untuk memperkuat stok pangan nasional.

Karena itu, demi terciptanya ketahanan dan kedaulatan pangan berkelanjutan, diperlukan kebijakan dan perencanaan tata kelola pangan yang terukur sehingga Indonesia mampu menjadi negara berdaya saing tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tidak bergantung pada negara-negara lain.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (2/6)

BADAN PANGAN:TATA KELOLA PANGAN

Melalui Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021, pemerintah membentuk lembaga “superbody” yang bernama Badan Pangan Nasional. Lembaga ini berada langsung di bawah Presiden yang mengurus bidang pangan nasional mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga, penganeekaragaman konsumsi, kerawanan pangan dan gizi, dan keamanan pangan.

Karena itu, Badan Pangan Nasional merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan tugas yang sangat strategis. Di bidang pangan, lembaga ini bisa melakukan koordinasi untuk perumusan dan penetapan kebijakan pangan. Selain itu, lembaga ini juga bisa melakukan koordinasi terkait masalah pelaksanaan kebijakan pangan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN. Bahkan, juga memiliki kewenangan di bidang pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; dan pengembangan sistem informasi pangan.

Dalam sistem tata kelola kebijakan pangan nasional, lembaga inilah yang diberi tugas menjalankannya. Kebijakan pangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Pangan Nasional meliputi (1) pengelolaan cadangan pangan pemerintah, (2) stabilisasi dan pasokan harga, (3) penguatan sistem logistik, (4) pengendalian dan pengentasan wilayah rentan pangan dan gizi, (5) pengembangan penganeekaragaman pangan dan potensi pangan lokal, dan (6) pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (3/6)

INSTABILITAS PANGAN: MENDONGKRAK KEMISKINAN

Kondisi pangan dalam negeri masih sering dihantui ancaman instabilitas pasokan dan harga pangan. Ancaman instabilitas pasokan selalu menghantui lantaran sentra-sentra produksi pangan, yang kemudian surplus, hanya terpusat di beberapa wilayah tertentu, sementara banyak wilayah lain yang mengalami defisit. Di saat yang sama, lazimnya hanya sedikit stok pangan yang dikuasai pemerintah. Dampak ikutannya adalah instabilitas harga pangan.

Data menunjukkan, ketika terjadi instabilitas harga, lebih khusus terjadi kenaikan harga pangan, dampaknya pada angka inflasi sangat signifikan. Ketika inflasi tinggi, itu artinya sama dengan naiknya angka kemiskinan. Memang trennya naik turun, tapi sumbangan pangan pada inflasi tetap besar. Ironisnya, instabilitas harga justru lebih memberatkan masyarakat perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan data BPS Januari 2022, sumbangan makanan terhadap angka kemiskinan di perkotaan 72,37%, sementara di perdesaan 76,49%. Lebih khusus pada beras, sumbangannya di perkotaan 19,69% dan di perdesaan 23,79%.

Ada tiga sebab kenapa instabilitas pasokan dan harga pangan terjadi. Dominasi orientasi pasar kebijakan pangan. Pertama, hampir semua pangan, kecuali beras, diserahkan pada mekanisme pasar. Kedua, instrumen stabilisasi amat terbatas. Misalnya, cadangan pangan hanya ada pada beras. Itu pun jauh dari standar di ASEAN: 20% dari penggunaan. Ketiga, konsentrasi distribusi sejumlah pangan di tangan segelintir pelaku. Jalur distribusi yang konsentris dan oligopolis ini terjadi pada dua sumber pasokan: produksi domestik dan impor.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (4/6)

JAWA BARAT: PROGRAM PETANI MILENIAL (1)

Meskipun menjadi salah satu provinsi terbesar penghasil padi secara nasional, namun angka kemiskinan di Jawa Barat masih tergolong tinggi, terutama kemiskinan di sektor pertanian. Bahkan, petani yang masuk kategori miskin ekstrem angkanya mencapai 77%. Mereka adalah buruh tani.

Jawa Barat juga menjadi provinsi yang mengalami isu-isu krisis pangan yang cukup krusial, mulai dari perubahan iklim yang mengakibatkan musim tanam terganggu, logistik pangan yang belum tertata, hingga hingga tingginya food loss and waste yang mencapai 30% dari konsumsi. Dampak ikutannya terjadi perubahan iklim tanam dan produksi, terganggunya rantai pasok pangan, kenaikan harga beberapa jenis pangan, hingga terdongkraknya angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun sistem pangan berkelanjutan. Sistem ini terdiri atas subsistem ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Subsistem ketersediaan ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan sendiri atau mendatangkan dari wilayah lain dan pencadangan. Subsistem akses untuk menjaga stabilitas pasokan harga, menyederhanakan sistem logistik dan distribusi, meningkatkan akses petani terhadap pasar, dan lain sebagainya. Subsistem pemanfaatan untuk pemenuhan kuantitas dan kualitas pangan, optimalisasi penganeekaragam konsumsi pangan, dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (5/6)

JAWA BARAT: PROGRAM PETANI MILENIAL (2)

Salah satu program unggulan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai sistem pangan berkelanjutan adalah program petani milenial. Melalui program ini, kaum akan didorong untuk tertarik bekerja dan berusaha di sektor pertanian sebagai bagian dari regenerasi petani. Sebab, petani Indonesia saat ini rata-rata sudah berusia di atas 40 tahun, ada tren kaum muda enggan bertani lantaran secara ekonomi menjadi petani tidak menjanjikan masa depan.

Yang dimaksud dengan petani milenial dalam program ini adalah warga Jawa Barat yang melakukan usaha tani, berusia 19-39 tahun, dan aktif terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Program petani milenial ini dijalankan dalam 4 tahapan, yaitu perintisan yang dimulai sejak 2021, diteruskan pada tahap pengembangan pada 2022, tahap penguatan pada 2023 ini, dan tahan kemandirian pada 2024. Goalnya adalah terbentuknya ekosistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Ada empat tujuan yang ingin dicapai Jawa Barat melalui program petani milenial ini, yaitu (1) menumbuhkembangkan kewirausahaan kaum muda di sektor pertanian, (2) mengubah wajah pertanian yang ramah kaum muda, (3) menciptakan pertanian maju, mandiri, dan modern, dan (4) mengurangi problem ketenagakerjaan di sektor pertanian.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (6/6)

JAWA BARAT: PROGRAM PETANI MILENIAL (3)

Untuk mendukung program petani milenial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan potensi lahan mencapai 100,5 ha yang tersebar wilayah Jawa Barat. Sampai 2023, anggaran yang disiapkan untuk menggulirkan program petani milenial ini Rp 76,5 miliar. Anggaran tersebut untuk memfasilitasi 5000 petani milenial dari 2012 hingga 2023.

Program petani milenial telah dijalankan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan 93 jenis komoditas pangan. Selain itu, juga melibatkan kerja sama dengan 36 perusahaan offtaker yang bisa menjamin terserapnya produk pertanian petani milenial ke pasar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggandeng lembaga-lembaga lain untuk menyukseskan program ini, seperti lembaga keuangan dan keuangan.

Program ini terbilang sukses menarik kaum milenial untuk terjun ke sektor pertanian. Saat program ini dimulai, yang mendaftar 20.894 orang dan dinyatakan lulus sebagai peserta sebanyak 5.658 pemuda. Pada 2023, yang telah menjalani usaha pertanian sebanyak 3.751 kaum milenial yang tersebar di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Berkat program ini, di Jawa Barat telah terjadi regenerasi petani. Ada ribuan kaum milenial yang terjun ke usaha tani untuk membangun sistem ketahanan pangan berkelanjutan.

KESIMPULAN FGD (1/3)

- Belum ada lembaga khusus yang merumuskan kebijakan pangan dari hulu ke hilir hingga tahun 2022, sebelum dibentuknya Badan Pangan Nasional. Selama ini, kebijakan pangan diurus oleh tingkat eselon satu sehingga koordinasi pangan menjadi sangat sulit. Pembentukan Badan Pangan Nasional diharapkan dapat berperan, terutama dalam koordinasi antar lembaga.
- Dari sisi perencanaan, partisipasi pemerintah masih terbatas yang dapat dilihat salah satunya dari anggaran yang relatif rendah (pada tingkat provinsi ada yang hanya sebesar Rp900 milyar dibandingkan dengan total APBD sebesar Rp43 triliun). Sementara itu, alokasi anggaran pertanian pada tingkat kab/kota bisa jadi lebih rendah dan terbagi di antara banyak dinas terkait (PUPR, pertanian, dan dinas-dinas lain).
- Perwakilan petani menganggap anggaran pertanian sudah relatif cukup, sayangnya tidak merespon pada permasalahan inti. Produksi seharusnya bukan masalah karena pangan Indonesia diproduksi jutaan petani bukan segelintir produsen. Konsumsi juga banyak karena jumlah penduduk besar. Namun ada masalah dalam harmoni penawaran dan permintaan pangan. Penyelarasan produksi seharusnya bersifat sementara, termasuk subsidi teknologi terhadap petani.
- Orientasi kebijakan pertanian harus seimbang dan jelas menyentuh kesejahteraan petani. Kebijakan pertanian masih berfokus di hulu seperti subsidi pupuk dan alat pertanian. Anomali kondisi pertanian kita karena mekanisme pasar tidak berjalan di pasar pertanian sehingga harga tidak bisa diatur oleh petani.

KESIMPULAN FGD (2/3)

- Terkait pupuk, petani masih menempatkan pupuk sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi. Pupuk menjadi input pertanian yang krusial dalam menunjang produksi, tetapi sebagian besar lahan di Indonesia sudah mengalami degradasi akibat pupuk yang menyebabkan kandungan hara terlalu rendah.
- Alokasi jumlah subsidi pupuk yang masih terbatas (9 juta dari RDKK 25 juta ton), keterjangkauan harga, dan jenis pupuk perlu menjadi perhatian utama. Secara teknis, jenis pupuk (kimia atau organik ataupun dari jenis pupuk tunggal dan majemuk) juga secara langsung berpengaruh terhadap hasil tanam dengan variasi antar wilayah yang sangat besar.
- Kandungan pupuk majemuk (contoh: pupuk NPK) memiliki kandungan yang komposisinya tidak memiliki kecocokan dengan semua jenis tanah karena perbedaan kebutuhan unsur hara di tanah. Peran petani dalam bekerja sama dengan produsen di lapangan disebut sangat menentukan dalam pengembangan jenis pupuk yang sesuai dan dampaknya terhadap hasil tanam. Selain itu, produksi beberapa jenis campuran pupuk tersebut juga mengalami perubahan formulasi komposisi akibat kenaikan harga bahan baku (berdasarkan penelitian, dampak terhadap produktivitas minimal). Ketergantungan pada beberapa kandungan kimia dan jenis tertentu kepada impor menjadi tantangan ke depan.
- Efektivitas penggunaan pupuk perlu dibantu dari utilisasi peta hara di wilayah-wilayah Indonesia. Sementara itu, peran penyuluh petani penting untuk memberikan panduan bagi petani untuk menyesuaikan formulasi kebutuhan pupuk dari masing-masing wilayah. Sayangnya Indonesia dan Jawa Barat kekurangan jumlah penyuluh petani. Hal ini menjadikan persoalan pupuk menjadi persoalan dari hulu ke hilir.

KESIMPULAN FGD (3/3)

- Dalam jangka pendek, pemerintah telah memulai berbagai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan masalah sektor pangan, baik dari sisi produksi hingga distribusi pangan. Penggunaan dan pengembangan benih unggul menjadi salah satu kunci utama peningkatan produktivitas. Distribusi pangan juga terhambat dari biaya dan manajemen logistik. Hal ini berusaha diselesaikan contohnya melalui kebijakan perencanaan pembangunan supply chain centre (SCC) dan subsidi biaya transportasi di Jawa Barat. Dari sisi pemasaran, perbaikan kualitas produk dan program seperti food estate menjadi bagian dari upaya memperbaiki hilir dari sektor pangan.
- Dalam jangka panjang, perbaikan dan transformasi lembaga-lembaga di sektor pangan menjadi agro-business dapat memberikan kontribusi besar. Kelembagaan petani dapat diperluas sehingga mencakup hulu ke hilir yang dapat memberikan kepastian dan penyesuaian antara hasil produksi dan konsumsi produk. Peran pihak swasta juga penting dalam proses transformasi terutama dalam rantai pasok. Pihak swasta juga dapat berperan sebagai investor hingga off-taker produk-produk pertanian.
- Masalah kepastian harga dan akses pasar diharapkan dapat mendukung petani untuk semakin sejahtera karena mendapatkan manfaat langsung dari hasil produksi pertanian.

DETAIL HASIL ACARA/AKTIVITAS

LIST LIPUTAN MEDIA

No.	Tanggal	Media	Judul Artikel	PR Value
1	19 Januari 2023	Kampung Berita	Kewenangan Bapanas belum efektif, tak menjangkau perumusan ekspor dan impor	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 0 Rp. 4.500.000
2	19 Januari 2023	Suara Indonesia	Antisipasi Krisis Global, Stakeholder dan organisasi tani Bandung diskusi ketahanan Pangan	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 2 Rp.6.000.000
3	2 Februari 2023	Harian Bhiarawa	Focus Group Discussion, Mengukur kebijakan dan perencanaan pangan nasional antisipasi krisis pangan global	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000
4	19 Januari 2023	Tepas.id	Focus Group Discussion "Mengukur kebijakan & perencanaan pangan nasional: Antisipasi krisis pangan global	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
5				

CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

Nasional | Tokoh

Kewenangan Bapanas belum Efektif, Tak Menjangkau Perumusan Ekspor dan Impor

oleh RedaksiKBID 19/07/2023

BAGIKAN   



KAMPUNGBERITA.ID – Merespon kritik DPR terhadap Kementerian Pertanian terkait program pertanian dan data stok pangan yang tidak konsisten, Nagara Institute menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur kebijakan dan perencanaan pangan sebagai langkah antisipasi krisis pangan global.

Jawa Barat menjadi satu dari empat provinsi yang dipilih dalam rangkaian FGD terkait pangan karena memiliki tingkat produktivitas dan kualitas pangan tertinggi di Indonesia.

Diskusi dihadiri perwakilan dari stakeholder terkait dengan kebijakan pangan di antaranya pemerintah daerah, Perum Bulog, BPN, BPTP Jawa Barat, perusahaan pupuk, pakar pertanian, serta organisasi-organisasi tani di Jawa Barat (Gapoktan, HKTI, dan lainnya).

LAKONE



Puncak Resepsi 1 Abad NU, Panitia Tegaskan Masyarakat Umum Boleh Hadir ke Sidoarjo



Berkat Prestasi di Pencak Silat, Prajurit Kodam V/Brawijaya Dapat Promosi Prioritas Satgas ke Luar Negeri



Stunting di Surabaya Turun Signifikan, Reni Astuti: Terima Kasih Kader Surabaya Hebat

KAMPUNG RAYA



Merawat Tradisi, Perayaan Cap Go Meh 2023 Serukan Toleransi



Kunjungi Kampung Pedukuhan Kalisantri,

Senin, 6 Februari 2023

SEARCH AND ENTER

Search

Home / Indeks / Nasional / Pilihan Redaksi / Utama Dua / Focus Group Discussion, Mengukur Kebijakan dan Perencanaan Pangan Nasional Antisipasi Krisis Pangan Global

Focus Group Discussion, Mengukur Kebijakan dan Perencanaan Pangan Nasional Antisipasi Krisis Pangan Global

Author by Danu Setiawan Posted on 02/02/2023



Bandung, Bhirawa Merespon kritik DPR terhadap Kementerian Pertanian terkait program pertanian dan data stok pangan yang tidak konsisten, Nagara Institute menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur kebijakan dan perencanaan pangan sebagai langkah antisipasi krisis pangan global. Jawa Barat menjadi satu dari empat provinsi yang dipilih dalam rangkaian FGD terkait pangan karena memiliki tingkat produktivitas

dan kualitas pangan tertinggi di Indonesia.

Diskusi dihadiri perwakilan dari stakeholder terkait dengan kebijakan pangan di antaranya pemerintah daerah, Perum Bulog, BPN, BPTP Jawa Barat, perusahaan pupuk, pakar pertanian, serta organisasi-organisasi tani di Jawa Barat (Gapoktan, HKTI, dan lainnya) Kamis (19/01/2023). Diskusi dibuka oleh Akbar Faisal dan diawali dengan

Related

Ditunjuk jadi Pil Kota DPRD Jatim, Pj Bupati dan Perjanjian Kerja Said Abdullah



Perkara Orasi Gugat Dominasi PA Bojonegara Selamatkan 750 Perkarat

Jamnah Umrah Yatim Menuju Tanah Suci Mekah

HARIAN Bhirawa
Mata Rakyat Mitra Birokrat
IKLAF LANGGANAN Rp 53.000/bulan Ekspor Rp 3.000
031-863454

Mitra



Akhir Ajak Berolahraga



Berhasil Lampau Target



Merta Polemik Disediahi



Rumah Ibu Nyai Kebanjiran

CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

Tepas.id
Meningkatkan etika jawa

Wisata & Kuliner Gaya Hidup Humaniora Liputan Khusus Opini Coba Tanya Kenapa? Tepas Streaming Radio

Focus Group Dicussion “Mengukur Kebijakan & Perencanaan Pangan Nasional: Antisipasi Krisis Pangan Global”

19/01/2023 03:14 WIB @tinggung@tepasid

Mencan kritik DPR terhadap Kementerian Pertanian terkait program pertanian dan data stok pangan yang tidak kondusif, Negara Institute menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur kebijakan dan perencanaan pangan sebagai langkah antisipasi krisis pangan global. Jawa Barat menjadi satu dari empat provinsi yang dipilih dalam rangkaian FGD terkait pangan karena memiliki tingkat produktivitas dan kualitas pangan tertinggi di Indonesia.

SUARA INDONESIA
Berita, Opini, dan Analisis

Home SIN TV Peristiwa Politik Ekonomi Pemerintahan Pendidikan Lainnya

All

- Penjual Bendera NU di Sidoarjo Kebanjiran Pesanan 03 February 2023 - 14:02
- Nahdlatul Tujjar Fest, Gebyar Ekonomi 1 Abad NU di Sidoarjo 02 February 2023 - 14:02
- Harga Garam di Sampang Tembus Tiga Juta Per Ton 31 January 2023 - 16:01
- Topi Banyuwangi Satuasatunya Kabupaten di Jatim dengan 2 Event Unggulan di KEN 2023 29 January 2023 - 16:01

Pangan

Lulman Hadi · 19 January 2023 | 13:01

Share Tweet

EKONOMI

BANDUNG - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah serius mengencakan program ketahanan pangan untuk mendorong kualitas pangan di Indonesia.

Keseriusan itu dibahas Negara Institute dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bandung, pada (19/1/2023) lalu, untuk mengukur kebijakan dan perencanaan pangan sebagai langkah antisipasi krisis pangan global.

- 1 Potret Kemiskinan Bangsa
- 2 Tokoh Inspirasi
- 3 Kuliner Nusantara
- 4 Dinamika Politik Bangsa
- 5 UIN Malang
- 6 Seputar Peristiwa
- 7 Usaha Kecil Menengah
- 8 Pelayanan Publik
- 9 Seputar Olahraga
- 10 Pereritah Kabupaten/Kota

Terpopuler

ANALISIS ARTIKEL-ARTIKEL LIPUTAN

- Artikel-artikel liputan dari kegiatan secara umum memberikan sorotan yang positif terhadap penyelenggaraan FGD perencanaan kebijakan pangan oleh Nagara Institute.
- Dari empat artikel liputan tersebut, tema diskusi mengenai perencanaan kebijakan pangan dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama diikuti dengan peran pemerintah dalam kebijakan pangan.
- Peran Badan Pangan nasional dan koordinasi peran Lembaga-Lembaga negara dalam perencanaan kebijakan pangan menjadi tema utama pembahasan mengenai peran pemerintah di samping isu terkait produksi dan distribusi pangan.

DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



EVALUASI DAN REKOMENDASI

- Kegiatan FGD Bandung berlangsung dengan lancar dan telah dihadiri perwakilan dari stakeholder yang berperan dalam perencanaan kebijakan pangan. Sebagian besar perwakilan yang hadir juga secara aktif ikut serta dalam kegiatan diskusi, baik dari pemerintah daerah, DPRD, dinas terkait, hingga perwakilan kelompok tani dalam menyampaikan pendapat dan perspektif kebijakan pangan.
- Secara keseluruhan, diskusi selama FGD telah sesuai dengan topik membahas aspek perencanaan dari kebijakan pangan, terutama juga memberikan perspektif dari pihak petani sebagai pemain utama dalam kebijakan pangan, baik dari aspek teknis maupun kebijakan secara umum.
- Dalam pembahasan topik tertentu seperti mengenai kebijakan-kebijakan yang krusial dan terkini seperti produksi & subsidi pupuk serta program-program perbaikan tata kelola niaga pangan ke depannya dapat dijadikan topic of interests dan diperdalam sebagai salah satu subjek diskusi utama yang banyak dibahas.
- Dalam pembahasan mengenai tata kelola niaga pangan jika mungkin dapat diperluas untuk melibatkan pihak-pihak dari lembaga-lembaga keuangan. Hal ini mempertimbangkan peran sentral lembaga-lembaga tersebut dalam kebijakan pangan (contoh: KUR untuk usaha tani).

FOCUS GROUP DISCUSSION:

PROBLEMATIKA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PANGAN NASIONAL

Laporan Kegiatan FGD

Makassar, 9 Februari 2023

Disusun oleh:
Tim Peneliti Nagara Institute

RINGKASAN

- Dalam FGD tersebut, Perwakilan dari petani (HKTI) dan pemerintah daerah kompak dalam mengeluhkan ketidakpastian harga yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Cadangan pangan pemerintah dijadikan referensi impor meskipun stok di masyarakat masih melimpah. Distribusi pupuk yang sering terlambat, tidak tepat jumlah, prosedur mendapatkan yang tidak sederhana serta pengawasan pengelolaan pupuk menjadi perhatian.
- Luas lahan yang semakin terbatas juga mengharuskan petani menambah penggunaan pupuk dan mengandalkan benih/bibit produktif. Penggunaan alternatif pupuk organik, seperti teknologi aplikasi pupuk nano menjadi pilihan bagi petani.
- Untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bertani perwakilan Pemuda Petani Sulawesi Selatan menyebutkan perlunya aplikasi teknologi pertanian yang lebih modern, akses modal, hingga kepastian harga.
- Indonesia, disebut masih merupakan negara swasembada beras karena dapat memenuhi lebih dari 90% kebutuhan beras dari produksi domestik. Bapanas juga terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola komoditas jagung, kedelai, dan komoditas lainnya. Secara nasional, Bapanas sudah menghadirkan dashboard harga komoditas pangan (khususnya beras) yang bersifat real-time setiap harinya dari setiap kab/kota di Indonesia.
- Masalah pangan tidak dapat didiskusikan secara terpisah antara hulu dengan hilir. Perbaikan rantai pasok pasca-produksi terus didorong dengan melakukan penyediaan infrastruktur untuk mempermudah distribusi/mobilisasi produk dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini untuk menjamin bahwa petani dapat menjual produk ke wilayah yang mengalami defisit dan menghindari eksek produksi di suatu wilayah. Peran dari lembaga pangan seperti Bulog dan ID FOOD didorong sebagai off-taker dan stand-by buyer produk pertanian yang bergantung dengan kapasitas pasca-panen yang mencukupi. Pemerintah daerah juga dapat mengantisipasi fluktuasi harga dengan anggaran DAU dan BTT. Bapanas diharapkan dapat memiliki wewenang serta kapasitas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pangan.

LATAR BELAKANG ACARA

TUJUAN

Mengumpulkan aspirasi dan masukan dari *stakeholder* tiap daerah untuk mendapatkan gambaran informasi secara riil terkait kondisi pangan di daerah-daerah sebagai bahan memperkuat referensi riset akhir Nagara Institute.

DESKRIPSI PROGRAM

FGD Makassar berfokus kepada tema Problematika Produksi dan Distribusi Pangan Nasional. Diskusi dimulai dengan pemaparan dari tim peneliti yang kemudian dengan pemaparan dan tanya jawab antara *stakeholder* yang hadir. Fokus utama kegiatan di antaranya mengenai perencanaan kebijakan pangan dari pihak pemerintah dan dampaknya terhadap pelaku sektor pangan (petani, produsen pupuk, dan lain lain).

TOPIK ACARA Problematika Produksi dan Distribusi Pangan Nasional

PEMBICARA Pak Arief Prasetyo
(Kepala Badan Pangan Nasional)

TARGET Kehadiran *stakeholder* yang diundang dalam diskusi.

DETAIL HASIL ACARA/ AKTIVITAS

LAPORAN KEHADIRAN (FGD)

- 27 orang / instansi menerima undangan untuk hadir pada acara FGD Nagara Institute dengan topik Problematika Produksi dan Distribusi Pangan Nasional
- 27 Instansi hadir pada acara FGD

LAPORAN KEHADIRAN MEDIA

Kehadiran Media:

- Menit indonesia
- Lintas parlemen
- Palu ekspres
- Harian news
- Matakita
- Herald Sulsel

LAPORAN LIPUTAN (AMPLIFIKASI MEDIA KESELURUHAN):

- Pada tanggal 9 Februari 2023 , telah ada 6 artikel media online
- Nilai PR Value: [Rp. 18.375.000]

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (1/9)

DATA

Permasalahan mengenai ketersediaan dan reliabilitas data pangan menjadi salah satu poin utama yang dibahas. Perbaikan ketersediaan dan kualitas data pemerintah membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak (lembaga) yang berwenang, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Selain kebutuhan dan tantangan dari ketersediaan data, akses dari informasi untuk pemegang kebijakan dan publik secara umum menjadi prasyarat pelaksanaan kebijakan sektor pangan. Transparansi data pangan terkait harga dan ketersediaan menjadi langkah awal yang diambil karena data-data tersebut dijadikan acuan dalam identifikasi permasalahan sektor pangan. Salah satu yang menjadi langkah awal adalah menghadirkan panel harga dan stok komoditas pangan secara real time. Kehadiran panel ini memberikan informasi yang lengkap dan bersifat harian dari seluruh kab/kota sehingga dapat diketahui pola, disparitas, dan perubahan harga antar daerah dan antar waktu.

Sementara itu, ketersediaan dan reliabilitas data membantu dalam membuat prognosa neraca pangan nasional. Kerjasama lembaga-lembaga diperlukan untuk menentukan jumlah stok awal, jumlah panen, hingga realisasi impor pada komoditas pangan. Ketersediaan data dan transparansi dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pangan. Komunikasi dengan masyarakat secara umum dan petani secara khusus juga dapat diperbaiki, contohnya dalam kebijakan impor-ekspor komoditas pangan seperti beras. Kejelasan mengenai dasar pengambilan kebijakan terkait pangan menjadi lebih transparan dan dikomunikasikan lebih baik kepada masyarakat luas

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (2/9)

LAHAN

Isu terkait lahan dalam problematika produksi banyak terkait dengan alih fungsi lahan dan kualitas lahan pertanian. Alih fungsi lahan terjadi secara berkelanjutan di berbagai daerah untuk kebutuhan industri maupun pemukiman. Peningkatan akses terhadap lahan pertanian membuka kesempatan untuk dilakukan pemanfaatan lahan untuk kebutuhan non-pertanian. Pembangunan jalan tani sebagai sarana infrastruktur juga turut berkontribusi terhadap peningkatan alih fungsi lahan pertanian itu sendiri. Pembangunan hunian vertikal dapat menjadi salah satu solusi menjembatani antara kebutuhan perumahan dan keterbatasan lahan. Berkurangnya lahan pertanian akibat konversi ke lahan non-pertanian tidak memberikan pilihan selain intensifikasi lahan melalui penggunaan pupuk dan benih. Sementara itu, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat merusak kandungan dan kualitas tanah sebagai dampak negatif jangka panjang.

Jenis dan kualitas tanah juga mempengaruhi jenis dan jumlah pupuk yang dibutuhkan. Penggunaan pupuk pada lahan pertanian selayaknya dilakukan setelah adanya soil tests untuk menentukan jumlah & jenis pupuk yang sesuai. Jenis dari tanaman yang akan ditanam juga dapat menyesuaikan berdasarkan kualitas lahan yang ada. Tanah di wilayah tropis juga rentan terhadap penggunaan beberapa jenis pupuk seperti pupuk urea sehingga perlu panduan dan kontrol penggunaan secara ketat.

Selain untuk kebutuhan pertanian, terdapat saran untuk penggunaan lahan sebagai cadangan gagal panen sebesar 300 ribu ha. Lahan disebut sebagai lahan cadangan super intensif untuk memproduksi tinggi dengan tambahan pupuk berkali lipat di saat menghadapi gagal panen skala besar. Luas lahan tersebut diharapkan cukup untuk mengantisipasi dan mengganti kapasitas produksi yang hilang saat gagal panen.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (3/9)

TENAGA KERJA

Isu ketenagakerjaan beberapa kali dibahas sebagai permasalahan utama yang dihadapi sektor pertanian, khususnya berkurangnya jumlah petani dan menurunnya minat bertani pada generasi muda. Petani muda juga harus menghadapi ketidakpastian harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan sebagaimana petani pada umumnya. Penyelesaian masalah struktural tersebut melalui akses modal, teknologi, dan pendidikan disebut dapat menjadi arah kebijakan untuk mendorong minat bertani.

Pemerintah dari pusat dan daerah belum banyak mendorong partisipasi petani muda dan regenerasi petani. Anggaran pemerintah daerah belum banyak dialokasikan untuk program-program petani muda. Sementara itu, program serta regulasi yang sudah ada belum cukup efektif. Program yang dari swasta, contohnya seperti program dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang di atas kertas melibatkan 6,000 petani muda di 15 kabupaten di Indonesia. Meskipun demikian, program ini hanya diikuti secara riil oleh sekitar 1,000 petani. Pemerintah daerah melalui dinas pertanian juga tidak mendorong secara aktif program-program tersebut dan lebih banyak berfokus terhadap aspek administratif.

Dari sisi pendidikan, petani generasi muda membutuhkan pendidikan yang memadai, terutama yang aplikatif pada bidang pertanian. Dalam hal ini Universitas Hasanuddin salah satunya telah berpartisipasi dalam pendidikan petani-petani muda. Peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui ekspansi pendidikan vokasi di kabupaten-kabupaten produsen produk pertanian.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (4/9)

TEKNOLOGI

Pemanfaatan teknologi dan modernisasi pada rantai pasca-panen, terutama dalam pengolahan hasil panen (off-farm), dapat menunjang keberlangsungan pertanian. Diperlukan pemanfaatan teknologi untuk menambah efisiensi seperti yang dicontohkan dengan penggunaan combine harvester untuk sawah skala besar di Sulawesi Selatan. BUMN sendiri seperti Bulog sudah mulai berinvestasi untuk alat dan infrastruktur seperti corn-dryer dalam skala industri. Pemanfaatan teknologi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dari produk pertanian, contohnya menjaga kadar air pada jagung pada tingkat tertentu.

Pemanfaatan bioteknologi juga dikaji untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pada beberapa komoditas tertentu seperti kedelai, produksi Indonesia hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan domestik dan mengandalkan impor (2,5 juta ton dari Amerika Serikat). Hal ini menyebabkan harga kedelai domestik bergantung kepada kondisi pasar kedelai internasional dan fluktuasi nilai tukar. Produksi kedelai domestik dengan menggunakan GMO masih kontroversial. Produksi kedelai dengan GMO dapat mencapai 3,5-4 ton per ha sedangkan produksi domestik hanya 1,2 ton per ha. Dengan kondisi impor kedelai yang pada akhirnya menggunakan GMO, maka pelarangan penggunaan GMO pada kedelai tidak sesuai tujuan. Pada kemungkinan pemanfaatan GMO, telah dilakukan studi skala lab yang perlu diperluas dalam skala industri dengan bantuan BUMN.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (5/9)

PUPUK (1/2)

Pupuk menjadi salah satu input produksi yang memiliki peran yang penting dalam menunjang produktivitas pertanian. Petani masih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pupuknya. Beberapa jenis pupuk seperti Pupuk Super Nano menjadi salah satu pilihan petani karena memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Namun, pupuk jenis tersebut sering tidak tersedia karena keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pemupukan disebut berdampak signifikan terhadap tanaman karena potensi kerusakan tanaman selama tahapan krusial. Selain itu, pupuk jenis SP 36 juga menjadi salah satu jenis pupuk yang tidak mudah didapatkan. Pengawasan juga dianggap lemah karena bersifat ad-hoc sehingga pengawasan terhadap ketersediaan dan kualitas pupuk dianggap tidak maksimal.

Permasalahan penyediaan pupuk tidak hanya berasal dari ketidakterersediaan, tetapi juga hambatan dalam proses produksi. Ketersediaan pupuk subsidi bergantung kepada produksi dari 5 pabrik pupuk utama. Produksi pupuk dapat terdampak dari kekurangan bahan baku produksi ataupun kenaikan harga input. Gangguan pada produksi terjadi contohnya pada Pupuk Iskandar Muda. Pada kasus tersebut, produksi pupuk terpaksa terhenti karena kekurangan pasokan gas sebagai bahan baku. Sementara itu, untuk beberapa jenis pupuk, bahan baku produksi seperti fosfat masih mengandalkan impor.

Sistem zonasi pada distribusi dianggap menghambat karena distribusi tidak berdasarkan kedekatan lokasi, tetapi berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Sementara itu, distribusi pupuk ke wilayah Sulawesi juga terhambat karena pelarangan pelayaran untuk kapal ukuran tonase tertentu. Keterlambatan pengiriman berdampak kepada ketersediaan pupuk dan aktivitas pertanian.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (5/9)

PUPUK (2/2)

Penggunaan pupuk juga memerlukan formulasi dan penanganan yang tepat. Jenis tanah yang berbeda memerlukan jenis dan jumlah pupuk yang juga berbeda. Berkurangnya kualitas lahan mendorong penggunaan pupuk yang berlebihan dan dapat menyebabkan kerusakan pada lahan. Penggunaan pupuk pada lahan pertanian selayaknya dilakukan setelah adanya soil tests untuk menentukan jumlah & jenis pupuk yang sesuai. Secara komersial, konsumsi pupuk antara subsidi dengan non-subsidi juga perlu disesuaikan karena berdampak langsung terhadap biaya produksi. Penambahan kontribusi dari pupuk non-subsidi tidak selalu berdampak positif secara keseluruhan jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding peningkatan output. Pengawasan dan bimbingan yang tepat terhadap penggunaan pupuk pada tingkat petani diperlukan.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (6/9)

HARGA (1/2)

Di antara faktor lainnya, harga adalah masalah utama yang dihadapi petani. Bagi petani, tantangan utama yang dihadapi adalah risiko akibat fluktuasi dan harga yang tidak dapat menjamin keberlangsungan usaha tani. Pada beberapa komoditas utama seperti beras dan cabai, harga pada tingkat produsen terlalu rendah dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal tersebut menyebabkan petani mengalami kerugian. Peran pemerintah melalui harga acuan pembelian juga dianggap masih belum maksimal mempertimbangkan harga yang dapat menguntungkan bagi petani.

Fluktuasi dan rendahnya harga salah satunya dapat diatribusikan kepada tidak meratanya ketersediaan komoditas di wilayah surplus dan defisit. Daerah dengan permintaan besar dan kapasitas produksi pangan rendah seperti Jakarta seharusnya dapat menjadi pasar utama bagi hasil produksi wilayah-wilayah lain. Namun, keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi hambatan, terutama di wilayah Indonesia timur. Produksi yang tidak merata menyebabkan pelayaran dari barat ketimur Indonesia terhambat dari sisi efisiensi dan biaya akibat ketidakseimbangan muatan berangkat dan balik. Infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan juga masih terbatas. Nusa Tenggara Timur sebagai sentra produksi jagung nasional adalah salah satu contohnya. Sebagai produsen jagung keterbatasan akses untuk distribusi dan penyimpanan berpotensi menyebabkan harga jagung jatuh terlalu rendah saat panen.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (6/9)

HARGA (2/2)

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung petani-petani di wilayahnya melalui anggaran DAU & anggaran untuk biaya tidak terduga (BTT) dalam komponen APBD. Anggaran yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk secara langsung membeli dari petani (sebagai off-taker) dan berkoordinasi langsung dengan daerah lainnya ataupun melalui badan pangan. Anggaran juga dapat dialokasikan untuk membiayai mobilisasi stok pangan antar daerah. Ditambah lagi, koordinasi antar lembaga dari tingkat pusat mulai dari kejaksaan, menteri dalam negeri, hingga menteri keuangan disiapkan untuk mendukung fungsi pemerintah daerah tersebut.

BUMN pangan sebagai pemain utama dapat dan telah berperan sebagai off-taker dan stand-by buyer produk pertanian. Dari segi kapasitas, Bulog adalah badan usaha dengan kapasitas gudang penyimpanan pangan terbesar dengan 3,8 juta ton. Saat ini, kapasitas yang digunakan hanya sekitar 300.000 ton (beras). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kewenangan Bulog dapat diperluas ke komoditas lain atau jika diperlukan, melalui badan usaha pangan lainnya (contoh: ID Food). Petani dapat diversifikasi ke arah produk seperti beras aromatic hingga produk-produk organik. Pendampingan dari pemerintah dan BUMN dapat melalui perluasan program-program dari BUMN terkait, seperti Program Makmur hingga KUR BRI.

Intervensi pemerintah lainnya untuk mendukung harga jual petani adalah melalui harga acuan pembelian. Harga acuan yang ditentukan menjadi salah satu indikator harga yang diterima petani ketika bertransaksi dengan badan usaha pemerintah. Penetapan harga acuan juga perlu kerja sama antar stakeholder dalam rantai pasok karena komoditas tertentu seperti jagung merupakan input produksi bagi komoditas daging ayam (pakan ternak). Kenaikan harga jagung akan meningkatkan harga daging ayam. Sementara itu, bila dengan harga yang ditetapkan juga tidak mampu menyerap maka ada kemungkinan bahwa fungsi pemerintah untuk menjaga floor price berjalan karena harga di pasar tidak terlalu rendah.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (7/9)

MODAL

Meskipun program KUR disebut tidak membutuhkan agunan, tetapi dalam praktik di lapangan tidak mudah untuk mengakses dana yang ada. Anggaran dari pemerintah daerah sendiri anggaran untuk petani, khususnya petani muda, masih rendah atau belum ada. Tidak adanya dukungan akses modal dari pemerintah menyebabkan petani-petani muda berupaya untuk mendapatkan modal dari modal ventura. Penggunaan modal menjadi lebih berisiko karena harga hasil panen terlalu rendah dan tidak pasti.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (8/9)

BENIH/BIBIT

Sejak dihilangkan subsidi benih, harga benih meningkat dan sulit untuk diperoleh. Kemandirian benih dijadikan orientasi kebijakan pemerintah daerah, terutama Pemprov Sulawesi Selatan melalui Program Mandiri Benih. Salah satu yang melaksanakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Untuk mendukung ketersediaan benih bagi petani dilaksanakan Program Satu Desa Satu Penangkaran Benih, meskipun masih terbatas. Ke depannya Pemda Kabupaten Pinrang berniat memperdalam program ke satu kelompok tani satu penangkaran benih.

Benih digunakan secara berulang sehingga kualitas genetik dari bibit berkurang. Teknik penggunaan benih juga berpengaruh terhadap kualitas panen yang dihasilkan. Terdapat perbedaan hasil sebagai dampak dari perbedaan pola tanam antara bibit yang ditanam dengan bibit yang ditebar.

Secara komersial, penggunaan bibit dihadapkan pada permasalahan antara keterjangkauan harga dan kualitas. PT SHS sebagai salah satu penyedia benih nasional tidak berada dalam kondisi finansial yang sehat (utang cadangan benih nasional Rp 240 Miliar dengan Kementan). Benih yang berkualitas juga berada pada tingkat harga Rp. 11-12.000 sementara harga dari Kementan berada pada tingkat Rp. 8.000. Selisih harga mengharuskan produsen benih memproduksi benih dengan kualitas (produktivitas) rendah. Kualitas benih yang rendah mendorong sebagian petani lebih memilih menggunakan biji dan benih tertentu (petani jagung dengan bibit dan benih P36). Produksi benih dari pemerintah menghadapi trade-off antara kualitas dan harga benih (intensifikasi dengan ekstensifikasi).

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (9/9)

KELEMBAGAAN

Dari sisi kelembagaan, penugasan Bapanas meliputi ketersediaan dan stabilisasi pangan, kerawanan pangan dan gizi dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Penugasan ini meliputi kewenangan beberapa kementerian & lembaga yang ada sebelumnya dan telah mendapatkan pendelegasian dari kementerian BUMN, perdagangan, hingga kementerian pertanian. Pendelegasian wewenang tersebut untuk mendukung kebijakan dari hulu ke hilir dari sektor pangan. Kebijakan penentuan impor, pengiriman, hingga pembelian dan harga acuan berada di bawah kendali Badan Pangan. Badan usahaseperti Bulog akan berada di bawah koordinasi Bapanas untuk melaksanakan fungsinya (PSO) pada komoditas yang sudahditentukan. Lebih jauh lagi, jenis pangan yang berada di bawah tanggung jawab Bapanas adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Bapanas berperan aktif dari sisi operasional untuk memastikan kelancaran distribusi dari produk pangan antara daerah surplus dengan daerah defisit. Meskipun demikian, anggaran dari Bapanas sendiri masih terbatas (Rp. 103 miliar). Dari keterbatasan tersebut, Bapanas harus mengandalkan kemampuan anggaran dari badan usaha yang berada di bawahnya (Bulog, ID Food, dan lain-lain) dalam melaksanakan kebijakan. DPR dan pemerintah diharapkan untuk menempatkan dana talangan/cadangan di Bapanas untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan program yang sudah ada. Kewenangan pembelian dari badan usaha seperti Bulog juga perlu diberikan fleksibilitas untuk merespon kondisi harga jika harga pembelian yang ditetapkan terlalu rendah.

RINGKASAN KESIMPULAN FGD

- Kepastian dan stabilisasi harga komoditas menjadi penyebab sekaligus akibat dari permasalahan pada sisi produksi dan distribusi pangan. Harga yang fluktuatif dan terlalu rendah pada periode panen raya telah merugikan petani dan mengurangi minat bertani pada petani muda.
- Distribusi stok pangan antar daerah surplus dan defisit menjadi salah satu upaya utama untuk menstabilkan harga dengan pertimbangan disparitas harga antar daerah dan antar waktu di Indonesia. Penetapan harga acuan dan kehadiran badan usaha (e.g. Bulog) penting dalam perannya sebagai stand-by buyer dan menyalurkan produk antar daerah.
- Pupuk dan benih menjadi input produksi paling penting bagi petani, disamping teknologi. Kedua hal tersebut secara signifikan mempengaruhi produktivitas lahan pertanian. Penyediaan pupuk masih terhambat masalah jumlah pasokan ke daerah, akses ke pupuk bersubsidi tidak sederhana, kesesuaian jenis pupuk yang dibutuhkan (zonasi pupuk bersubsidi), dan keterlambatan distribusi pupuk ke daerah. Kekurangan penyediaan benih padi yang berkualitas dari penangkaran yang disediakan pemerintah.
- Dari sisi pemerintahan, perbaikan dan penyediaan infrastruktur, ketersediaan data produksi dan konsumsi di daerah, dan tata kelola kebijakan menjadi tugas terpenting. Penyediaan infrastruktur menjadi krusial dalam meningkatkan akses dan keterjangkauan dalam distribusi stok dan kualitas pangan antar daerah. Sementara itu, data berperan dalam memberikan gambaran kondisi terkini (real time) dari sektor pangan dan identifikasi permasalahan. Tata kelola kebijakan melalui Bapanas memiliki peran sentral dalam konsolidasi kebijakan antar lembaga melalui peraturan dan badan usaha milik pemerintah.

KESIMPULAN FGD

- Kepastian dan stabilisasi harga komoditas menjadi penyebab sekaligus akibat dari permasalahan pada sisi produksi dan distribusi pangan. Harga yang fluktuatif dan terlalu rendah pada periode panen raya telah merugikan petani dan mengurangi minat bertani pada petani muda.
- Distribusi stok pangan antar daerah surplus dan defisit menjadi salah satu upaya utama untuk menstabilkan harga dengan pertimbangan disparitas harga antar daerah dan antar waktu di Indonesia. Penetapan harga acuan dan kehadiran badan usaha (e.g. Bulog) penting dalam perannya sebagai stand-by buyer dan menyalurkan produk antar daerah.
- **Pupuk dan benih** menjadi input produksi paling penting bagi petani, disamping teknologi. Kedua hal tersebut secara signifikan mempengaruhi produktivitas lahan pertanian. **Penyediaan pupuk** masih terhambat masalah jumlah pasokan ke daerah, akses ke pupuk bersubsidi tidak sederhana, kesesuaian jenis pupuk yang dibutuhkan (zonasi pupuk bersubsidi), dan keterlambatan distribusi pupuk ke daerah. Kekurangan penyediaan **benih padi** yang berkualitas dari penangkaran yang disediakan pemerintah.
- Dari sisi **pemerintahan**, perbaikan dan penyediaan infrastruktur, ketersediaan data produksi dan konsumsi di daerah, dan tata kelola kebijakan menjadi tugas terpenting. Penyediaan infrastruktur menjadi krusial dalam meningkatkan akses dan keterjangkauan dalam distribusi stok dan kualitas pangan antar daerah. Sementara itu, data berperan dalam memberikan gambaran kondisi terkini (real time) dari sektor pangan dan identifikasi permasalahan. Tata kelola kebijakan melalui Bapanas memiliki peran sentral dalam konsolidasi kebijakan antar lembaga melalui peraturan dan badan usaha milik pemerintah.

DETAIL HASIL ACARA/AKTIVITAS

LIST LIPUTAN MEDIA

NO.	TANGGAL	MEDIA	JUDUL ARTIKEL	PR VALUE
1	9 FEBRUARI 2023	MENIT INDONESIA	SULSEL SURPLUS BERAS TERBESAR NASIONAL, PUPUK DAN BIBIT JADI MASALAH SERIUS	SOURCE RANK: REGIONAL ORDER RANK: REGIONAL 1 PAGE RANK: PR 0 RP. 4.500.000
2	9 FEBRUARI 2023	LINTAS PARLEMEN	FGD NAGARA INSTITUTE DENGAN UNHAS : SULSEL SURPLUS TERBESAR NASIONAL, PUPUK DAN BIBIT JADI MASALAH SERIUS	SOURCE RANK: REGIONAL ORDER RANK: REGIONAL 1 PAGE RANK: PR 2 RP.6.000.000
3	9 FEBRUARI 2023	PALU EKSPRES	SULSEL SURPLUS BERAS TERBESAR NASIONAL, PUPUK DAN BIBIT JADI MASALAH SERIUS	SOURCE RANK: REGIONAL ORDER RANK: REGIONAL 1 PAGE RANK: PR 1 RP. 4.500.000
4	9 FEBRUARI 2023	HARIAN NEWS	SULSEL SURPLUS BERAS TERBESAR NASIONAL, PUPUK DAN BIBIT JADI MASALAH SERIUS	SOURCE RANK: LOKAL ± ORDER RANK: LOKAL ± 1 PAGE RANK: PR 0 RP. 3.375.000
5	9 FEBRUARI 2023	MATAKITA	GANDENG NAGARA INSTITUTE, UNHAS GELAR FGD BAHAS PROBLEMATIKA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PANGAN NASIONAL	
6	9 FEBRUARI 2023	HERALD SULSEL	DARI FGD NAGARA INSTITUTE DI UNHAS; PENDAPATAN RP65 RIBU PER HARI MEMBUAT ANAK MUDA MALAS JADI PETANI	

CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

Dari FGD Nagara Institute di Unhas; Pendapatan Rp65 Ribu Per Hari Membuat Anak Muda Malas Jadi Petani

9 Februari 2023, 23:30 - Aneka

Komentar

BAGIKAN    



Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal (kedua kanan) pada FGD di kampus Unhas, Kamis 9 Februari 2023. (Foto: Dok Nagara Institute)

HERALDSULSEL.ID, MAKASSAR — Sulawesi Selatan menjadi penyumbang beras nasional terbesar alias surplus tertinggi nasional. Sementara DKI dan Jawa Barat terendah secara nasional.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Nagara Institute, lembaga kajian politik dan pemerintahan berbasis di Jakarta dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Sulsel Surplus Terbesar Nasional, Pupuk dan Bibit jadi Masalah Serius

Editor : REDAKSI — Kamis, 09 Februari 2023 22:46



MAKASSAR, HARIAN.NEWS – Sulawesi Selatan menjadi penyumbang beras nasional terbesar alias surplus tertinggi nasional. Sementara DKI dan Jawa Barat terendah secara nasional.

ANALISIS ARTIKEL-ARTIKEL LIPUTAN

- Artikel-artikel liputan dari kegiatan secara umum memberikan sorotan yang positif terhadap penyelenggaraan FGD Problematika Produksi dan Distribusi Pangan Nasional oleh Nagara Institute.
- Dari artikel liputan yang sudah ada, mayoritas memberikan perhatian utama terhadap kelembagaan kebijakan pangan dan Bapanas, angka produksi dan surplus beras, kesejahteraan petani, petani generasi muda, permasalahan pupuk dan benih, hingga pilar kebijakan pangan.
- Isu distribusi pangan masih belum banyak dijadikan topik utama bahasan dari media dibandingkan disparitas produksi beras di provinsi-provinsi di Indonesia. Isu distribusi masih difokuskan kepada pembangunan fasilitas infrastruktur.
- Isu pupuk dan benih sudah digambarkan secara jelas, terutama terkait produk pupuk dan benih unggulan serta hambatan akses terhadap produk tersebut (contohnya harga yang masih tinggi).

DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



EVALUASI DAN REKOMENDASI

- Kegiatan FGD di Makassar berlangsung dengan lancar dan telah dihadiri perwakilan dari stakeholder yang aktif dalam perencanaan kebijakan pangan. Sebagian besar perwakilan yang hadir juga secara aktif ikut serta dalam kegiatan diskusi, baik dari pemerintah daerah, DPRD, dinas terkait, akademisi, hingga perwakilan kelompok tani.
- Secara keseluruhan, diskusi selama FGD telah sesuai dengan topik membahas problematika dari sisi produksi dan distribusi pangan. Poin diskusi utama dalam identifikasi masalah dan langkah pemerintah, khususnya pemerintah daerah dibahas dari diskusi (sisi anggaran & inisiatif ketersediaan benih benih). Informasi baru banyak didapatkan terutama terkait dengan kesejahteraan petani & petani muda di Sulawesi Selatan. Isu terkait ketersediaan benih juga banyak diungkapkan, terutama dari penyediaan benih dan distribusi oleh pemerintah.
- Dari perwakilan pemerintah (Bapanas) telah didapatkan beragam informasi, khususnya terkait kondisi ketahanan pangan, inisiatif dan fasilitas data dari Bapanas, hingga kebijakan distribusi pangan antar wilayah. Sementara dari petani juga telah disebutkan permasalahan terkait distribusi seperti akses mobilisasi stok dan harga saat panen.
- Diskusi terkait pupuk masih membangun dari diskusi sebelumnya, yaitu kritik mengenai jumlah, ketersediaan, distribusi, dan jenis pupuk. Impor pupuk dan keberlanjutan industri pupuk nasional belum banyak dibahas kecuali mengenai bahan baku produksi gas alam dan pupuk iskandar muda serta impor fosfat.
-

FOCUS GROUP DISCUSSION

**KEWAJARAN HARGA
PRODUK DI TINGKAT
PRODUSEN DAN
KONSUMEN YANG
MENJAMIN
KEBERLANJUTAN PANGAN**

Laporan Kegiatan FGD

Selasa 28 Februari 2023

Palembang

Disusun Oleh:

Tim Peneliti Nagara Institute

RINGKASAN

- Petani sebagai kelompok paling terdampak menyebutkan bahwa penetapan harga batas atas gabah secara signifikan menurunkan harga gabah yang diterima petani. Ketentuan harga berupa harga pembelian pemerintah (HPP) berpotensi membantu petani di saat panen raya, namun bukan harga batas atas. Harga produksi juga semakin meningkat karena banyak komponen biaya yang tidak bisa dikendalikan. Salah satunya dari komponen harga herbisida yang naik hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
- Dari Bapanas, penetapan harga harga batas atas gabah dan impor yang baru-baru ini menuai kritik diberikan justifikasi. Kesimbangan harga sepanjang rantai pasok harus dijaga. Harga gabah yang terlalu tinggi mengakibatkan banyak penggilingan padi yang tidak mampu membeli dari petani dan harga beras menjadi tinggi. Kepastian HPP, baik untuk gabah maupun beras diharapkan dapat menjaga harga petani di saat panen. Cost structure dalam menentukan HPP perlu didiskusikan dengan berbagai pihak. Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan penurunan harga gabah diikuti penurunan harga beras. Cadangan pemerintah, baik di bawah Bulog ataupun pemerintah daerah krusial untuk intervensi di pasar dan jumlahnya masih terlalu rendah.
- Untuk merespon impor, Bulog diminta untuk menyerap beras secara maksimal, terutama di wilayah surplus seperti Sumatera Selatan. Pupuk subsidi akan dikurangi dan dilakukan reorientasi kebijakan. Salah contohnya melalui Program Makmur dari BUMN (termasuk Pusri) untuk mendukung hadirnya ekosistem ekonomi pertanian yang produktif.
- Dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mendukung petani. Prioritas harus pada menekan harga produksi dan meningkatkan harga jual. Skema subsidi dapat ditingkatkan untuk mendukung harga secara langsung dibandingkan komponen-komponen produksi. Penambahan penyuluh pertanian dalam membimbing petani disebut menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi Sumatera Selatan. Penyuluh tidak hanya berperan dalam membantu mengelola pertanian dari sisi teknis (pupuk & lahan), tetapi juga membantu manajemen usaha tani dan pemanfaatan pinjaman perbankan di lapangan. Peran dari sektor perbankan juga disorot, khususnya penyaluran KUR dan kartu tani.

LATAR BELAKANG ACARA

TUJUAN

Mengumpulkan aspirasi dan masukan dari stakeholder tiap daerah untuk mendapatkan gambaran informasi secara riil terkait kondisi pangan di daerah-daerah sebagai bahan memperkuat referensi riset akhir Nagara Institute.

DESKRIPSI PROGRAM

FGD Palembang berfokus membahas harga produk pangan dan keberlanjutan pangan. Fokus utama kegiatan di antaranya mengenai perencanaan & kebijakan pangan terkait harga produk pangan, baik dari pihak produsen dan konsumen. Dibahas di dalamnya termasuk bagaimana mekanisme penentuan harga dan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga. Selain itu, beragam faktor dari sisi permintaan dan penyediaan yang berpengaruh terhadap harga dan dampaknya terhadap pelaku pasar.

TOPIK ACARA

“Kewajaran Harga Produk di Tingkat Produsen dan Konsumen yang Menjamin Keberlanjutan Pangan”

PEMBICARA

Pak Arief Prasetyo (Kepala Badan Pangan Nasional)
I Gusti Ketut Astawa (Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas)
Khudori (Pengamat Pangan)
Herman Deru (Gubernur Sumsel)

TARGET

Kehadiran stakeholder yang diundang dalam diskusi.

DETAIL HASIL ACARA/ AKTIVITAS

LAPORAN KEHADIRAN (FGD)

- 27 orang / instansi menerima undangan untuk hadir pada acara FGD Nagara Institute dengan Menakar Kewajaran Harga Pangan Demi Keberlanjutan Pangan
- 27 Instansi hadir pada acara FGD

LAPORAN KEHADIRAN MEDIA

Kehadiran Media:

- Herald id
- Tribunbisnis
- PaluEkspres
- Gesah Kita.com
- Warta In
- Target Jurnalis
- Lamanqu
- Indonesian Journalist
- Intel86tv
- Radar News
- Gandus TV
- Redaksi In
- TribrataSumsel news
- Kumparana
- Warta Demokrasi
- BeritaSuara Rakyat
- Intens News
- Kompas 86
- Rap Ekspres
- Detikini
- Antara News
- Republik Merdeka

LAPORAN LIPUTAN (AMPLIFIKASI MEDIA KESELURUHAN):

- Pada tanggal 29 Februari 2023 , telah ada 22 artikel media online
- Nilai PR Value: [Rp.88.500.000,00]

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (1/10)

HARGA (1/3)

Harga Pangan, khususnya gabah/beras adalah tema utama dari FGD Palembang yang membahas kewajaran harga bagi produsen dan konsumen. Salah satu sumber fluktuasi harga gabah/beras adalah pola produksi antar waktu yang tidak merata. Dalam produksi beras, terdapat periode surplus dan defisit yang harus diperhitungkan untuk memastikan ketersediaan, kebutuhan, dan harga beras. Kebutuhan tidak hanya terbatas untuk konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan cadangan dari pemerintah dan cadangan rumah tangga. Prognosa pangan menjadi krusial dalam mengantisipasi kebutuhan dan persediaan. Survei KSA BPS memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengestimasi produksi beras dengan perkembangan terbaru. Kebutuhan untuk cadangan rumah tangga dan pemerintah perlu lebih baik diestimasi untuk mencegah kekurangan beras.

Harga yang lebih rendah pada tingkat internasional belum tentu merefleksikan efisiensi dari produksi, tetapi merupakan residu dari konsumsi domestik negara pengekspor. Harga pangan di Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar. Keterbatasan instrumen dan dominasi pasar secara tidak langsung mengakibatkan konsentrasi impor pada sejumlah komoditas pangan, termasuk di dalamnya kedelai, terigu, kedelai, daging sapi, dan gula. Harga pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat dan diversifikasi sumber pangan juga masih termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagian besar masyarakat tidak mampu memenuhi kriteria pangan sehat, terutama di Indonesia Timur. Diversifikasi produk pangan menjadi tujuan kebijakan untuk memastikan masyarakat memiliki pilihan konsumsi pangan yang terjangkau dan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan sehat.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (2/10)

HARGA (2/3)

Kebijakan penetapan harga batas atas gabah baru disahkan oleh Bapanas melalui surat edaran sebagai panduan untuk pelaku pasar dan mengikat bagi Bulog. Harga gabah sejak akhir tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Harga gabahsaat ini disebut membatasi akses bagi penggilingan padi yang berjumlah hingga 160.000 penggilingan untuk beroperasi. Penggilingan padi kecil tidak mampu untuk membeli gabah pada tingkat tersebut selain penggiling-penggiling besar yang sudah dominan. Jika harga masihtinggi, maka struktur pasar tingkat penggiling akan menguntungkan pemain besar dan berpotensi oligopoli. HPP digunakan sebagai panduan menyerap beras untuk cadangan beras pemerintah dan ditujukan untuk berfungsi sebagai floor price harga beras. Kehadiran HPP memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga, terutama beras.

Saat harga gabah sedang relatif tinggi, penetapan harga batas atas saat ini merugikan karena harga yang diterima petani turundibandingkan sebelum ada kebijakan. Sebagai contoh, di Sumsel harga gabah di Sumsel yang awalnya mencapai Rp 5.600 jatuh hingga Rp 5.000. Hal yang sama juga terjadi di provinsi lain seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengingat saat ini sudah mulai memasuki masa panen. Perubahan harga pada tingkat petani (harga gabah) diharapkan diikuti penurunan harga beras. Jika harga beras tetaptinggi, makan margin pada tingkat pedagang atau penggiling meningkat.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (3/10)

HARGA (3/3)

HPP, bukan harga batas atas, sebagai panduan pembelian beras pemerintah dan *floor price* harus segera ditetapkan untuk menjaga harga gabah, terutama bagi petani. Penetapan HPP tidak efektif dalam penerapannya karena harus mempertimbangkan biaya-biaya yang muncul (e.g. biaya transportasi) yang akan ditanggung petani. Infrastruktur juga mempengaruhi juga efektivitas harga yang ditetapkan karena produktivitas relatif lebih rendah, terutama di wilayah ekstensifikasi lahan dengan irigasi yang terbatas. HPP belum ditetapkan karena harga produk pangan saat ini sedang tidakstabil dibandingkan pola historisnya. HPP perlu didiskusikan kembali dengan perwakilan dari stakeholder pangan (BPS, KTNA, Food Station, BRIN, PSEKP, & HKTI).

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (4/10)

PERBANKAN

Perbankan berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan bagi usaha tani. Di Sumatera Selatan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dilaksanakan oleh Bank BRI dan Bank Sumsel Babel. Penyaluran KUR untuk sektor pertanian di 2022 dari kedua bank tersebut secara signifikan dilakukan kepada usaha sektor pertanian. Persentasenya mencapai 51,04% pada Bank Sumsel Babel dan 51,58% pada Bank BRI. Bank BRI melalui kartu tani juga memberikan akses pelayanan untuk penyediaan pupuk subsidi dari pemerintah. Nilai transaksi subsidi pupuk yang disalurkan di dalamnya termasuk subsidi pupuk NPK, pupuk NPK formula, dan pupuk urea di Sumsel yang mencapai Rp 7,74 triliun.

Mekanisme penyaluran KUR untuk usaha tani terus ditingkatkan, khususnya untuk menjaga keberlanjutan usaha dan menghindari NPL dari penyediaan kredit bagi petani karena potensi merugikan. Persentase NPL KUR pada Bank Sumsel Babel sendiri hanya mencapai kurang dari 1% yang meliputi penyaluran untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Khusus untuk Sumatera Selatan, penyaluran KUR terdapat KUR kelompok yang di dalamnya petani-petani membentuk kelompok hingga kluster. Dalam kluster sendiri di dalamnya terdapat supplier hingga off-taker produk pertanian. Off-taker berperan penting untuk memastikan penjualan hasil panen dengan harga yang stabil dan pendapatan petani lebih stabil. Pembentukan ekosistem yang membantu petani ikut menjamin keberlanjutan pinjaman perbankan (KUR) di Sumatera Selatan.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (5/10)

KUALITAS PRODUK PERTANIAN & FOOD LOSS

Sektor pangan di Indonesia termasuk yang terbesar dalam hal jumlah maupun persentase food loss & waste dari total konsumsi pangan. Masalah ini terjadi di sepanjang rantai pasok dari produsen hingga konsumen. Nilai dari pangan yang terbuang mencapai Rp 213-551 triliun per tahunnya.

Tidak seluruh hasil panen petani bisa dijual. Secara nasional, losses dari pasca-panen mencapai hingga 20%. Penyebab dari banyaknya food loss dapat ditarik ke permasalahan terkait teknologi dan transportasi. Masalah yang ada dapat terjadi dari pada power thrasher, alat jemur, hingga angkutan dari produk pertanian. Pemanfaatan teknologi dan ketersediaan infrastruktur penyimpanan (e.g. silo untuk hasil tanaman padi, sistem resi gudang) juga dapat membantu petani.

Beberapa inisiatif kebijakan untuk mengurangi food loss & waste sudah mulai dilakukan pada tingkat konsumen, salah satunya di Jakarta. 60-125 juta orang bisa mendapatkan manfaat dari makanan yang terbuang. Di dalam kelompok yang bisa mendapatkan manfaat termasuk panti asuhan, anak-anak, lansia, hingga masyarakat umum yang membutuhkan bantuan pangan. Penyedia (donatur) dan masyarakat yang membutuhkan perlu dihubungkan untuk menyalurkan makanan yang didonasikan. Donatur di dalamnya termasuk hotel, restoran, & retail yang masih layak dan dapat didistribusikan ke yang membutuhkan. Salah satu yang menerapkan adalah di Sarinah Mall.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (6/10)

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah aspek penting lain dalam keberlanjutan pertanian, khususnya di Sumatera Selatan. Pemprov Sumatera Selatan dalam kebijakannya menambah jumlah penyuluh tani hingga 2.000 penyuluh tani dengan 1.400 penyuluh khusus untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perkebunan dan perikanan. Penyuluh tani yang dipekerjakan oleh pemerintah provinsi merupakan bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah untuk secara langsung membantu petani di lapangan dalam aktivitas pertanian. Penyuluh tani yang dipekerjakan juga menggantikan sejumlah besar penyuluh tani yang sebelumnya jumlahnya terlalu sedikit dan banyak yang sudah pensiun dan belum digantikan. Penyuluh tani juga dapat membantu dalam memastikan kelancaran pinjaman perbankan dari sisi petani.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (7/10)

INPUT (PUPUK) & BIAYA PRODUKSI (1/2)

Komponen biaya produksi memiliki peran yang menentukan keberlangsungan usah tani. Biaya untuk pembelian pupuk misalnya, memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembelian pupuk dari petani dan dampaknya terhadap penggunaan pupuk. Pengurangan penggunaan pupuk di bawah tingkat yang direkomendasikan berisiko mengakibatkan penurunan hasil produksi per ha dan berpotensi merugikan. Harga pupuk dan input produksi lainnya seperti komponen biaya sewa lahan & herbisida dapat mempengaruhi pendapatan petani dan komponen-komponen biaya tersebut banyak yang belum bisa dikendalikan. Harga herbisida sejak tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat akibat bahan baku yang mahal. Sementara itu, alokasi subsidi pupuk juga sangat terbatas.

Bagi petani di Sumsel, produsen pupuk di Sumatera Selatan diestimasikan memiliki cadangan bahan baku gas alam yang cukup hingga 2045 dibandingkan dengan produsen lain di Pupuk Kujang atau Pupuk Iskandar Muda yang terhambat. Kekurangan bahan baku produksi pupuk terjadi pada pupuk NPK karena kalium dan fosfat terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Sebagai akibatnya, harga pupuk NPK meningkat drastis karena harga bahan baku meningkat. Kandungan fosfat dan kalium pada 2022 dikurangi dari menjadi masing-masing 10% dan 12% dari sebelumnya keduanya mencapai 15% untuk mengurangi biaya produksi. Dalam penggunaan di lahan pertanian kebutuhannya disesuaikan dengan formulasi berdasarkan soil test tanah. Produktivitas produk pertanian singkong dari pupuk NPK Singkong Pusri di Sumsel dan Lampung secara signifikan meningkat hingga 70 ton dari sebelumnya 40an ton. Manfaat dari penggunaan pupuk yang tepat juga dapat dilihat dari tanaman sawit yang dalam kandungan pupuk dari komponen K (kalium) hingga 27%.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (8/10)

INPUT (PUPUK) & BIAYA PRODUKSI (2/2)

Subsidi pupuk saat ini dirancang dalam bentuk restitusi dengan membayarkan ke petani yang berhak menerima setelah membeli pupuk. Dalam upaya mengurangi pada pupuk subsidi, pemerintah mulai mendorong program-program yang menghadirkan ekosistem produksi pertanian (agrosolusi/solusi pertanian). Salah satunya adalah Program Makmur. Program Makmur melibatkan stakeholder darihulu ke hilir, mulai dari SHS & Pupuk Indonesia Group sebagai produsen benih dan pupuk dan Bulog bersama ID Food (RNI) sebagai offtaker produk pertanian. Ekosistem yang dibangun diharapkan membantu petani untuk memproduksi sesuai dengan rekomendasi dan formulasi rencana produksi yang efektif efisien. Ketergantungan terhadap pupuk subsidi melalui formulasi penggunaan pupuk yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga sesuai rekomendasi. Peningkatan dari sisi produktivitas diharapkan sebagai kompensasi terhadap peningkatan biaya produksi.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (9/10)

PERAN PEMERINTAH DAN BULOG (1/2)

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memiliki cadangan pangan dalam UU No. 18 Tahun 2012. Bulog melaksanakan fungsi pemerintah untuk memenuhi cadangan pangan. Berdasarkan survei beras nasional, stok akhir tahun 2022 hanya mencapai sekitar 4 juta ton dengan sekitar 335 ribu ton (8%) berada di Bulog. Harga yang tinggi mempersulit Bulog untuk menyerap gabah/beras karena harganya yang tinggi pada periode tersebut. Angka ini sangat Rendah mengingat kewajiban Bulog untuk menjaga persediaan. Dengan kebutuhan beras per bulan hingga 2 juta ton, persediaan Bulog jumlahnya terlalu rendah sehingga tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Fluktuasi akibat penurunan stok di pasar juga berpotensi meningkatkan harga. Bulog sendiri berada di posisi yang tidak ideal karena diminta untuk menanggung cadangan pangan pemerintah meskipun memiliki mandat komersial untuk melakukan kegiatan usaha dan membukukan keuntungan.

Cadangan pangan pemerintah, dalam hal ini beras, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Umumnya cadangan digunakan untuk operasi pasar stabilisasi harga atau untuk kondisi darurat seperti bencana alam. Namun, cadangan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial ataupun mitigasi kekurangan pangan di daerah-daerah tertentu. Terlebih lagi beberapa pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sumsel telah memanfaatkan cadangan salah satunya untuk dibagikan ke pegawai lingkungan Pemprov Sumsel. Sementara itu, kemampuan Bulog untuk menyerap gabahselama ini untuk Sumatera Selatan hanya mencapai sekitar 20% dari produksi di Sumatera Selatan.

ANALISIS FGD BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (10/10)

PERAN PEMERINTAH DAN BULOG (2/2)

Bulog dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap beras dari petani dapat bermitra dengan pihak swasta. Bulog diberikan wewenang untuk membeli beras kualitas premium untuk dijadikan persediaan komersial bila tidak mampu menyerah dengan harga beras pemerintah. Persediaan komersial pada akhirnya jika dibutuhkan dapat dikonversikan menjadi cadangan. Swasta dapat mengisi celah tersebut dengan menjual berdasarkan kontrak untuk memasok beras ke Bulog berdasarkan presentase tertentu dari persediaan yang dimiliki masing-masing. Bulog sendiri memiliki cadangan dari pinjaman komersial hingga Rp 20 triliun untuk menyerap beras sehingga dianggap memiliki kapasitas yang cukup. Dalam 3 bulan awal 2023, Bulog diminta untuk menyerap hingga 70% dari produksi beras.

KESIMPULAN FGD

1. Harga produk pertanian seperti gabah/beras dipengaruhi oleh kebutuhan serta pola produksi antar waktu antar wilayah. Prognosa kebutuhan konsumsi dan cadangan, pemerintah dan rumah tangga penting untukantisipasi gejolak harga di pasar.
2. Penetapan harga batas atas gabah dalam jangka pendek menyebabkan pendapatan petani produsen gabah menurun signifikan. Harga HPP gabah sebagai floor price bagi petani harus disusun secara adil bagi pelaku pasar, khususnya petani yang berpotensi dirugikan kalau harga terlalu rendah. Harga batas atas beras dan HPP gabah dapat berfungsi untuk menghindari fluktuasi harga beras yang terlalu tinggi. Pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa penurunan harga gabah diikuti penurunan harga beras.
3. Dari sisi produksi, permasalahan harga disebabkan dari harga jual yang terlalu rendah dan biaya produksi yang meningkat. Input produksi seperti pupuk & herbisida dari sisi harga tidak dapat dikendalikan, baik dari sisi biaya serta bahan baku. Program pemerintah melalui BUMN (e.g. Program Makmur) diharapkan dapat mendorong produktivitas dan keberlanjutan usaha tani dengan dukungan hulu hingga hilir. Food loss dari hasil produksi pertanian perlu diberikan perhatian dan perlu pemanfaatan teknologi pasca-panen karena dampaknya besar terhadap jumlah produksi dan produktivitas.
4. Peran pemerintah melalui Bulog diperkuat dengan meningkatkan kapasitas menyerap beras untuk cadangan pemerintah, terutama di daerah surplus. Bulog memiliki cadangan finansial untuk menyerap beras dari petani. Selain itu, Bulog dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta tidak hanya untuk cadangan, tetapi juga untuk beras komersial yang dapat dikonversi. Pemerintah daerah juga harus berperan dapat melalui cadangan berdasarkan kewajiban undang-undang.
5. Perbankan berperan penting dalam keberlangsungan usaha tani. Jumlah KUR didominasi oleh kebutuhan pertanian. Perhatian terhadap keberlanjutan usaha dan usaha meminimalisir NPL (*non-performing loan*) krusial bagi petani. Pemerintah dapat berperan melalui penyuluh tani yang memberikan bimbingan bagi petani.

DETAIL HASIL ACARA/AKTIVITAS (1/3)

LIST LIPUTAN MEDIA

No.	Tanggal	Media	Judul Artikel	PR Value
1	1 Maret 2023	Herald id	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok, Anehnya Beras di Pasaran Melonjak	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 0 Rp. 4.500.000
2	1 Maret 2023	Tribunbisnis	HPP Belum Ditetapkan, Harga Gabah Sudah Anjlok, Pemerintah Diminta Rumuskan Kebijakan Komprehensif	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 2 Rp.6.000.000
3	1 Maret 2023	Palu Ekspres	Harga Gabah di Petani Anjlok, Namun Harga Beras Tetap Tinggi di Tingkat Konsumen. Ada Apa?	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000
4	1 Maret 2023	Gesah Kita.com	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
5	2 Maret 2023	Warta In	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000

No.	Tanggal	Media	Judul Artikel	PR Value
6	2 Maret 2023	Target Jurnalis	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
7	28 Februari 2023	Lamanqu	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
8	2 maret 2023	Indonesian Journalist	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 2 Rp.6.000.000
9	2 Maret 2023	Intel86tv	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000
10	2 Maret 2023	Radar News	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000

DETAIL HASIL ACARA/AKTIVITAS (2/3)

LIST LIPUTAN MEDIA

No.	Tanggal	Media	Judul Artikel	PR Value
11	2 Maret 2023	Gandus TV	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
12	2 Maret 2023	Redaksi In	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
13	2 Maret 2023	Tribrata Sumsel news	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 2 Rp.6.000.000
14	2 Maret 2023	Kumparana	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000
15	2 Maret 2023	Warta Demokrasi	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000

No.	Tanggal	Media	Judul Artikel	PR Value
16	2 Maret 2023	Berita Suara Rakyat	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
17	2 Maret 2023	Intens News	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000
18	2 Maret 2023	Kompas 86	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 2 Rp.6.000.000
19	2 Maret 2023	Rap Ekspres	Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000
20	2 Maret 2023	Detikini	Kewajaran Harga Pangan di Petani dan Konsumen yang Menjamin Keberlanjutan Pangan	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 1 Rp. 4.500.000

DETAIL HASIL ACARA/AKTIVITAS (3/3)

LIST LIPUTAN MEDIA

No.	Tanggal	Media	Judul Artikel	PR Value
21	2 Maret 2023	Antara News	Nagara Institute minta pemerintah mencegah harga gabah anjlok	Source Rank: Regional Order Rank: Regional 1 Page Rank: PR 2 Rp.6.000.000
22	2 Maret 2023	Republik Merdeka	HPP Belum Ditetapkan, Harga Gabah Petani Sudah Anjlok	Source Rank: Lokal + Order Rank: Lokal + 1 Page Rank: PR 0 Rp. 3.375.000

CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

Tribunbisnis Senin, 13 Maret 2023 Cari Network Ikuti Kami Login

[Home](#) [Makro](#) [Energi](#) [Finansial](#) [Mikro](#) [Investasi](#) [Transportasi](#) [Infrastruktur](#) [Insight](#) [Properti](#)

[Home](#) [Bisnis](#) [News](#)

HPP Belum Ditetapkan, Harga Gabah Sudah Anjlok, Pemerintah Diminta Rumuskan Kebijakan Komprehensif

Rabu, 1 Maret 2023 16:51 WIB
Editor: **Sanusi**



[lihat foto](#)

[f](#)
[t](#)
[w](#)
[in](#)
[Aa](#)

berita POPULER

- Perilaku Tak Lazim Rafael Sebelum Brangkas Uangnya Berisi Rp 37...**
12 jam lalu
- Silicon Valley Bank Kolaps, Semua Operasi Resmi Ditutup**
1 hari lalu
- Periksa 69 Pegawai Punya Harta Tak Wajar, Sri Mulyani: Bersihkan...**
7 jam lalu
- Menkeu Sri Mulyani Sebut Ada Perbedaan Data dari PPATK Terkai...**
10 jam lalu
- PPATK Temukan Rp37 Miliar di Save Deposit Box Rafael Alun, Mahfu...**
1 hari lalu

Tribun Jual Beli [Kampanye TJP](#)

Temukan Produk Dengan Harga Terbaik

KOMPAS 86.id

[Home](#) [Tentang Kami Kompas86.id](#) [Kontak Kami](#) [Artikel](#) [Ekonomi](#) [Hukum](#) [Kesehatan](#) [Olah raga](#) [Politik](#) [Redaksi](#)

Artikel

Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok

2 minggu ago [kompas86](#)



Palembang, KOMPAS86.id-

Hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah anjlok.

Sementara itu, harga beras di pasaran tetap tinggi dan belum ada tren penurunan. Pemerintah diminta segera merumuskan kebijakan komprehensif di bidang pangan agar tercipta keadilan pada ketersediaan dan harga pangan.

Anomali harga ini menjadi salah pokok perdebatan panas pada Focus Group Discussion (FGD) tentang pangan yang diselenggarakan Nagara Institute di Palembang, Selasa Selasa (28/2/2023).

CONTOH KLIPING LIPUTAN MEDIA

WI
BERANI JUJUR

HUKUM POLITIK PEMERINTAHAN TNI POLRI WARTA ARTIKEL UKM/UMKM

BERITA TERBARU [Diiduga Limbah Unilever Belum Tersensuritus Hasilkan Generasi emas bermartabat](#)

Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok

Array | 12 Maret 2023 | updated: 12 Maret 2023

By Susanto Ploja

Bagikan WhatsApp Telegram Facebook Twitter

LATEST NEWS

- SMK KAL-1 Raih Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) SMA/SMK Surabaya**
Ahmad Darmal | 12 Maret 2023
- Rakerda Kwarda Sumut, Gerakan Pramuka Harus Hasilkan Generasi emas bermartabat**
12 Maret 2023
- Diduga Limbah Unilever Belum Tersensur**
12 Maret 2023
- BABINSA, JAJARAN KODIM 0403/OKU BANTU WARGA BERSIHKAN SISA MATERIAL LONGSOR**
12 Maret 2023

Warta In | Palembang – Hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah anjlok.

Sementara itu, harga beras di pasaran tetap tinggi dan belum ada tren penurunan. Pemerintah diminta segera merumuskan kebijakan komprehensif di bidang pangan agar tercipta kewajaran pada ketersediaan dan harga pangan.



HOME POLITIK HUKUM OLARHAGA KESEHATAN TNI, POLRI DAN PEMERINTAH

Home > Uncategorized > Pemerintah Belum Tetapkan HPP, Harga Gabah Sudah Anjlok



PEMERINTAH BELUM TETAPKAN HPP, HARGA GABAH SUDAH ANJLOK

KIRAB MERAH PUTIH
Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni

Pembentangan Bendera Merah Putih Sepanjang 1.700 M oleh 50.000 Masyarakat

Tausiah Kebangsaan

ANALISIS ARTIKEL-ARTIKEL LIPUTAN

- Kegiatan FGD Palembang dilaporkan dalam kerangka laporan media-media yang ditandai secara positif terutama dalam isu-isu yang dibahas. Poin diskusi yang dibawa dalam FGD menyampaikan kekhawatiran mengenai isu yang banyak dibahas pada saat itu terkait dengan surat edaran Bapanas mengenai harga batas atas gabah.
- Fluktuasi harga menjadi salah satu fokus utama bahasan FGD yang banyak disorot oleh media. Hal tersebut terkait terutama dengan kehadiran Badan Pangan Nasional dan kebijakan harga batas atas gabah yang baru diterapkan dan disebut secara signifikan menurunkan harga beras di tingkat petani. Fluktuasi dan harga beras yang tinggi pada tingkat konsumen menjadi perhatian utama terkait dengan topik tersebut dan juga harapan untuk penurunan harga beras mengiringi penurunan harga gabah yang sudah terjadi.
- Sementara itu, peran pemerintah, khususnya melalui Bapanas menjadi salah satu poin utama diskusi yang disebutkan dalam rilis media. Peran tersebut meliputi penerapan harga ecerat tertinggi (HET), harga pokok pembelian (HPP), dan juga penyerapan beras oleh BULOG. Kebijakan lain dari pemerintah juga diberikan perhatian, terutama dari sisi insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas.

ANALISIS ARTIKEL-ARTIKEL LIPUTAN

- Permasalahan dari sisi faktor produksi (pupuk) dan penyaluran kredit perbankan menjadi bagian dari pokok bahasan. Perspektif yang diambil sebagian besar dilihat dari angka kredit perbankan dan kredit macet yang disalurkan oleh Bank Sumsel-Babel.
- Sementara itu, tata kelola kebijakan pangan dari sisi rantai pasok belum mendapatkan perhatian dari media, terutama dari analisis terhadap kritis penyelenggaraan acara.

DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. FGD Palembang dengan topik utama “Kewajaran Harga Produk di Tingkat Produsen dan Konsumen dalam Menjamin Keberlanjutan Pangan” dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan berarti pada hari kegiatan. Kehadiran dan partisipasi aktif dari stakeholder juga memenuhi harapan dengan kehadiran berbagai pihak yang krusial dalam kebijakan terkait harga pangan, mulai dari Gubernur, Pemda, hingga petani dan pedagang beras.
2. Diskusi berjalan baik membahas dampak dari diterapkannya Harga Batas Atas Gabah sebagai pembahasan utama topik utama FGD. Peran pemerintah, baik pusat dan daerah menjadi bahasan utama terkait harga beras. Struktur biaya, pembentukan harga, dan dampak dari fluktuasi harga dari sisi petani dapat ditelaah lebih jauh berdasarkan hasil diskusi antara Bapanas, Pemda, dan pelaku pasar.
3. Dalam diskusi terkait faktor produksi, pupuk menjadi topik bahasan utama. Subsidi pupuk yang belum cukup dari sisi alokasi dan harga menjadi poin utama. Selain itu, diskusi diperluas dengan membahas mengenai program membangun ekosistem tani untuk meningkatkan hasil pertanian dan pemanfaatan pupuk non-subsidi dalam aktivitas pertaniannya (Program Makmur). Peningkatan produktivitas dan kepastian harga menjadi pilihan kebijakan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dari pemerintah.
4. Sementara itu, informasi terbaru dibahas dari aspek perbankan dan bagaimana dukungan kepada petani dari sektor ini. Pengaruh dan pengelolaan pinjaman kepada petani, peran kerja sama dan kelompok petani serta penyuluh tani menjadi bahasan utama terkait keberlanjutan sektor perbankan dalam meminimalisir risiko keuangan. Perhitungan dan manfaat kebijakan KUR menjadi perspektif yang dapat ditelusuri lebih jauh.
5. Berdasarkan poin diskusi awal yang disusun dalam TOR masih terdapat beberapa isu yang perlu diperdalam kembali dalam riset kedepannya. Salah satunya adalah partisipasi dan penjelasan dari rantai pasok yang masih minimal (penggiling hingga pedagang beras). Padahal pihak-pihak tersebut berperan besar sebagai bagian dari rantai pembentuk harga di tingkat konsumen. Mekanisme transmisi harga gabah ke harga beras perlu analisis lebih lanjut.

ROUNDTABLE DISCUSSIONS

MENGUJI KREDIBILITAS DATA PANGAN PEMERINTAH DAN REALITAS KETAHANAN PANGAN NASIONAL

LAPORAN KEGIATAN
ROUNDTABLE DISCUSSIONS
JAKARTA, 22 DESEMBER 2022

RINGKASAN

- Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan global. Ada beberapa faktor dan kondisi yang menyebabkan dunia terancam krisis pangan. Yaitu, semakin membludaknya populasi dunia sementara lahan pertanian terus berkurang secara masif dan kualitasnya mengalami degradasi. Di samping itu, perubahan iklim yang ekstrem juga menyebabkan produksi pangan menjadi tak pasti, ketegangan politik membuat distribusi pangan terganggu, dan hambatan nontarif menyebabkan suatu daerah kesulitan pangan.
- Dalam soal pangan, Indonesia juga menghadapi masalah serupa. Di saat populasi terus bertambah signifikan, tren penyusutan lahan secara masif terus terjadi, sementara lahan pertanian yang tersisa kualitasnya juga mengalami degradasi. Perubahan iklim yang ekstrem juga mengganggu produksi pangan nasional. Dengan kondisi demikian, Indonesia termasuk rawan terkeada dampak dari ancaman krisis pangan global.
- Pemerintah Indonesia dipandang perlu segera membenahi sistem pangan nasional. Sebab. Sistem pangan nasional saat ini bisa dibilang masih lemah. Misalnya, produksi pangan belum optimal karena keterbatasan lahan dan minim riset dan pengembangan teknologi pangan. Indonesia juga terjebak pada keseragaman jenis pangan. Jalur distribusi pangan terlalu panjang dan dikuasai segelintir pelaku sehingga bercorak monopolistik dan oligopolistik rawan terjadi instabilitas pasokan dan harga pangan.
- Pemerintah perlu membuat rumusan kebijakan pangan nasional yang komprehensif untuk membangun sistem pangan yang mampu menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan berkelanjutan untuk menopang Indonesia menjadi salah satu negara yang kuat dan maju pada 2045.

LATAR BELAKANG ACARA

TUJUAN

Mendalami rencana pemerintah dalam membenahan kebijakan pangan nasional dan menyerap masukan dari stakeholder pangan setelah mengkonfirmasi hasil reli diskusi tentang pangan yang dipaparkan dalam seminar.

DESKRIPSI PROGRAM

Roundtable Discussion berfokus pada tema “Menguji Kredibilitas Data Pangan Pemerintah dan Realitas Ketahanan Pangan Nasional”. Diskusi dimulai dengan pemaparan materi dilanjutkan dengan presentasi dari pembicara dan tanggapan dari peserta. Fokus utama roundtable discussion ini di antaranya mengenai membenahan kebijakan pangan dari pihak pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional berkelanjutan.

TOPIK ACARA

Menguji Kredibilitas Data Pangan Pemerintah dan Realitas Ketahanan Pangan Nasional

PEMBICARA

Bapak H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.t.
Prof. Dr. Agus Pakpahan
Bapak Abdullah Mansuri
Mulyana Hadipernata, S.Tp., M.sc., Ph.D.
Bapak Khudori
Sunanto
Bapak Sudaryatmo (YLKI)

TARGET

Kehadiran stakeholder yang diundang dalam diskusi.

DETAIL KEGIATAN

PESERTA ROUNDTABLE DISCUSSION

1. Bapak H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.t.
2. Prof. Dr. Agus Pakpahan
3. Bapak Abdullah Mansuri
4. Mulyana Hadipernata, S.Tp., M.sc., Ph.D.
5. Bapak Khudori
6. Sunanto
7. Bapak Sudaryatmo (YLKI)

ANALISIS BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (1/4)

Tanggal 22 Desember 2022, Nagara Institute mengadakan round table discussion sebagai tahap awal dari rencana kegiatan penelitian tahun 2023 mengenai ketahanan pangan nasional. Diskusi yang bertema “Menguji Kredibilitas Data Pangan Pemerintah dan Realitas Ketahanan Pangan Nasional” diikuti stakeholder terkait dari pemangku kebijakan seperti perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), akademisi, hingga pengamat beserta perwakilan dari pihak swasta, konsumen, dan asosiasi pertanian.

Diskusi dimulai dengan paparan awal dari tim peneliti yang diwakili oleh Bapak Dr. Revindo (Universitas Indonesia). Tim peneliti menjelaskan temuan-temuan awal dan gambaran umum serta tantangan ketahanan pangan Indonesia ke depannya. Penjelasan meliputi tren produksi, perdagangan sektor pangan serta potensi dan kebijakan-kebijakan pangan di Indonesia.

Terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh berbagai perwakilan pemangku kepentingan dalam kebijakan pangan. Dari sisi pedagang, Abdullah Mansuri berpandangan bahwa kesulitan bagi petani dan pedagang terkait dengan data serta produksi produk pangan. Ketidakpastian data mengenai jumlah dan pemetaan produksi menjadi perhatian utama. Kebijakan impor pangan dikhawatirkan mempengaruhi harga produk pangan dan pendapatan petani, terutama di saat panen. Selain itu, petani juga banyak yang masih mengandalkan utang dalam memenuhi kebutuhannya sebelum menerima hasil panen. Kompetisi harga dengan pedagang besar juga disebut mempengaruhi stabilitas harga dan dapat mempengaruhi keuntungan pedagang ditambah lagi dengan omzet pedagang kecil yang menurun sejak terjadinya pandemi.

ANALISIS BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (2/4)

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh Sunanto Komisaris PT SHS bahwa pemerintah belum berfokus terhadap intervensi pada proses produksi sehingga hanya mengandalkan impor sebagai jalan keluar. Sementara itu, dari sisi konsumen YLKI menekankan prioritas terhadap tingkat harga, ketersediaan, hingga standar produk pangan. Pemerintah diminta untuk memberikan perlindungan terhadap gejolak harga pangan global terhadap konsumen sebagai pihak terdampak langsung selain dari kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural dan mendukung produksi pangan domestik.

Dalam tanggapannya terhadap kritik dan kekhawatiran mengenai kepastian data pangan secara umum dan kebijakan impor beras secara khusus, perwakilan dari Bulog dan Bapanas (Bpk. Arief Prasetyo) memaparkan dasar dari kebijakan tersebut. Secara umum, keduanya sepakat bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) dijadikan rujukan utama persediaan dan proyeksi produksi produk pangan. Data BPS menunjukkan bahwa persediaan beras (meliputi persediaan pemerintah, pedagang, serta konsumen) mencukupi kebutuhan hingga panen raya (Maret 2023). Kedua lembaga juga sepakat dalam targetnya dalam melakukan konsolidasi kembali terhadap data pangan per 31 Desember 2022 untuk proyeksi persediaan dan ketersediaan pangan selama tahun 2023, terutama beras. Bapanas dan Bulog juga berkomitmen untuk menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah yang berpihak kepada petani dengan pertimbangan cost-structure yang dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (3/4)

Kebijakan impor beras pada akhir 2022 disebut tidak akan berdampak terhadap harga keseimbangan beras karena bertujuan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai instrumen stabilisasi harga beras pemerintah yang mencapai tingkat terendah (200 ribu ton). Khudori sebagai pengamat pertanian berpendapat bahwa persediaan Bulog yang menipis terjadi karena intervensi kenaikan harga beras akibat peningkatan permintaan serta upaya penyerapan Bulog meningkatkan harga beli untuk persediaan. Jika dilakukan penyerapan beras petani untuk cadangan Bulog, maka disebut akan kontra produktif karena dapat meningkatkan harga beras.

Lebih jauh lagi, Bapanas menekankan juga terhadap peran lembaga-lembaga atau kementerian lain yang diberi penugasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan domestik mengingat bahwa penugasan Bulog terbatas pada produk padi, jagung, dan beras, selain dari produk pangan pokok lainnya. Kehadiran Bapanas sebagai amanat undang-undang diharapkan menjadi pemangku kebijakan utama dalam koordinasi kebijakan pangan yang otoritasnya tersebar antara berbagai kementerian dan lembaga.

ANALISIS BERDASARKAN TEMA PERMASALAHAN (4/4)

Sementara itu, Prof. Dr. Agus Pakpahan membahas mengenai kurangnya inovasi dan kerja sama dengan petani dalam kebijakan pangan. Prof. Dr. Agus menyoroti perihal divergensi antara harga produk pertanian sebagai hasil produksi dengan dengan harga pada tingkat konsumen (peningkatan margin pada rantai pasok). Petani dapat menjadi lebih sejahtera melalui pemanfaatan by-product dan hasil olahan dari hasil produk pertanian. Pemanfaatan bioteknologi dan kerja sama dengan peneliti menjadi prasyarat untuk mengejar ketertinggalan ke depannya. Perihal adopsi teknologi dan inovasi, BRIN sebagai lembaga riset pemerintah oleh Mulyana Hadipernata (peneliti BRIN) disebut telah berpartisipasi dalam pengembangan sektor pangan, terutama dari sisi agro-industri untuk menambah daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Partisipasi yang telah dilakukan meliputi pengembangan varietas-varietas baru dalam produk pertanian serta meningkatkan kualitas hasil panen, mulai dari umur simpan hasil panen hingga perhatian terhadap masalah food loss dan waste dari sistem produksi dan distribusi pangan.

Terakhir, Ketua Bapanas menegaskan komitmen lembaganya untuk reformasi sektor pangan dan kebijakannya. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan transparansi dan reliabilitas dari data pangan, peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen stabilitasi pangan, hingga peningkatan partisipasi dan kerja sama pemerintah dalam intervensi struktural terhadap produksi dan distribusi pangan nasional. Prioritas dalam intervensi struktural di antaranya dilakukan dengan peningkatan otomatisasi, menjembatani antara kebutuhan pasar dengan pola produksi pertanian, kerja sama swasta, hingga integrasi sentra produksi produk pangan. Sementara itu, pihak swasta diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga siap mendukung upaya meningkatkan dampak positif kepada pelaku-pelaku di rantai pasok pangan.

DOKUMENTASI ACARA



DOKUMENTASI ACARA



LAMPIRAN 1

**MATERI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DI SEMINAR NASIONAL
PANGAN JAKARTA
"PEMBENAHAN
KEBIJAKAN PANGAN
MENUJU INDONESIA
EMAS"**

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEMINAR NASIONAL PANGAN

PEMBENAHAN KEBIJAKAN PANGAN MENUJU INDONESIA EMAS

DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN S.E., M,M.
MENTERI PERDAGANGAN RI

JAKARTA, 16 MARET 2023



PERKEMBANGAN INFLASI, HARGA, DAN PASOKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MENJELANG PUASA – IDUL FITRI 1444H

Pada bulan Febuari 2023 terjadi inflasi sebesar 0,16% (mtm) dan Inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 5,47%

Puasa-Lebaran 2019 (Mei-Juni)

Daging Ayam, Bawang Putih, Cabai Rawit, Cabai Merah dan Gula Pasir

Puasa-Lebaran 2020 (April-Mei)

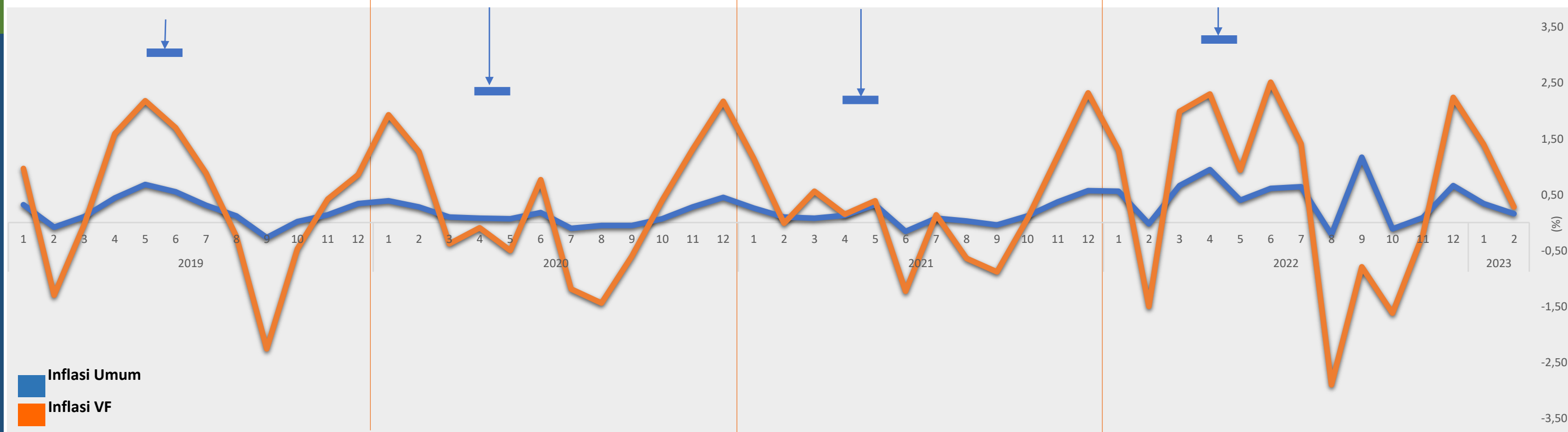
Daging Sapi, Daging Ayam dan Bawang Merah

Puasa-Lebaran 2021 (Apr-Mei)

Daging Ayam dan Minyak Goreng

Puasa-Lebaran 2022 (Apr-Mei)

Minyak Goreng, Daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi



ANDIL PER KOMODITAS		
INFLASI		
1	BAWANG PUTIH	0,01
2	CABE MERAH	0,02
3	BAWANG MERAH	0,03
4	BERAS	0,08
DEFLASI		
1	MINYAK GORENG	(0,01)
2	CABE RAWIT	(0,01)
3	DAGING AYAM RAS	(0,02)
4	TELUR AYAM RAS	(0,02)

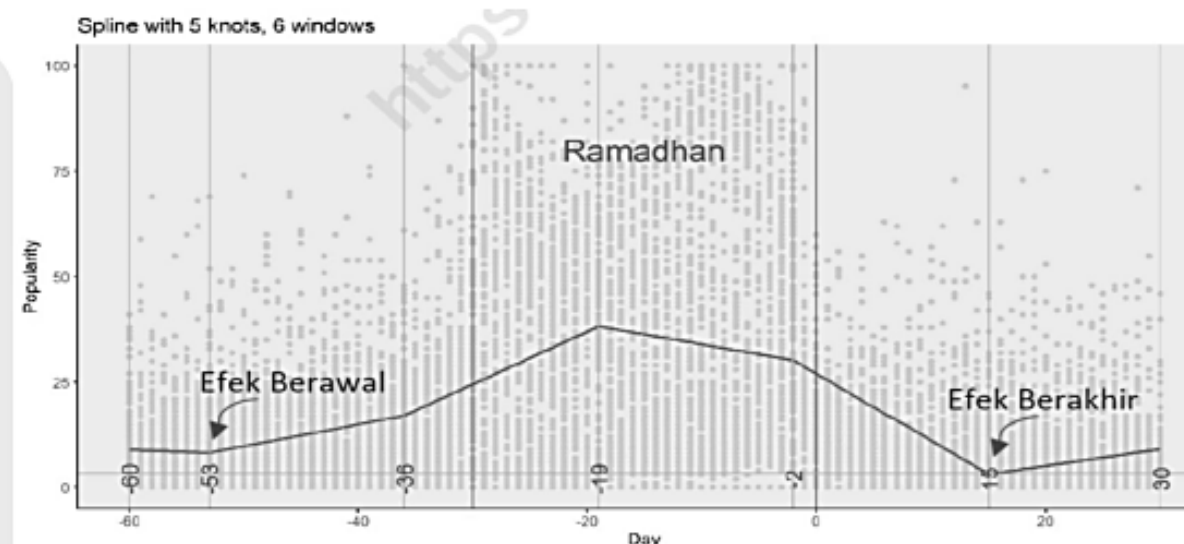
Subsektor	Feb 2023	Perub (%)
Nilai Tukar Petani (NTP)	110,53	0,63
NTP Perkebunan	127,01	0,89
NTP Tanaman Pangan	105,09	1,23
NTP Hortikultura	111,03	-1,01

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi efek Ramadhan dan Idul Fitri

Perubahan konsumsi makanan/minuman masyarakat terjadi pada:

- ▶ ± 23 hari atau ± 3 minggu sebelum datangnya bulan Ramadhan
- ▶ mencapai puncak pada H-19 (sebelum) Idul Fitri
- ▶ akhir efek Ramadhan terlihat sekitar 2 hari sebelum Idul Fitri - beralih ke konsumsi transportasi pulang kampung
- ▶ mulai hilang kira-kira ± 15 hari (± 2 minggu) setelah Idul Fitri

Sumber: Kajian BPS Tahun 2019



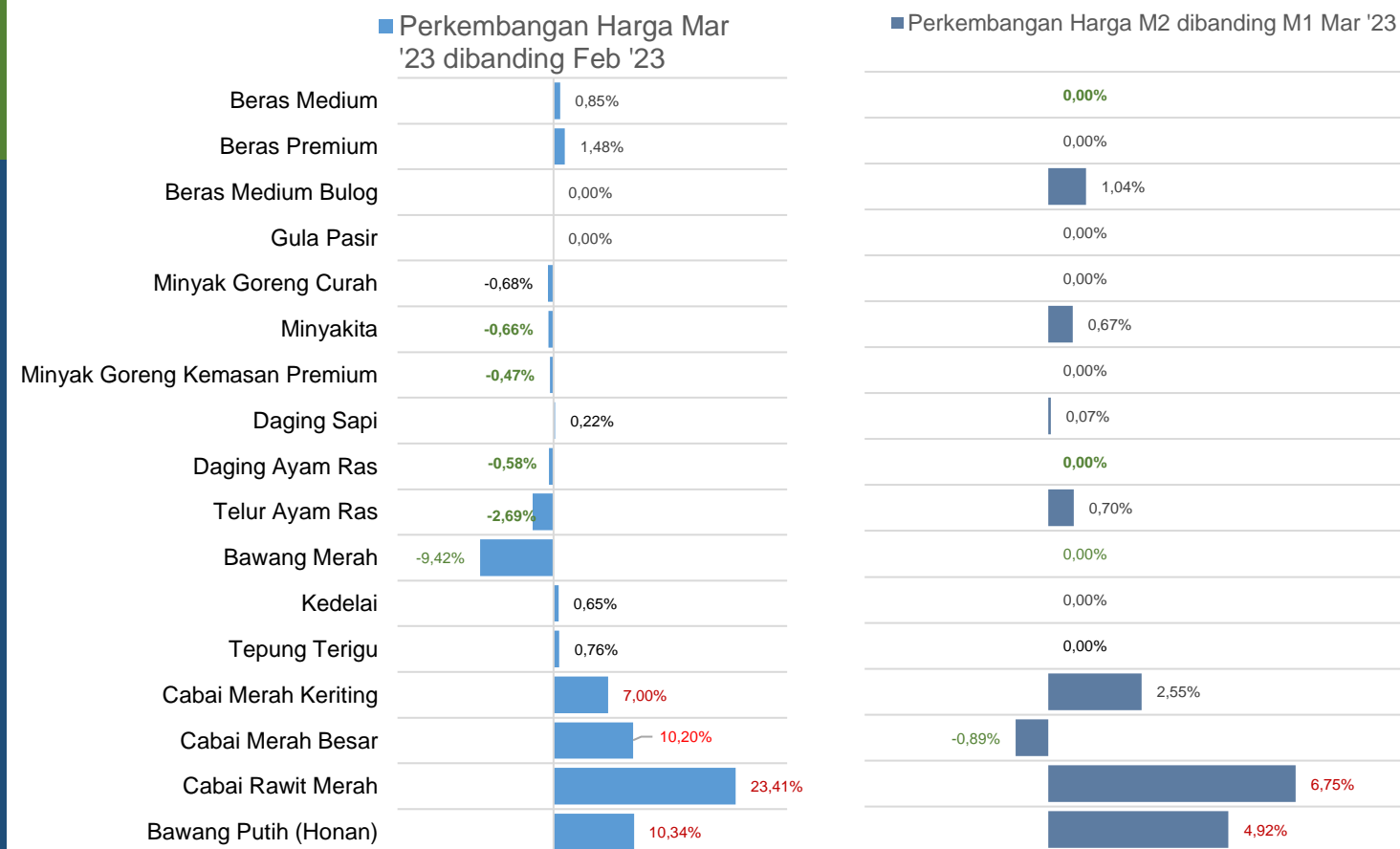
Gambar 4.9. Model Terbaik yang Merefleksikan Efek Ramadhan/Idul Fitri

ANGKA PENTING FEBUARI 2023:

1. Inflasi Umum sebesar 0,16% (mtm); inflasi 5,47% (yoy)
2. Volatile Food inflasi 0,28% (mtm); inflasi 7,62% (yoy)
3. IKK : Desember 2022 119,9 (optimis)
4. NTP : 110,53 (naik 0,63%)
 - Tanaman Pangan 105,09 (naik 1,23%)
 - Perkebunan 127,01 (naik 0,89%)
 - Hortikultura 111,03 (turun 1,01%)

Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang Ramadhan 1444H

Relatif Stabil dan Terkendali



Sumber: SP2KP Kemendag

Keterangan:

- HET** : Harga Eceran Tertinggi sesuai Permendag 57/2017 (Komoditas Beras) dan Permendag 49/2022 (Komoditas Minyak Goreng Curah dan Minyakita)
- HA** : Harga Acuan sesuai Perka Bapanas 5/2022 dan Perka Bapanas 11/2022
- Satuan: dalam Rp/kg, kecuali Minyak Goreng Rp/lt
- Daging sapi jenis paha belakang

Sumber: SP2KP Kemendag

No	Komoditas	Harga			Kebijakan Harga		Perkembangan Harga		
		Hari ini	Minggu lalu	Bulan lalu	HET	Harga Acuan	Hari ini Terhadap		
		10-Mar	3-Mar	10-Feb			Bulan lalu	Minggu lalu	HET/HA
1	BERAS MEDIUM	11,800	11,800	11,700			0.85%	-	
	- Region A (Sentra Produksi) Jawa, Sulawesi, Sumsel, Lampung, Bali, NTB	11,400	11,500	11,300	9,450		0.88%	-0.87%	20.63%
	- Region B (Sentra Konsumsi 1) Sumatera lainnya, Kalimantan, NTT	12,000	12,100	11,900	9,950		0.84%	-0.83%	20.60%
	- Region C (Sentra Konsumsi 2) Maluku, Papua	12,700	12,700	12,400	10,250		2.42%	-	23.90%
2	BERAS PREMIUM	13,700	13,700	13,500			1.48%	-	
	- Region A (Sentra Produksi) Jawa, Sulawesi, Sumsel, Lampung, Bali, NTB	12,900	13,000	12,800	12,800		0.78%	-0.77%	0.78%
	- Region B (Sentra Konsumsi 1) Sumatera lainnya, Kalimantan, NTT	14,200	14,200	14,000	13,300		1.43%	-	6.77%
	- Region C (Sentra Konsumsi 2) Maluku, Papua	14,900	14,800	14,500	13,600		2.76%	0.68%	9.56%
3	BERAS MEDIUM BULOG	9,700	9,600	9,700			-	1.04%	
4	GULA PASIR	14,400	14,400	14,400		13,500	-	-	6.67%
5	MINYAK GORENG								
	- Curah	14,600	14,600	14,700	14,000		-0.68%	-	4.29%
	- MinyaKita	15,100	15,000	15,200			-0.66%	0.67%	
	- Kemasan Premium	21,000	21,000	21,100			-0.47%	-	
6	DAGING SAPI	137,500	137,400	137,200		140,000	0.22%	0.07%	-1.79%
7	DAGING AYAM RAS	34,100	34,100	34,300		36,750	-0.58%	-	-7.21%
8	TELUR AYAM RAS	28,900	28,700	29,700		27,000	-2.69%	0.70%	7.04%
9	BAWANG MERAH	37,500	37,500	41,400		41,500	-9.42%	-	-9.64%
10	KEDELAI	15,600	15,600	15,500			0.65%	-	
11	TEPUNG TERIGU	13,300	13,300	13,200			0.76%	-	
12	CABAI								
	- Merah Keriting	44,300	43,200	41,400		55,000	7.00%	2.55%	
	- Merah Besar	44,300	44,700	40,200			10.20%	-0.89%	
	- Rawit Merah	68,000	63,700	55,100		57,000	23.41%	6.75%	
13	BAWANG PUTIH								
	- Grade A (Kating)	33,500	32,300	30,600			9.48%	3.72%	
	- Grade B (Honan)	32,000	30,500	29,000			10.34%	4.92%	

KEBIJAKAN NERACA KOMODITAS

DASAR HUKUM NERACA KOMODITAS

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Pasal 559

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha terkait ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan neraca komoditas yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri.
- (2) Dalam rangka penetapan neraca komoditas, kementerian/lembaga menyediakan data yang terkait dengan rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data pendukung pada sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor.
- (3) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor dan impor yang diatur di sektor masing-masing dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku.
- (4) Dalam hal neraca komoditas belum tersedia, penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai neraca komoditas diatur dengan Peraturan Presiden.

Penerbitan perizinan berusaha terkait ekspor dan impor dilakukan berdasarkan **Neraca Komoditas**

PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perikanan dan Kelautan

Bagian Kesatu

Impor Komoditas Perikanan

Pasal 276

- (1) Penerbitan persetujuan impor komoditas Perikanan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan berdasarkan neraca komoditas Perikanan.

Bagian Kedua

Impor Komoditas Pergaraman

Pasal 284

- (1) Penerbitan persetujuan impor Komoditas Pergaraman oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan berdasarkan neraca Komoditas Pergaraman.

- Penerbitan Persetujuan Impor komoditas perikanan dan pergaraman dilakukan berdasarkan **Neraca Komoditas**
- PP No.27 Tahun 2021 tidak mengatur ketentuan masa peralihan sehingga **Neraca Komoditas** perikanan dan pergaraman harus ditetapkan tahun 2021 sebagai dasar PI perikanan dan pergaraman tahun 2022

PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian

Paragraf 3 Neraca Komoditas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Pusat menetapkan neraca komoditas.

Pasal 12

- (1) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya.

- **Neraca Komoditas** diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong
- Pelaku Usaha pada 5 komoditas Tahap I telah melakukan pengisian data **Rencana Kebutuhan** pada **Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK)**
- Pasal 12 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2021 mengatur **penetapan Neraca Komoditas** dilakukan dalam Rakor yang diselenggarakan Kemenko Bidang Perekonomian paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya.

PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan

Pasal 5

- (5) Penerbitan persetujuan Ekspor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas.

Pasal 6

- (6) Penerbitan persetujuan Impor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas.

- **Neraca Komoditas** diperlukan sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI)
- Kebutuhan **Neraca Komoditas** untuk penerbitan PE dan PI pada 5 komoditas Tahap I tahun 2022

Perpres No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas

BAB VI PENAHAPAN PENETAPAN NERACA KOMODITAS, PEMBINA SEKTOR KOMODITAS, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penahapan Penetapan Neraca Komoditas

Pasal 29

- (1) Penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impornya dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tahun 2021 terdiri atas komoditas:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. daging lembu;
 - d. pergaraman; dan
 - e. perikanan.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tahun 2022 terdiri atas komoditas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Pelaksanaan **Neraca Komoditas** dilakukan secara bertahap
- Pelaksanaan **Neraca Komoditas** Tahap I untuk 5 komoditas yakni Garam, Perikanan, Gula, Beras, dan Daging
- Pelaksanaan **Neraca Komoditas** tahap selanjutnya (mandatory) untuk komoditas selain 5 komoditas Tahap I

POKOK PENGATURAN PERPRES 32 TAHUN 2022

Perpres No.32/2022 telah diundangkan pada 21 Februari 2022, terdiri dari 8 Bab dan 36 Pasal mengatur pokok pengaturan sebagai berikut:

BAB I. KETENTUAN UMUM

Definisi; Tujuan; Fungsi; Data dan Informasi dalam NK;

BAB II. PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN NK

Kewenangan Koordinasi dan Pengendalian; Data dan Informasi Lengkap, Detail, dan Akurat mengenai Kebutuhan dan Pasokan; NK disediakan dalam SINAS-NK; Cakupan Penyusunan NK (penyusunan RK, penetapan RK, penyusunan RP, penetapan RP, penetapan NK, penerbitan PB UMKU ekspor impor berdasarkan NK)

BAB III. PERUBAHAN NK

Tata Cara Perubahan; Kriteria Perubahan; Prosedur Perubahan; Penerbitan PE/PI berdasarkan NK Perubahan

BAB IV. INTEGRASI DATA DAN HAK AKSES

Sharing Data Realisasi Ekspor/Impor oleh Menteri Keuangan dan PE/PI oleh Menteri Perdagangan; Manajemen Hak Akses

Ket: NK (Neraca Komoditas); RK (Rencana Kebutuhan); RP (Rencana Pasokan); PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kekuatan Usaha); PE (Persetujuan Ekspor); PI (Persetujuan Impor)

BAB V. KONDISI SINAS NK/SISTEM ELEKTRONIK TIDAK BERFUNGSI

Dalam keadaan memaksa, maka pelayanan penyusunan NK dilaksanakan melalui sistem elektronik lainnya yang dikembangkan oleh pengelola sinas NK

BAB VI. PENAHAPAN, PEMBINA SEKTOR KOMODITAS, DAN MONITORING EVALUASI

Penahapan NK tahun 2021 dan tahun 2022; Penetapan RK dan RP oleh K/L Pembina; Monitoring dan Evaluasi

BAB VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Komoditas yang belum ditetapkan NK perizinan ekspor/impor dengan existing; Penerbitan PBUMKU berupa Rekomendasi bagi komoditas yang belum ditetapkan NK melalui SINAS-NK

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

Komoditas yang telah ditetapkan NK: rekomendasi yang telah diterbitkan tidak berlaku, PI/PE tetap berlaku; NK yang telah ditetapkan pada 2021 dinyatakan berlaku; Perpres berlaku pada tanggal diundangkan

TUJUAN DAN FUNGSI NERACA KOMODITAS

Tujuan dan fungsi NK sesuai Pasal 2 Perpres No.32/2022, sebagai berikut:

TUJUAN

- 1 Mendukung **penyederhanaan dan transparansi perizinan** di bidang Ekspor dan Impor
- 2 Menyediakan **data yang akurat dan komprehensif** sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor
- 3 Memberikan **kemudahan dan kepastian berusaha** dalam rangka meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja
- 4 Menjamin **ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong** untuk kepentingan industri
- 5 Mendorong **penyerapan komoditas** yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya.

FUNGSI

- 1 **Dasar penerbitan** Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI)
- 2 Acuan data dan informasi **situasi konsumsi dan produksi** suatu komoditas berskala nasional
- 3 Acuan data dan **informasi kondisi serta proyeksi pengembangan** industri nasional
- 4 Acuan penerbitan **Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor** dari K/L Pembina Sektor Komoditas.

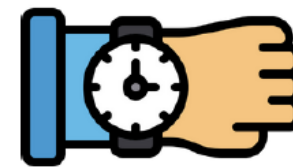
KONDISI YANG DIHARAPKAN



Satu data referensi antar K/L



Pelayanan melalui satu platform



Kepastian waktu, jumlah, dan biaya



Penyederhanaan Tata Niaga



Peningkatan transparansi

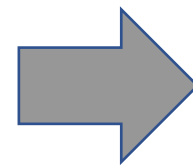


Pencegahan Korupsi

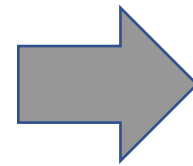
PENAHAPAN NERACA KOMODITAS

Telah dilakukan evaluasi atas perkembangan Penyiapan Komoditas untuk Implementasi NK dan dimasukkan ke SiNas NK (Implementasi NK), dengan hasil evaluasi bahwa terdapat 24 Kelompok Komoditas (19 Kelompok Komoditas yang baru, 5 yang lama dan sudah diterapkan di Tahap I), yang sudah siap untuk implementasi NK dan dimasukkan ke SiNas NK.

**TAHAP I
(TAHUN 2021)**



**TAHAP II
(TAHUN 2022)**

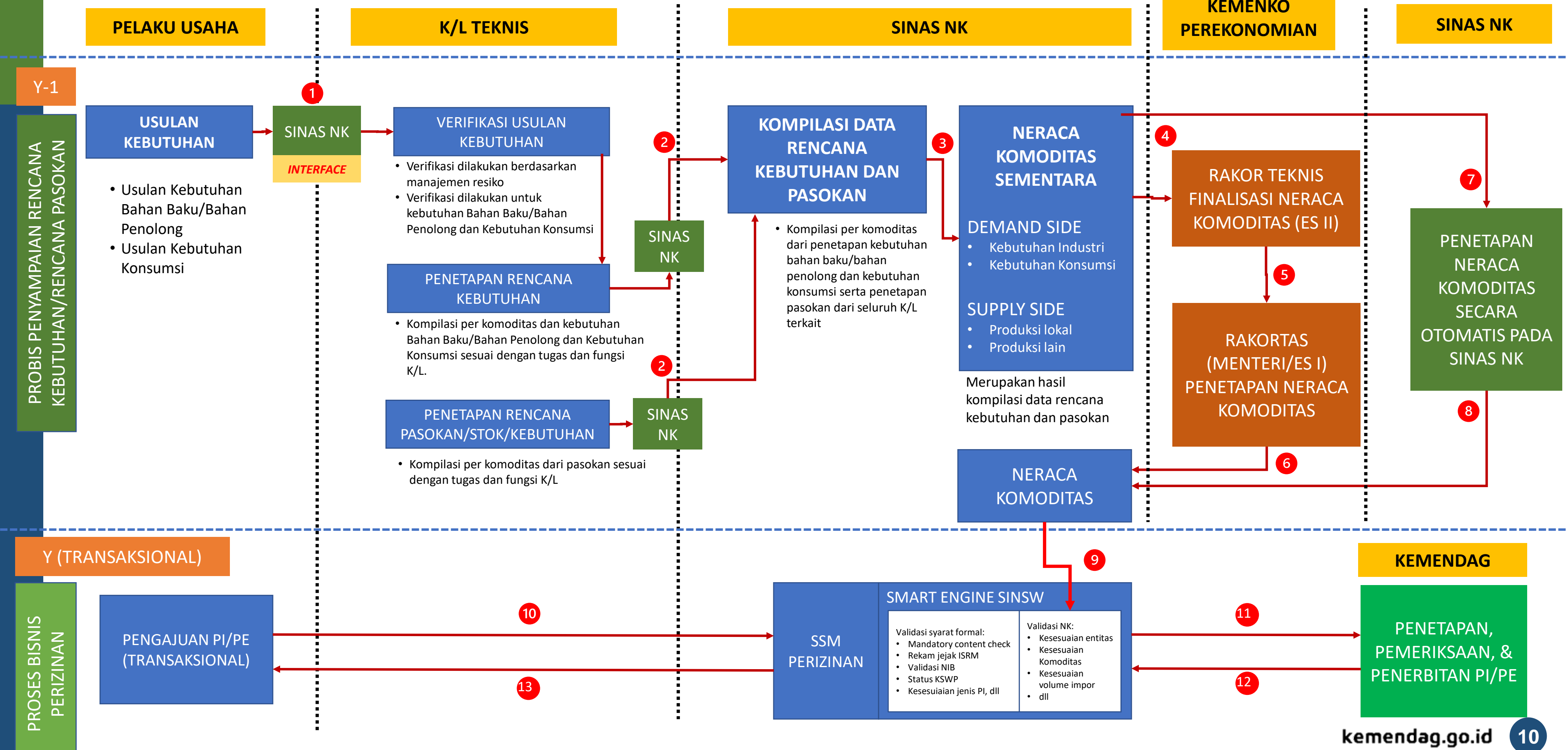


1. Besi Baja Baja Paduan Produk Turunan
2. Ban
3. Bahan Baku Plastik
4. Bahan Baku Minuman Beralkohol
5. Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
6. Elektronik (AC)
7. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Printer Berwarna
8. Jagung (STRANAS PK)
9. Bahan Baku Pelumas
10. Sakarin dan Siklamat
11. Semen Clinker dan Semen
12. Alas Kaki
13. Bahan Baku Masker dan Masker
14. TPT
15. TPT Batik dan Motif Batik
16. Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi

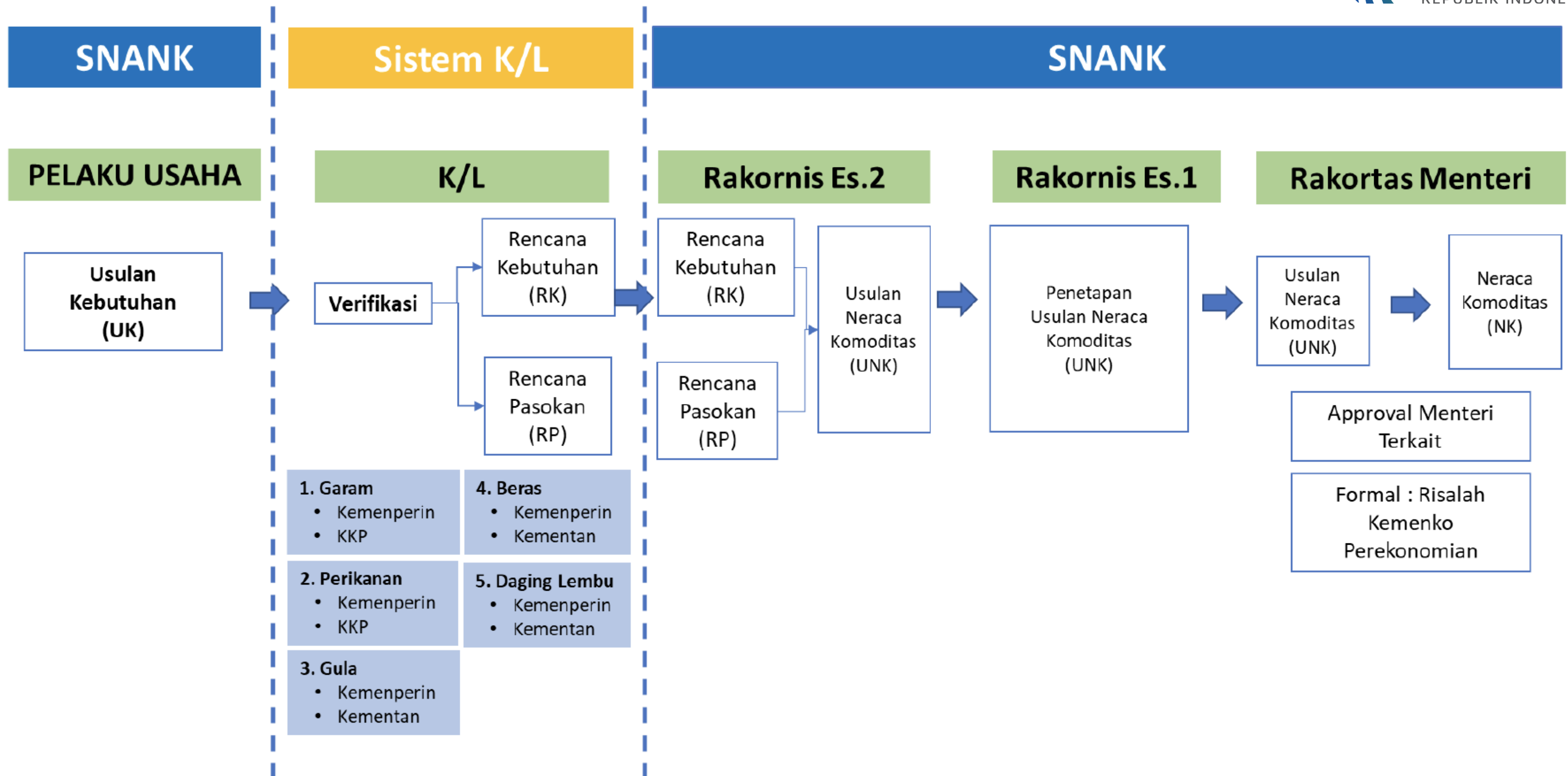
17. Bahan Bakar Lain
18. Bahan Bakar Minyak
 - a. Minyak Mentah;
 - b. Kondensat;
 - c. Minyak Bensin / Gasoline
 - d. Minyak Solar / Gasoil;
 - e. Minyak Bakar / Fuel Oil;
 - f. Medium Distillate Fuel;
 - g. Aviation Gasoline (AVGAS);
 - h. Aviation Turbine Fuel (AVTUR);
 - i. Minyak Tanah / Kerosene;
19. Gas Bumi
 - a. LPG;
 - b. LNG;
 - c. DME;
 - d. Gas Alam;
 - e. CNG.

Untuk 32 Kelompok Komoditas lainnya yang berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan Penyiapan Komoditas untuk Implementasi NK, dinyatakan masih belum siap, penerbitan PE dan PI oleh K/L dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 33 Perpres Nomor 32 Tahun 2022, dan K/L terkait agar terus mendorong untuk dilakukan percepatan penyiapan komoditas tersebut untuk dapat segera diberlakukan pada implementasi Tahap III (tahap selanjutnya).

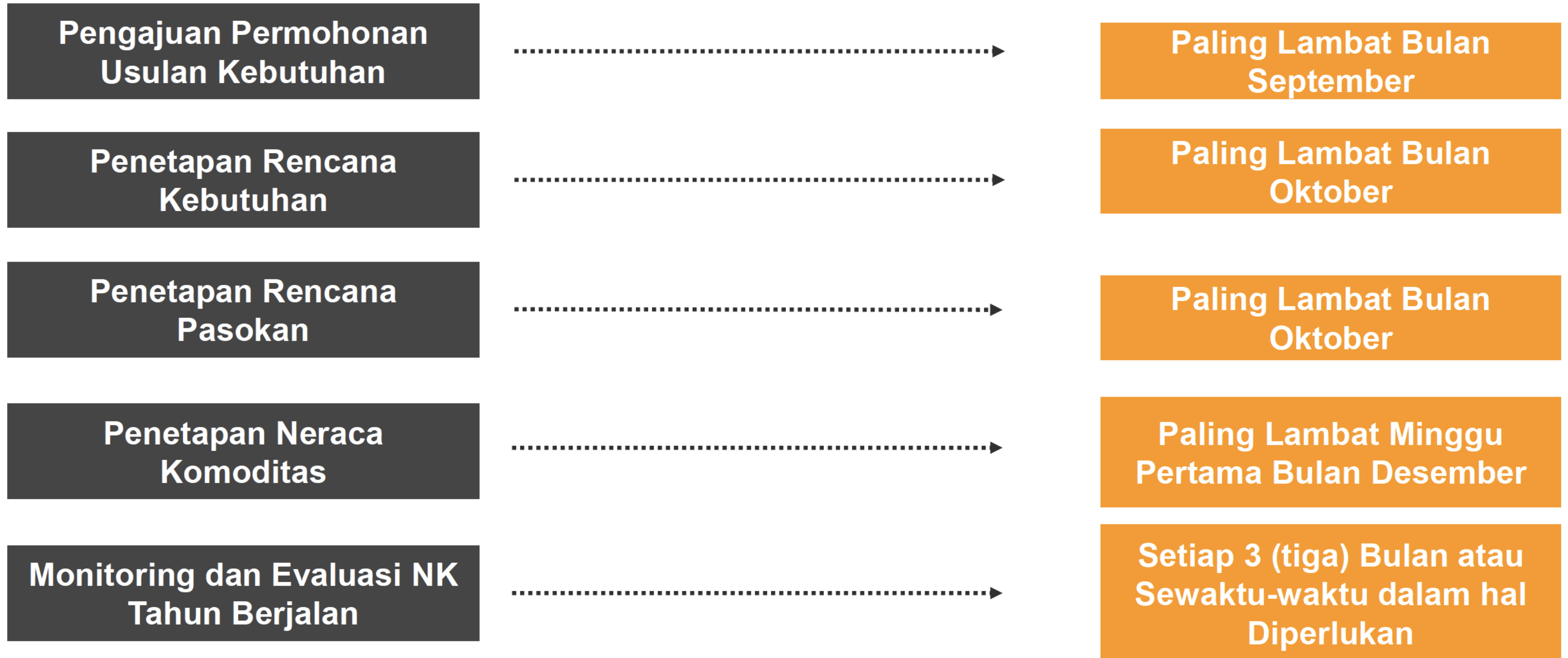
PROSES BISNIS NERACA KOMODITAS



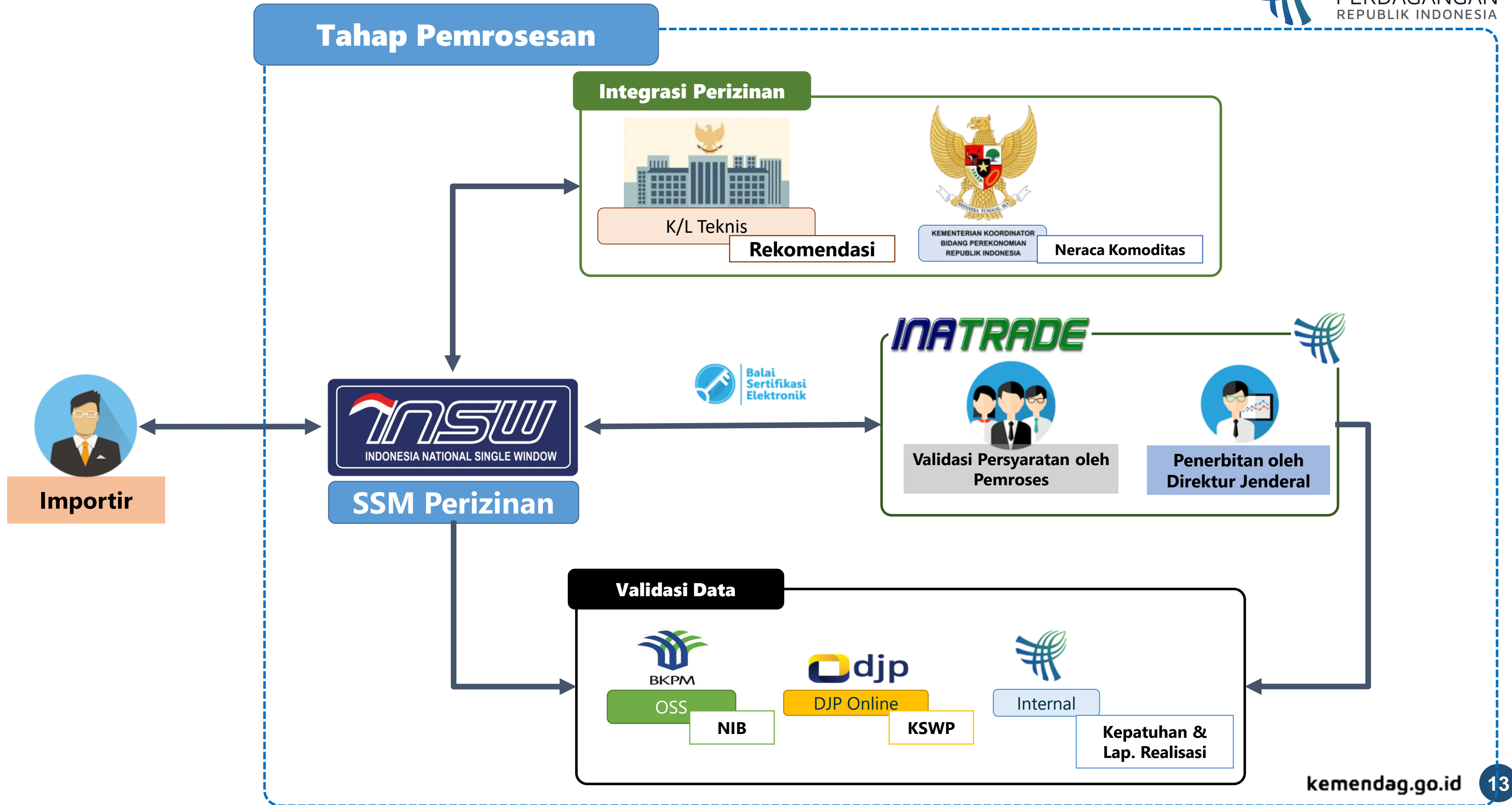
PROSES BISNIS DAN INTEGRASI SISTEM



TIMELINE NERACA KOMODITAS



MEKANISME PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG IMPOR





1. UU No. 7/2014 - Perdagangan
2. UU No. 11/2020 - Cipta Kerja
3. PP No. 5/2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
4. PP No. 29/2021 - Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
5. Perpres Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas.
6. Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor jo. 25 Tahun 2022.
7. Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor jo. Permendag 40 Tahun 2022

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

- Impor harus dalam keadaan Baru
- Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru
- Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API
- Importir wajib memiliki **Perizinan Berusaha (PB)** dari Menteri → (IT, IP, PI)
- **PB** merupakan dokumen pelengkap pabean di *Border* atau persyaratan Impor *Post Border*
- Importir wajib memiliki Hak Akses SINSW
- Memenuhi kewajiban KSWP
- Wajib Laporan Realisasi impor

DATA NERACA KOMODITAS PANGAN

Dalam ton

KOMODITAS	BERAS	DAGING & RUMINANSIA	GULA	GARAM	PRODUK PERIKANAN	GARAM
STOK AWAL	4.922.934	56.444	1.110.517	930.141	196.897	3.246.041
PRODUKSI	31.919.504	448.432	2.600.000	1.500.000	18.293.371	17.143.170
KEBUTUHAN DARI SUMBER LAIN (IMPOR)	750.293	1.042.767	991.000	2.861.634	266.453	1.832.143
TOTAL KEBUTUHAN NASIONAL	30.970.759	815.651	3.401.517	4.960.269	18.524.411	16.049.189
STOK AKHIR	6.621.972	67.970	1.300.000	331.506	232.310	6.172.165

Sumber :

- Dashboard Neraca Komoditas
- Risalah Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian 25 Januari 2023

KOMODITAS PANGAN YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO	KOMODITAS	JUMLAH POS TARIF/HS)	PERIZINAN BERUSAHA		PENGAWASAN	
			PI	LS	BORDER	POST BORDER
1	Beras	9	PI	LS	B	
2	Gula	6	PI	LS (GKM)	B	
3	Daging Sapi, Kerbau Bakalan dan Sapi Bakalan	13	PI			PB
4	Garam	5	PI	LS	B	
5	Hasil Perikanan	387	PI			PB
6	Jagung	2	PI			PB

Keterangan:

1. PI = Persetujuan Impor
2. LS = Laporan Surveyor
3. B = Border
4. PB = Post Border

TRANSISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN – BADAN PANGAN NASIONAL

PEMBENTUKAN BADAN PANGAN NASIONAL



Dasar Pembentukan

PERPRES NO. 66/2021
Tentang Badan Pangan Nasional
29 Juli 2021

- Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan
- Mengatasi berbagai persoalan pangan nasional terkait data pangan dan impor pangan
- Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait pemenuhan pangan nasional

Pendelegasian Kewenangan kepada Badan Pangan Nasional



Menteri Perdagangan mendelegasikan :

perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan dan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan



Beras



Kedelai



Jagung



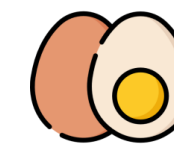
Gula
Konsumsi



Cabai



Bawang



Telur
Unggas



Daging
Unggas



Daging
Ruminansia



Menteri Pertanian mendelegasikan :

perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.



Menteri BUMN menguasai :

memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

BADAN PANGAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional

Permendag Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- Pengembangan sistem informasi pangan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kemendag.go.id



@Kemendag



Kementerian Perdagangan

#AyoDagang

LAMPIRAN 2

MATERI HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA

DI SEMINAR NASIONAL
PANGAN JAKARTA
"PEMBENAHAN
KEBIJAKAN PANGAN
MENUJU INDONESIA
EMAS"



Memakmurkan dan Menjawab Masalah Riil Petani

Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

Latar Belakang: Kesejahteraan Petani

- Mayoritas **penduduk miskin** di Indonesia bekerja di sektor pertanian
- **Pendapatan petani relatif lebih rendah** jika dibandingkan dengan pekerja di sektor lainnya.

Kemiskinan

46,3%

Penduduk miskin ada
di sektor pertanian

Pendapatan Sektor Pertanian

Rp1,9 Juta

Per bulan
(2022)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Faktor Internal

- **Alih fungsi dan fragmentasi** lahan pertanian
- Meningkatnya **persaingan penggunaan air** untuk irigasi pertanian dan penggunaan aktivitas ekonomi lainnya;
- Menurunnya **kualitas tanah** dampak dari eksploitasi dan pemanfaatan berlebihan;
- Usaha pertanian didominasi oleh **pertanian skala kecil**, dan umumnya lemah kemampuan permodalan serta akses terhadap input pertanian;
- Tenaga pertanian/petani, yang semakin **menua (aging)**

Mayoritas Petani Menguasai Luas Lahan Sempit dan Berusia Lanjut

Nasional

58,1%

Petani secara nasional menguasai hanya 0,5 hektar

Pulau Jawa

86%

Petani di Pulau menguasai hanya 0,5 hektar

Di atas 65 tahun

4,12 Juta
Petani

55-65 tahun

6,26 Juta
Petani

Sumber: Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), 2018

Faktor Eksternal: Perubahan Iklim

La Nina

188.662 hektar

Lahan Sawah Terendam Banjir
(rata-rata per tahun)

El Nino

255.974 hektar

Lahan Sawah Mengalami Kekeringan
(rata-rata per tahun)

Faktor Eksternal Lainnya

- **Terbatasnya akses petani terhadap teknologi** terutama yang terkait dengan *input* pertanian, seperti benih dan pupuk.
- **Terganggunya alur rantai pasok** atau pemasaran hasil-hasil pertanian.

Dampak Dari Masalah

Produktivitas



Produktivitas Padi

-0,814%

Per tahun
(2015-2020)

Biaya Produksi Mahal



Biaya Produksi Gabah

Indonesia (Rp2.925/kg)

Vietnam (Rp1.679/kg)

Thailand (Rp2.291/kg)

India (Rp2.306/kg)

STRATEGI PEMERINTAH

- **Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi**

Penggunaan teknologi pengolahan lahan, penggunaan **benih padi** unggul bersertifikat; Subsidi Pupuk; Subsidi Bunga KUR Pertanian;

- **Korporasi Petani Nelayan**

Transformasi dari kegiatan usaha tani perseorangan menjadi usaha korporasi petani; Agar petani menikmati nilai tambah yang lebih besar.



Terima kasih

Moeldoko

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

LAMPIRAN 3

**MATERI PERUM BULOG
DI SEMINAR NASIONAL
PANGAN JAKARTA
"PEMBENAHAN
KEBIJAKAN PANGAN
MENUJU INDONESIA
EMAS"**

STABILISASI HARGA PANGAN DI SISI HULU DAN HILIR OLEH PERUM BULOG

Jakarta, 16 Maret 2023



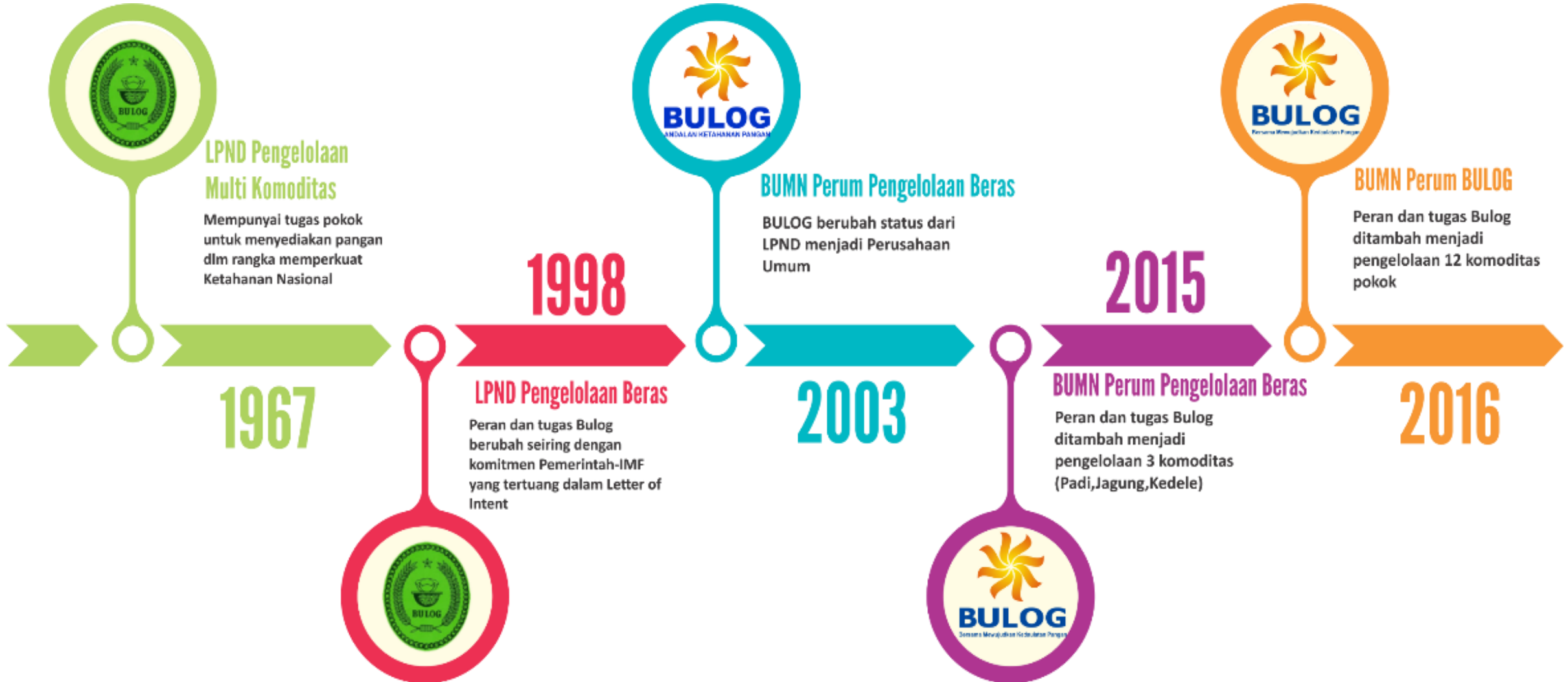
Penugasan Perum BULOG



Sejarah Perum BULOG



BULOG
Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan



Penugasan PSO dan Komersial Perum BULOG



UUD 45

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" Pasal 33 (2)

PSO sebagai Operator Kebijakan Pangan

UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan
Perpres No. 48 / 2016 Tentang Penugasan kepada Perum BULOG
Dalam Rangka Ketahanan Pangan
Perpres No. 66 / 2021 Tentang Badan Pangan Nasional



Komersial sebagai Badan Usaha Milik Negara

UU No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN
PP No. 13 tahun 2016 tentang Perum BULOG



Ketersediaan



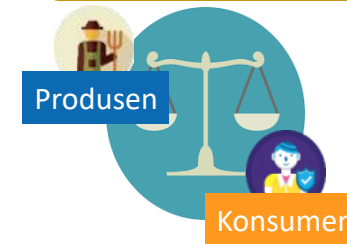
- Melakukan penyerapan produksi dalam negeri
- Optimalisasi Sarana pengolahan komoditas pangan
- Pelaksanaan Program On Farm

Keterjangkauan



- Penyebaran gudang di seluruh wilayah tanah air Indonesia
- Melakukan distribusi dan pemerataan stok pangan pokok
- Mengelola volume CBP sebesar 1 s/d 1,5 juta ton

Stabilitas



- BULOG membeli dan menjual komoditas pangan sesuai Harga Acuan dari Pemerintah
- Melaksanakan penyaluran KPSH, Program BPNT, dan Penanggulangan Bencana Alam

BADAN PANGAN NASIONAL
*menentukan kebijakan &
BULOG sebagai pelaksana*

PP NO. 13 TAHUN 2016 : PERUM BULOG

Pasal 3 ayat (1) → Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa:

- pengamanan harga pangan pokok beras ditingkat produsen dan konsumen;
- pengelolaan cadangan pangan pokok beras Pemerintah;
- penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu; dan
- pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Berlaku juga untuk pangan lainnya sebagaimana Pasal 3 ayat (3)

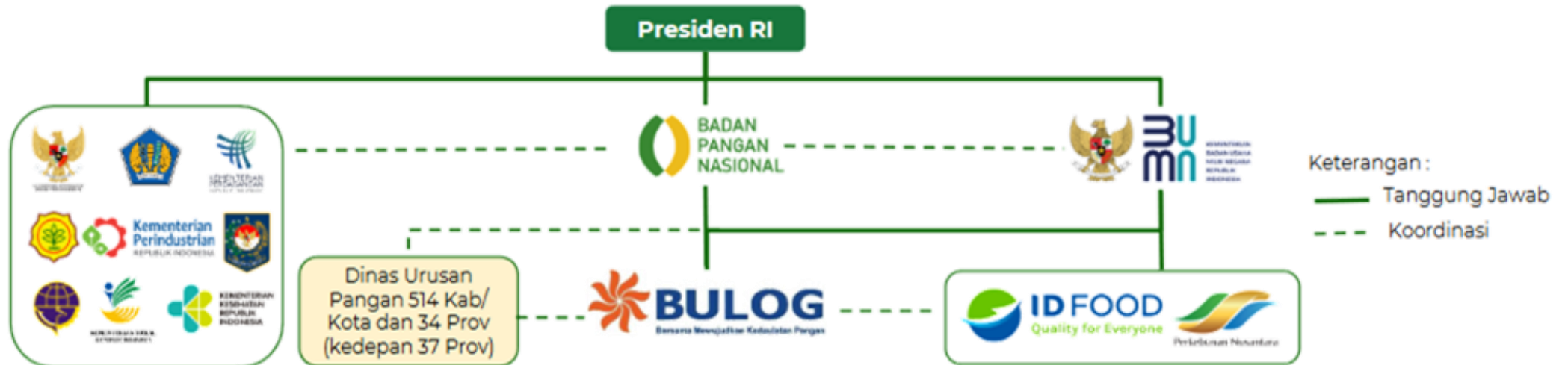
UU NO 18 TAHUN 2012 : PANGAN

- Pasal 127** → Tugas Badan Pangan Nasional: Melaksanakan **tugas pemerintahan di bidang Pangan**
- Pasal 128** → Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden memberikan penugasan khusus kepada **badan usaha milik negara di bidang Pangan** untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PERPRES NO 66 TAHUN 2021 : BADAN PANGAN NASIONAL

- Pasal 2** → Tugas Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan → Menyusun **kebijakan pangan**.
- Pasal 3** → Fungsi Badan Pangan Nasional yang menjabarkan **kebijakan pangan** yang harus disusun Badan Pangan Nasional.
- Pasal 3 c dan 12 c** → Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui **Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan**.
- Pasal 11** → Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui **BUMN di bidang pangan**.
- Pasal 29** → Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan **penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional**.







Posisi Perum BULOG Pasca Berdirinya Bapanas



Kebijakan

-  Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan
-  Pengadaan/ Penyiapan Pasokan Pangan Untuk Stabilisasi Pasokan & Harga
-  Pelaksana Kegiatan Stabilisasi Harga Pangan
-  Pengawasan Mutu, gizi dan keamanan pangan
-  Pengentasan daerah rentan rawan pangan

Mekanisme

-  Badan Pangan Nasional (penetapan rencana kebutuhan pangan melalui Sistem SNANK)
-  Rakortas (penetapan penugasan)
-  Badan Pangan Nasional (kuasa penugasan ke BULOG)
-  Kementerian BUMN (untuk izin penugasan ke ID FOOD)
-  Kementerian/Lembaga Teknis (untuk rekomendasi teknis)
-  Kementerian Perdagangan (untuk perizinan importasi)

Operator

- 
 - Penugasan 9 (sembilan) komoditas sesuai Perpres 66/2021- **(KPA NFA)**
 - Mekanisme Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) - **(KPA NFA)**
- 
 - Penugasan skema komersial/ B2B (cost + margin)
 - Kebijakan lain non komersial, penugasan oleh KBUMN - **(KPA NFA)**

Komponen Utama Pengelolaan PSO Pangan



Peran BULOG pada Rantai Pasok Pangan Nasional

Meredam Inflasi Hulu



Menekan Disparitas Harga



Meredam Inflasi Hilir



On Farm & Procurement

Mengawal produksi serta membeli bahan baku pangan dan pakan.

Manufacturing

Mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi.

Warehousing & Distribution Center

Menyimpan dan merawat komoditas pangan/pakan.

Distribution

Mendistribusikan pangan dan pakan menggunakan berbagai moda transportasi.

Market

Menyampaikan produk pangan dan pakan terjangkau dan berkualitas.

Pangan Kelolaan (Perpres 66-2021)



Beras



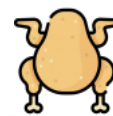
Jagung



Kedelai



Daging Ruminansia



Daging Ayam Ras



Telur Ayam Ras



Minyak Goreng



Bawang



Cabai

Manfaat Pengelolaan Pangan oleh BULOG

Indonesia dengan penduduk yang memiliki kekuatan ekonomi beragam membutuhkan cadangan pangan sebagai instrumen untuk menjaga tingkat daya beli yang merupakan motor dari roda perekonomian nasional. Jika daya beli jatuh maka tingkat konsumsi pangan akan turun dan berdampak sistemik terhadap komponen ekonomi lainnya.



Produsen Pangan

Penjagaan volume stok cadangan pangan dari produksi dalam negeri menjaga tingkat harga hulu. Hal itu membantu Produsen pangan memiliki usaha *profitable* dan berkesinambungan.



Pedagang Perantara

Kestabilan harga dari penggunaan cadangan pangan akan menjaga tingkat profit yang didapat pedagang. Akibatnya iklim bisnis akan ideal untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.



Konsumen Pangan

Stabilisasi harga dari penggunaan cadangan pangan akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat umum. Roda ekonomi akan bertumbuh dari terjaganya konsumsi.



Bencana Alam

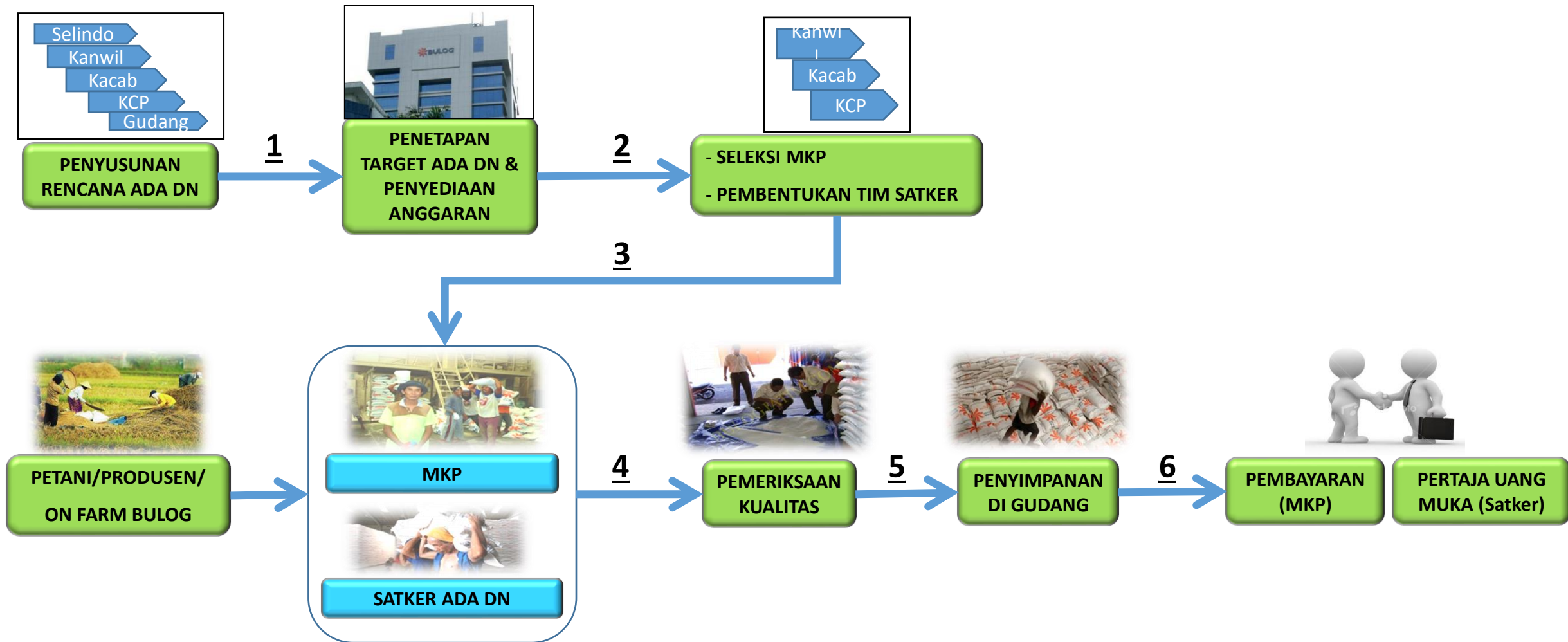
Penyaluran cadangan pangan pada masyarakat terdampak bencana akan meningkatkan harapan hidupnya dan mencegah permainan harga oleh oknum tertentu.



Pengadaan Gabah dan Beras



Mekanisme Pengadaan Gabah/Beras



01

Satker ADA DN

Satuan Kerja yang dibentuk oleh Pimwil/Pinca/Pincapem dalam rangka penugasan pengadaan ADA DN

02

Vendor

Vendor terdiri dari lembaga Pemerintah, badan usaha, usaha yang berbadan hukum BUMN, BUMD, BUMDes, usaha perseorangan, koperasi, Poktan/Gapoktan, Lumbung Pangan Desa,

03

Mitra Pangan Pengadaan (MPP)

Kemitraan pangan perusahaan dilakukan atas dasar saling menguntungkan, komitmen, dan kesadaran bersama untuk menyediakan pasokan dan/atau pangan Nasional

04

Unit Bisnis

Unit struktural semi otonom yang dibentuk oleh direksi Perum BULOG untuk melakukan kegiatan produksi pangan termasuk pembelian bahan baku, perdagangan komoditi, jasa pengolahan dan pengemasan

ON FARM SINERGI

Kegiatan kerjasama usaha tani yang dilakukan oleh beberapa pihak antara Perum BULOG, MKO, BUMN, swasta, dimana Perum BULOG sebagai *off taker* hasil panen

ON FARM MANDIRI BULOG

Kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola secara mandiri oleh Perum BULOG di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain



ON FARM KEMITRAAN MKO

Kerjasama antara Perum BULOG dengan MKO, dimana Perum BULOG memfasilitasi kredit modal kerja dengan Lembaga Keuangan dan MKO berkewajiban membayar kembali setelah panen, selanjutnya Perum BULOG sebagai *off taker* hasil panen

ON FARM MANDIRI PETANI

Kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh petani, Poktan, atau Gapoktan di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain, dan Perum BULOG sebagai *off taker* hasil panen

Saat pemasukan barang pengadaan beras



Pengambilan Sampel beras



Sample Beras



Analisa Kualitas Beras

Pengelolaan dan Perawatan Stok



Definisi : Proses pemindahan Barang milik PERUM BULOG dari gudang satu ke gudang lainnya dengan menggunakan **Penyedia Jasa Angkutan**

MOVENAS

Pemindahan Barang dari gudang ke gudang lainnya **ANTAR DIVISI REGIONAL (DIVRE)**

MOVEREG

Pemindahan Barang dari gudang **SATU SUBDIVRE/KANSILOG KE GUDANG SUBDIVRE/KANSILOG LAINNYA DALAM SATU WILAYAH DIVRE**

MOVELOK

Pemindahan Barang dari gudang ke gudang lainnya pada **SATU KANSILOG/SUB DIVISI REGIONAL / DIVRE OPERASIONAL**

KANWIL PENGIRIM

PENGADAAN BERAS TINGGI

Surplus Pengadaan beras berpusat di pulau Jawa, NTB, Lampung dan Sulselbar



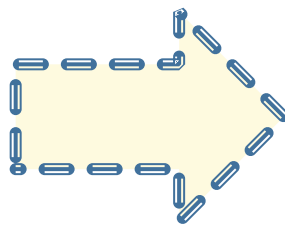
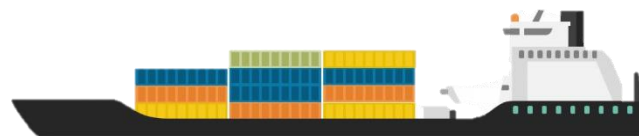
KETAHANAN STOK TINGGI

Usia simpan relatif lama sehingga berpotensi turunnya mutu



KAPASITAS GUDANG TERBATAS

Realisasi pengadaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan pengeluaran barang menyebabkan space gudang penuh



Dengan movenas diharapkan stok tersedia di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan penyaluran / penjualan dengan minimum stok (MSR) 3 bulan

Minimum Stock Requirement (MSR) adalah ketahanan persediaan minimal yang harus dikuasai untuk 3 bulan kebutuhan penyaluran dengan rincian :

- Satu Bulan Untuk Kebutuhan Penyaluran Bulan Berjalan
- Satu Bulan Untuk Cadangan Bulan Berikutnya
- Satu Bulan Untuk Masa Tunggu Pengiriman

KANWIL PENERIMA

PENGADAAN RELATIF KECIL

Stok hasil pengadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan penyaluran



KETAHANAN STOK RENDAH

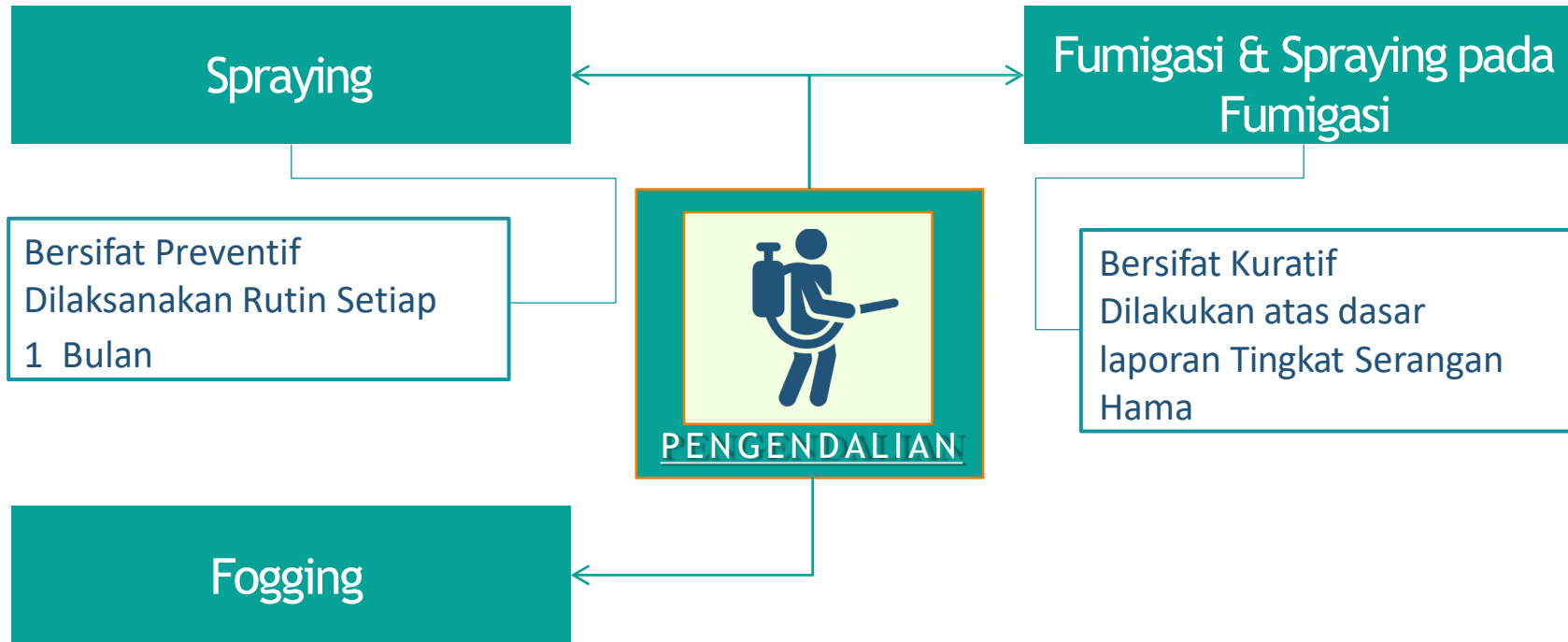
Ketahanan stok di bawah 3 bulan



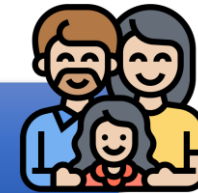
SPACE GUDANG TERSEDIA

Stok dalam gudang rendah sehingga banyak gudang belum terisi optimal





Stabilisasi Harga di Hilir



Cadangan Beras Ideal Bagi Suatu Negara

- **Hasil Rakortas Tingkat Menteri (2018): Pemerintah harus mempunyai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersedia setiap saat di setiap tempat.**
 - Pemerintah telah memerintahkan BULOG untuk menjaga stok beras pada **kisaran 1 – 1,5 juta ton**
 - Beras harus tersedia di setiap gudang-gudang BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia
 - Beras dapat diakses setiap saat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan
- **FAO** menyebutkan bahwa **SUR (*Stock to Utilization Ratio*) suatu negara adalah 17 – 18%** dari kebutuhan konsumsi negara dalam setahun atau kebutuhan 2 minggu
 - Asumsi sebulan kebutuhan konsumsi 2,5 - 3 juta, maka SUR adalah 1,25 – 1,50 juta ton
 - SUR bisa dipenuhi dari stok di Pemerintah dan Masyarakat
- **Tim UGM (2003)** menyebutkan bahwa jumlah **cadangan beras** ideal yang harus dimiliki oleh Pemerintah adalah sekitar **750 Ribu – 1,25 juta Ton**
- **Menurut Kementan (Permentan No 11 Tahun 2018), Cadangan beras nasional sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional.**
 - Cadangan tersebut terbagi atas 11,2% di masyarakat; 8% dikuasai oleh Pemerintah Pusat; dan 0,5% di Pemerintah Daerah

BULOG selalu menjaga stok beras minimum sama dengan kebutuhan nasional.

Dengan menjaga stok nasional melalui penyerapan gabah beras petani serta menjaga penyaluran dan penjualan yang intens maka **BULOG berperan besar dalam meningkatkan aktivitas perekonomian pangan baik di perdesaan (petani) maupun di perkotaan (konsumen)**

Bentuk Umum Penugasan PSO Kepada BULOG

PSO

Bantuan Sosial

Golongan Anggaran

Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

Stabilisasi pasokan dan harga komoditas non beras (jagung, kedelai)

GAMBARAN UMUM CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP)



Definisi

Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah

Operator

Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran CBP
(Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015)



Kuasa Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BA BUN menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III sebagai KPA
(PMK Nomor 88/PMK.02/2019 jo PMK 98/PMK.02/2021)



STABILISASI HARGA (SPHP Beras)

Untuk menangani lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras CBP



CADANGAN ASEAN

Penggunaan CBP dalam rangka perjanjian Badan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve/APTERR yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.



TANGGAP DARURAT, BENCANA & RAWAN PANGAN

Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana



BANTUAN INTERNASIONAL

Dilakukan untuk bantuan sosial korban bencana yang terjadi di luar negeri, dan kerjasama internasional dalam ketahanan pangan

Mekanisme Pelaksanaan SPHP Beras Tahun 2023



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

Menerbitkan surat penugasan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Medium



BULOG Pusat, via Penerbitan Fax : Instruksi untuk melaksanakan SPHP Beras di seluruh Indonesia



BULOG Kanwil/KC/KCP : Pelayanan SPHP Beras & Penyetoran Penjualan ke kantor Pusat



BULOG Pusat, Menyampaikan Pelaporan Rutin Pelaksanaan SPHP Beras ke Bapanas/NFA tembusan K/L Terkait



Reviu pelaksanaan SPHP Beras oleh APIP atas dasar penugasan dari Bapanas

Penagihan oleh Perum BULOG ke KPA berdasarkan hasil reviu

Penjualan



Penjualan



Konsumen

Keterangan:

Dokumentasi awal

Penjualan

Dokumentasi akhir

Nama Program	➤	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Dasar Hukum	➤	Perbadan No. 15 Tahun 2022
Surat Penugasan	➤	Nomor 02/TS.03.03/K/1/2023
Periode Penugasan	➤	4 Januari s.d 31 Desember 2023
Harga Penjualan	➤	<ul style="list-style-type: none">• Wilayah I : Rp 8.300,-/Kg• Wilayah II : Rp 8.600,-/Kg• Wilayah III : Rp 8.900,-/Kg
Saluran Distribusi	➤	Satgas; Pengecer (Pedagang eceran, toko modern, TPK, RPK, Koperasi, dan/atau pedagang eceran lainnya); Distributor; Pemda; BUMN; Perdagangan melalui sistem elektronik
Ketentuan Khusus	➤	Dapat dimixing & proses lain oleh BULOG, Tidak boleh diantar wilayahkan (Provinsi) oleh mitra kecuali atas izin Kantor Pusat

Terima Kasih



LAMPIRAN 4

**MATERI KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DI SEMINAR NASIONAL
PANGAN JAKARTA
"PEMBENAHAN
KEBIJAKAN PANGAN
MENUJU INDONESIA
EMAS"**



Ministry of Finance
Republic of Indonesia

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

16 Maret 2023

Dr. Titik Anas

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral



KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

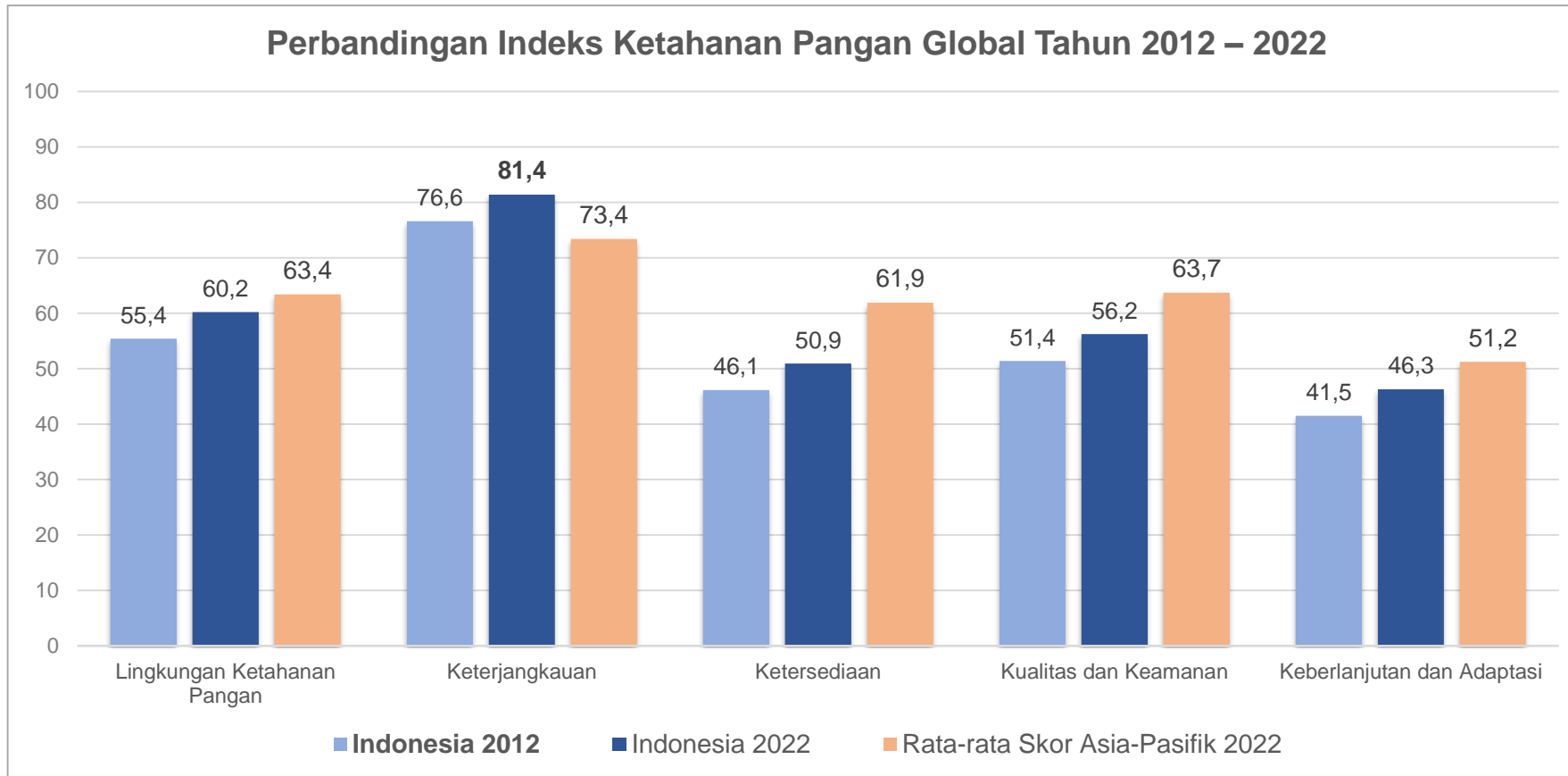


INDONESIA TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

Keterjangkauan pangan terjaga melalui inflasi yang rendah dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran



Namun demikian, masih terdapat banyak perbaikan yang perlu dilakukan pada aspek lain, seperti ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Global dan The Economist, 2022



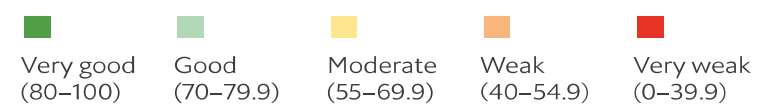
Indeks Ketahanan Pangan Global 2022: Indonesia



Indonesia

Diagram di bawah ini menunjukkan kinerja negara di tahun 2022 (data terakhir tersedia). Skor yang digunakan 0-100, dimana 100 = kondisi terbaik, Δ = perubahan skor dari tahun 2012 ke 2022. ↑ = peningkatan skor, ↓ = penurunan skor, - = tidak terdapat perubahan skor

FOOD SECURITY ENVIRONMENT				60.2	↑	+4.8					
	Score	Δ		Score	Δ						
1 AFFORDABILITY	81.4	↑ +12.4	2 AVAILABILITY	50.9	↑ +3.9	3 QUALITY AND SAFETY	56.2	↓ -2.9	4 SUSTAINABILITY AND ADAPTATION	46.3	↑ +3.3
1.1 Change in average food costs	86.5	↑ +30.0	2.1 Access to agricultural inputs	33.6	↑ +16.8	3.1 Dietary diversity	34.6	↓ -2.2	4.1 Exposure	50.2	↔
1.2 Proportion of population under global poverty line	80.9	↑ +26.6	2.2 Agricultural research & development	25.7	↑ +5.8	3.2 Nutritional standards	61.3	↓ -16.1	4.2 Water	27.6	↔
1.3 Inequality-adjusted income index	55.1	↓ -1.4	2.3 Farm infrastructure	66.2	↑ +42.8	3.3 Micronutrient availability	49.1	↓ -1.5	4.3 Land	47.9	↓ -6.1
1.4 Agricultural trade	78.5	↑ +1.8	2.4 Volatility of agricultural production	85.0	↓ -3.4	3.4 Protein quality	49.1	↑ +7.2	4.4 Oceans, rivers and lakes	67.7	↑ +0.7
1.5 Food safety net programmes	100.0	↔	2.5 Food loss	75.0	↑ +5.9	3.5 Food safety	85.7	↓ -1.8	4.5 Political commitment to adaptation	28.0	↑ +15.3
			2.6 Supply chain infrastructure	42.8	↑ +11.4				4.6 Disaster risk management	61.4	↑ +8.5
			2.7 Sufficiency of supply	32.1	↓ -37.4						
			2.8 Political and social barriers to access	55.3	↑ +3.1						
			2.9 Food security and access policy commitments	47.5	↔						



Source: Global Food Security Index 2022.



DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KETAHANAN PANGAN



DUKUNGAN LUAS PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KETAHANAN PANGAN



Anggaran Ketahanan Pangan (IDR Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tiga Komponen Utama

1. Dukungan dari sisi pasokan
 - Infrastruktur
 - Benih
 - Pupuk
 - Perlengkapan
 - Dukungan teknis (penyuluhan)
2. Cadangan Pangan
3. Stabilisasi Harga

Melalui Pemerintah Pusat dan Daerah



PEMERINTAH JUGA MENYEDIAKAN DUKUNGAN UNTUK KONSUMSI KELOMPOK TERTENTU



Diperuntukan bagi rumah tangga rentan dalam mendukung konsumsi pangan mereka

	(IDR miliar)
a. Program Keluarga Harapan (PKH)	28.709,8
b. Kartu Sembako	45.120,0
Total	73.829,8

2023

Untuk mengurangi *stunting*:

Rp57.600 billion IDR

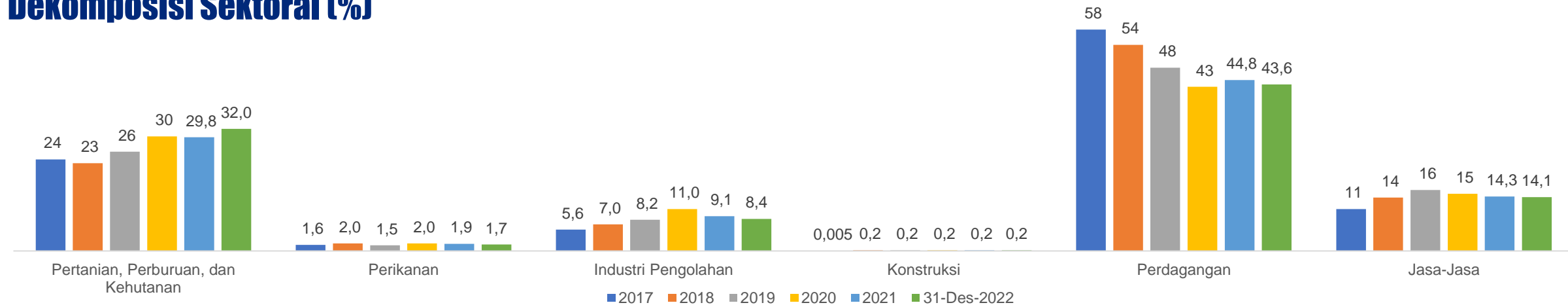


Dukungan Pembiayaan untuk Para Petani



Pada tahun 2022, 32% kredit bersubsidi dialokasikan untuk sektor pertanian.

Dekomposisi Sektoral (%)



Sektor Usaha	KUR Kecil		KUR Mikro		KUR Super Mikro		KUR TKI		Total		%
	Debitur	Rp	Debitur	Rp	Debitur	Rp	Debitur	Rp	Debitur	Rp	
INDUSTRI PENGOLAHAN	32.165	7.905.042.602.014	583.995	22.062.662.779.468	69.717	608.774.030.000	-	-	685.877	30.576.479.411.482	8,4%
KONSTRUKSI	1.839	596.325.050.001	4.575	194.797.400.000	407	3.492.500.000	-	-	6.821	794.614.950.001	0,2%
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	248.544	63.437.805.250.911	2.438.738	92.879.786.028.035	333.938	2.930.032.597.180	-	-	3.021.220	159.247.623.876.126	43,6%
PERIKANAN	8.201	1.823.061.249.317	114.586	4.187.943.098.718	14.356	130.231.220.000	-	-	137.143	6.141.235.568.035	1,7%
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	104.161	23.170.659.341.926	2.484.130	92.085.769.502.263	215.737	1.885.778.760.641	-	-	2.804.028	117.142.207.604.830	32,0%
JASA-JASA	77.831	19.456.735.998.580	790.823	31.334.192.227.291	90.646	796.641.571.439	1.118	26.505.867.400	960.418	51.614.075.664.710	14,1%
Grand Total	472.741	116.389.629.492.749	6.416.847	242.745.151.035.775	724.801	6.354.950.679.260	1.118	26.505.867.400	7.615.507	365.516.237.075.184	100%

*) Jasa-jasa = Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Pendidikan; Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum; Pertambangan Dan Pengalihan; Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan; dan Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi.

Sumber: Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan



KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

1. **KETERSEDIAAN:** MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING MELALUI MODERNISASI, DIVERSIFIKASI DAN EFISIENSI LOGISTIK
2. **MUTU DAN KEAMANAN PANGAN :** MENINGKATKAN KESADARAN DAN PRODUKSI MAKANAN SEHAT; DAN MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3. **KEBERLANJUTAN:** PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG BAIK SERTA MITIGASI RISIKO
4. **KETERJANGKAUAN:** MENGINTEGRASIKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DENGAN KEBIJAKAN PERTANIAN





TERIMA KASIH



Indeks Ketahanan Pangan Global 2022: Indonesia vs Negara-negara Asia Pasifik



2022 Global Food Security Index Ranking

Scores are normalized 0-100, where 100=best conditions

'=' denotes tie in rank

Δ = change in score, 2022 compared with 2012

▲ = Rank improved ▼ = Rank deteriorated ↔ = No change in rank

Sorted by food security environment in 2022, best to worst

Click any country to highlight across all tables. Double-click to show country overview page.

FOOD SECURITY ENVIRONMENT					
Rank / 113			Score	Δ	
6	1	Japan	79.5	4.1	
=14	2	New Zealand	77.8	5.2	
22	0	Australia	75.4	4.6	
=25	24	China	74.2	13.7	
28	-3	Singapore	73.1	4.7	
32	11	Kazakhstan	72.1	9.4	
39	0	South Korea	70.2	7.1	
=41	-9	Malaysia	69.9	5.7	
46	17	Vietnam	67.9	13.4	
63	-1	Indonesia	60.2	4.8	
=64	-3	Thailand	60.1	4.6	
66	-9	Azerbaijan	59.8	2.9	
67	5	Philippines	59.3	7.2	
=68	-1	India	58.9	5.1	
72	6	Myanmar	57.6	8.2	
73	2	Uzbekistan	57.5	7.1	
74	10	Nepal	56.9	11.1	
75	5	Tajikistan	56.7	9.6	
78	11	Cambodia	55.7	11.4	
79	-9	Sri Lanka	55.2	2.3	
80	0	Bangladesh	54.0	6.9	
81	9	Laos	53.1	9	
84	10	Pakistan	52.2	8.7	

1) AFFORDABILITY					
Rank / 113			Score	Δ	
1	14	Australia	93.3	6	
2	0	Singapore	93.2	2.9	
9	4	New Zealand	91.6	4.1	
16	-11	Japan	89.8	0.5	
30	1	Malaysia	87.0	5.4	
33	32	China	86.4	21.4	
38	42	Vietnam	84.0	31.1	
39	8	Thailand	83.7	7.2	
44	17	Indonesia	81.4	12.4	
48	-3	Azerbaijan	78.1	1.3	
49	-4	Kazakhstan	78.0	1.2	
51	2	South Korea	76.8	3.1	
=55	23	Cambodia	74.3	19.7	
60	2	Philippines	71.5	2.7	
72	3	Myanmar	62.1	4.4	
74	-7	Sri Lanka	61.0	-3.2	
=75	12	Pakistan	59.9	12.4	
=77	13	Tajikistan	59.8	13.9	
79	7	Laos	59.7	11.5	
80	-10	India	59.3	-3.2	
=85	-4	Nepal	52.7	0	
=85	-13	Uzbekistan	52.7	-5.3	
87	6	Bangladesh	52.1	7.1	

2) AVAILABILITY					
Rank / 113			Score	Δ	
1	0	Japan	81.2	3.1	
2	21	China	79.2	14.7	
3	29	Singapore	77.8	18	
11	13	South Korea	71.5	8.4	
13	79	Nepal	70.9	28.8	
22	6	New Zealand	67.7	5.9	
=23	56	Kazakhstan	67.2	21.8	
42	-3	India	62.3	5.8	
46	-1	Bangladesh	61.5	6.6	
48	-15	Australia	61.1	1.8	
49	1	Vietnam	60.7	7.1	
56	-15	Malaysia	59.5	3.6	
=61	35	Pakistan	58.3	19.1	
64	25	Sri Lanka	57.2	13.8	
66	15	Uzbekistan	56.4	11.7	
67	2	Tajikistan	56.3	9.1	
68	-11	Azerbaijan	56.2	4.3	
70	2	Philippines	55.2	8.9	
72	8	Cambodia	54.5	9.4	
76	9	Myanmar	53.5	9.6	
=77	-11	Thailand	52.9	4.4	
=81	19	Laos	51.8	15.8	
84	-14	Indonesia	50.9	3.9	

3) QUALITY AND SAFETY					
Rank / 113			Score	Δ	
13	1	Australia	84.0	2.6	
30	18	Japan	77.4	11.2	
=32	-6	Kazakhstan	76.3	0.5	
38	0	Malaysia	74.7	3.3	
=43	-11	New Zealand	73.1	-0.7	
46	7	China	72.0	7.2	
=50	-10	South Korea	71.5	0.6	
53	11	Vietnam	70.2	10.9	
=54	-20	Singapore	69.7	-2.7	
=61	2	Philippines	65.3	5.2	
64	7	Uzbekistan	64.6	8.7	
65	13	Myanmar	64.4	12	
67	8	India	62.1	8.7	
71	26	Bangladesh	58.4	11.6	
72	27	Nepal	57.8	12.8	
=76	-10	Tajikistan	56.5	-2.5	
78	-13	Indonesia	56.2	-2.9	
81	-21	Sri Lanka	55.0	-7.6	
83	3	Azerbaijan	54.5	4.5	
85	18	Cambodia	54.0	9.8	
91	-2	Laos	51.7	2.7	
97	-18	Pakistan	49.4	-2.9	
102	-32	Thailand	45.3	-10.8	

4) SUSTAINABILITY AND ADAPTATION					
Rank / 113			Score	Δ	
=3	2	New Zealand	75.1	11.5	
20	-13	Japan	66.1	3	
22	3	Kazakhstan	65.4	15.2	
33	-10	Australia	58.8	7.6	
=34	40	South Korea	58.5	17.1	
38	39	Uzbekistan	57.9	16.6	
55	-11	China	54.5	8.7	
=57	9	Malaysia	53.7	10.8	
63	31	Tajikistan	53.1	16.4	
=67	-47	Vietnam	52.2	-0.4	
=69	32	Thailand	51.6	17.2	
71	10	India	51.2	11.6	
76	-2	Myanmar	49.0	7.6	
=80	-22	Laos	47.0	4	
83	-25	Indonesia	46.3	3.3	
84	-10	Nepal	46.2	4.8	
87	1	Sri Lanka	45.3	6.8	
91	-33	Azerbaijan	44.6	1.6	
92	-43	Singapore	44.3	-0.5	
93	-21	Bangladesh	43.9	2.2	
97	15	Philippines	41.8	13.7	
106	-4	Pakistan	37.7	3.5	
111	-1	Cambodia	33.9	4.1	

LAMPIRAN 5

**MATERI BADAN PUSAT
STATISTIKA NASIONAL
DI SEMINAR NASIONAL
PANGAN JAKARTA
"PEMBENAHAN
KEBIJAKAN PANGAN
MENUJU INDONESIA
EMAS"**

SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Kondisi, Struktur, Produksi & Potensi

Kamis, 16 Maret 2023

Disampaikan pada
FGD Pembentukan Kebijakan Pangan Menuju
Indonesia Emas



M. Habibullah

Deputi Bidang Statistik Produksi

"Mencatat Pertanian Indonesia
Untuk Kedaulatan Pangan dan
Kesejahteraan Petani"



01

SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Kondisi dan Struktur Pertanian





INDONESIA MEMAINKAN PERAN STRATEGIS DALAM SISTEM PERTANIAN DAN PANGAN GLOBAL



Indonesia sebagai salah satu pasar komoditas pangan terbesar di dunia



Populasi mencapai 270,20 juta jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif (70,72 persen) yang cenderung konsumtif.



Indonesia sebagai produsen utama (main suppliers) global sejumlah komoditas pertanian strategis



Luas lahan baku sawah mencapai 7,46 juta hektar (2019)



Budidaya pertanian melibatkan sekitar 27,68 juta rumah tangga (2018)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indonesia sebagai produsen utama global sejumlah komoditas pertanian strategis:



Sawit

Terbesar ke-1 Dunia 2022^[1]

diikuti oleh Malaysia, Thailand, Colombia



Kakao

Terbesar ke-3 Dunia 2022^[3]

setelah Ivory Coast and Ghana



Beras

Terbesar ke-4 Dunia 2022^[2]

setelah China, India, dan Bangladesh

Sumber:

^[1] <https://www.indexmundi.com/>;

^[2] <https://www.fas.usda.gov/data/>;

^[3] <https://www.fao.org/faostat/>;

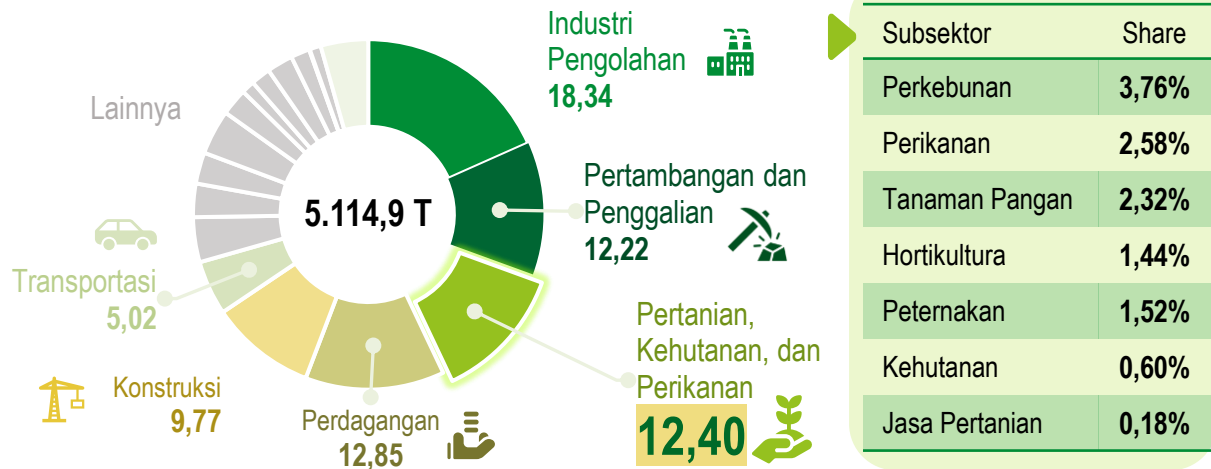


Transformasi sistem pertanian dan pangan Indonesia menentukan masa depan pangan dan pertanian dunia.

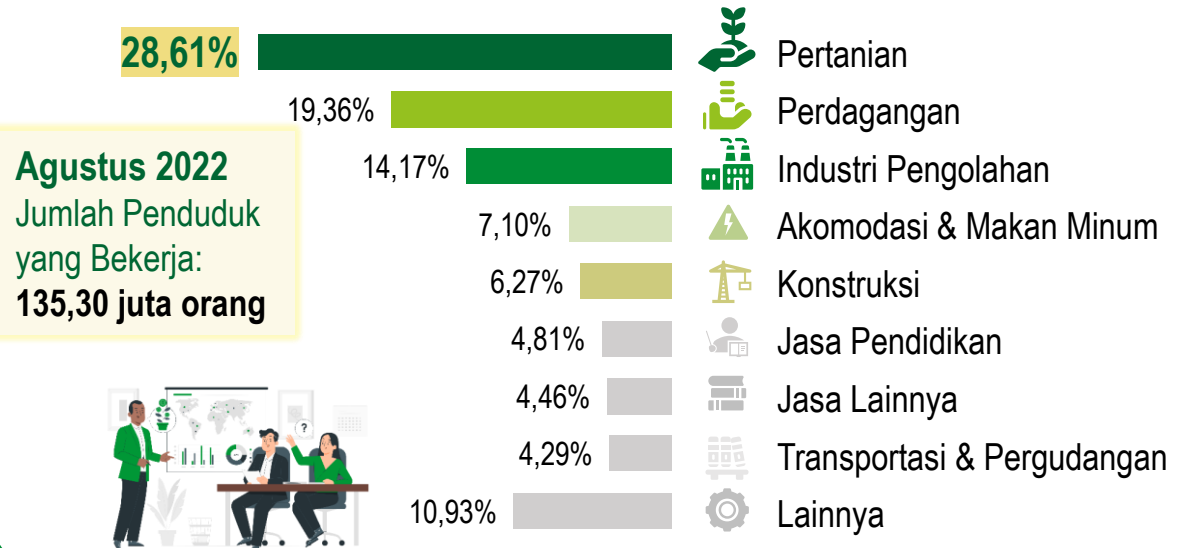
KONDISI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Pertumbuhan, Sumbangan Terhadap Perekonomian, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Kemiskinan

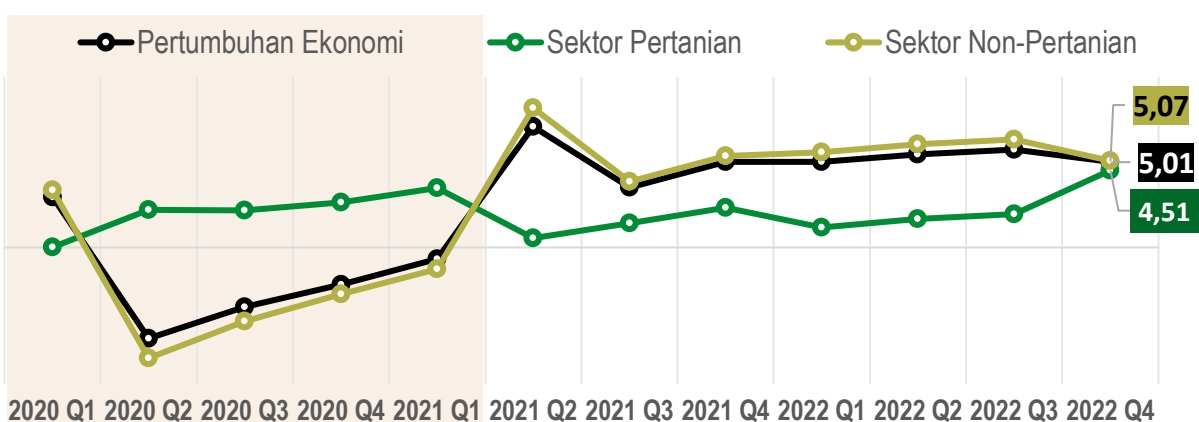
Distribusi PDB ADHB (Berdasarkan Lapangan Usaha, %) Indonesia Tahun 2022



Distribusi Penduduk Bekerja Nasional (%)



Pertumbuhan PDB ADHK (Berdasarkan Lapangan Usaha, %yoy) Indonesia Triwulan I Tahun 2020 – Triwulan IV Tahun 2022



Kondisi Pandemi

Persentase Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama Indonesia, Maret 2022

Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin	Kota	Desa	Total
Tidak Bekerja	12,97%	9,40%	11,03%
Pertanian	28,68%	65,57%	49,89%
Industri	22,93%	11,43%	16,66%
Lainnya	35,42%	11,60%	22,42%
Total	100%	100%	100%

KONDISI PETANI INDONESIA 2018

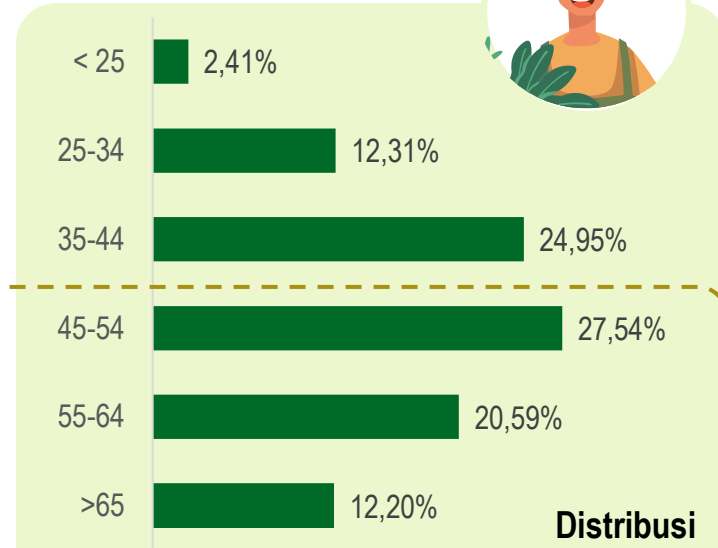
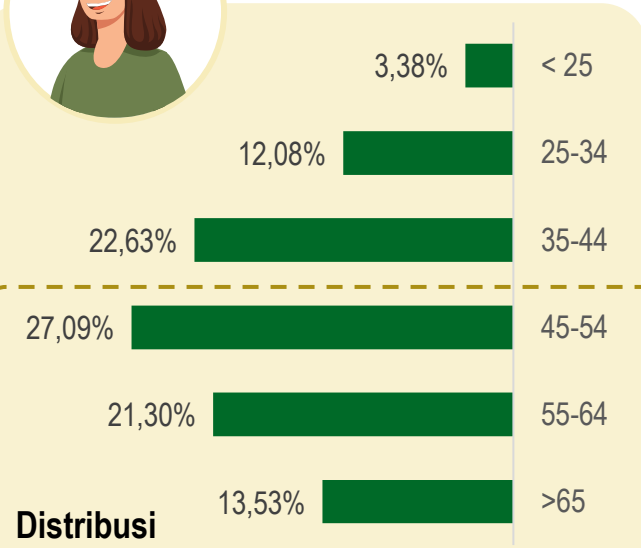
Jenis Kelamin dan Umur

Proporsi Petani Perempuan, 2018

(8,05 juta) **24,04%**

Proporsi Petani Laki-Laki, 2018

75,96% (25,44 juta)



33,49 Juta Petani
di Indonesia 2018

Berdasarkan Hasil SUTAS 2018, petani Indonesia didominasi petani dengan umur 45 tahun ke atas.

Jumlah dan Persentase

Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Subsektor yang diusahakan

27,68 Juta
Rumah Tangga Usaha Pertanian
di Indonesia 2018



Padi
47,52%
(13,16 Juta)



Palawijaya
25,75%
(7,13 Juta)



Hortikultura
36,50%
(10,10 Juta)



Perkebunan
43,62%
(12,07 Juta)



Peternakan
48,99%
(13,56 Juta)



Budidaya Ikan
3,12%
(0,86 Juta)



Penangkapan Ikan
2,82%
(0,78 Juta)



Kehutanan
20,14%
(5,58 Juta)



HASIL SITASI2021

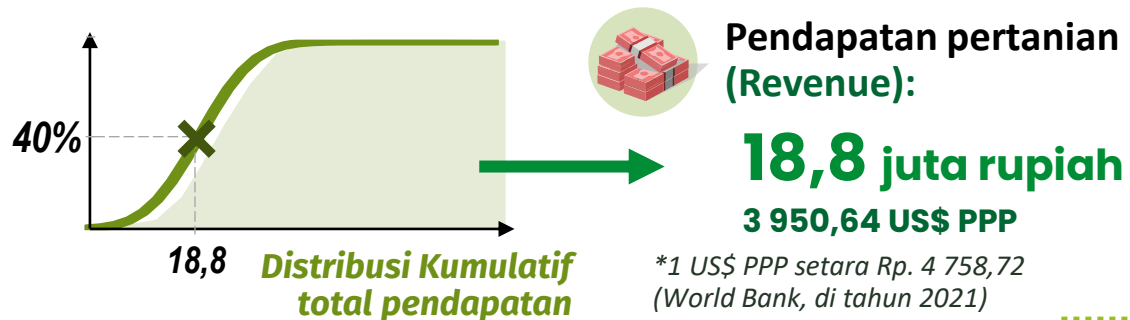
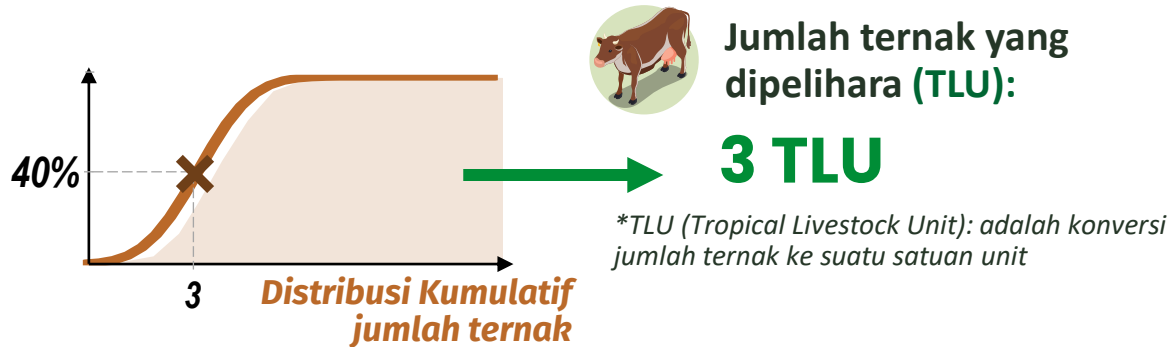
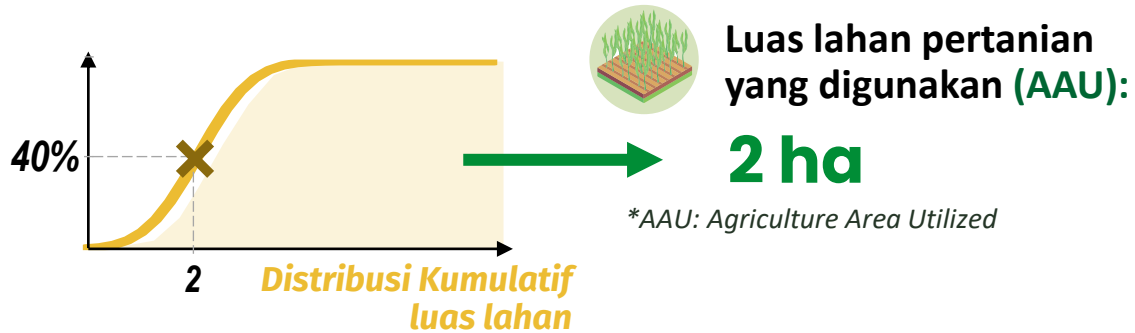
Petani Skala Kecil (*Small Scale Food Producer*)



Ambang Batas (Threshold)

yang dihasilkan SITASI2021 untuk Pengukuran Petani Skala Kecil

Ukuran Fisik



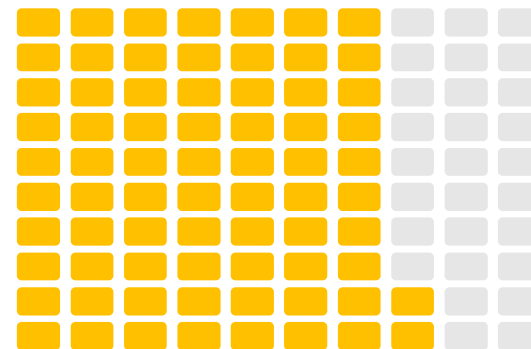
Ukuran Ekonomi

Siapakah *Small Scale Food Producers*?

“Ukuran fisik pertanian adalah luas lahan pertanian (petani) atau jumlah ternak (peternak)”



Unit usaha atau responden dikategorikan sebagai *Small Scale Food Producer* atau Produsen makanan skala kecil jika memenuhi **semua** kategori tersebut di atas.



Persentase Petani Skala Kecil

di Indonesia Tahun 2021:

72,19%





HASIL SITASI2021

Petani Skala Kecil (*Small Scale Food Producer*)



Persentase Petani Skala Kecil

di Indonesia Tahun 2021:

72,19%

20,29% di Pulau Sumatera

Provinsi	%SSP dari Nasional
Aceh	2,32%
Sumatera Utara	4,48%
Sumatera Barat	2,37%
Riau	1,29%
Jambi	1,20%
Sumatera Selatan	2,76%
Bengkulu	0,93%
Lampung	4,31%
Bangka Belitung	0,47%
Kep. Riau	0,15%

4,41% di Pulau Kalimantan

Provinsi	%SSP dari Nasional
Kalimantan Barat	1,65%
Kalimantan Tengah	0,64%
Kalimantan Selatan	1,56%
Kalimantan Timur	0,45%
Kalimantan Utara	0,11%

6,89% di Pulau Sulawesi

Provinsi	%SSP dari Nasional
Sulawesi Utara	0,78%
Sulawesi Tengah	1,08%
Sulawesi Selatan	3,14%
Sulawesi Tenggara	0,86%
Gorontalo	0,38%
Sulawesi Barat	0,66%

58,18% di Pulau Jawa

Provinsi	%SSP dari Nasional
DKI Jakarta	0,07%
Jawa Barat	14,85%
Jawa Tengah	18,13%
DI Yogyakarta	2,25%
Jawa Timur	20,08%
Banten	2,80%

7,45% di Pulau Bali dan Nusra

Provinsi	%SSP dari Nasional
Bali	1,52%
NTB	2,33%
NTT	3,60%

2,78% di Pulau Maluku dan Papua

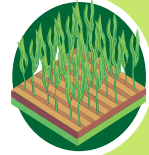
Provinsi	%SSP dari Nasional
Maluku	0,67%
Maluku Utara	0,35%
Papua Barat	0,32%
Papua	1,44%





HASIL SITASI 2021

Indikator SDGs 2.3.1



rata-rata **BUKAN** Petani Skala Kecil di Indonesia per hari kerja dapat menghasilkan:

Rp 506.983
≈ 106,54 US\$ PPP

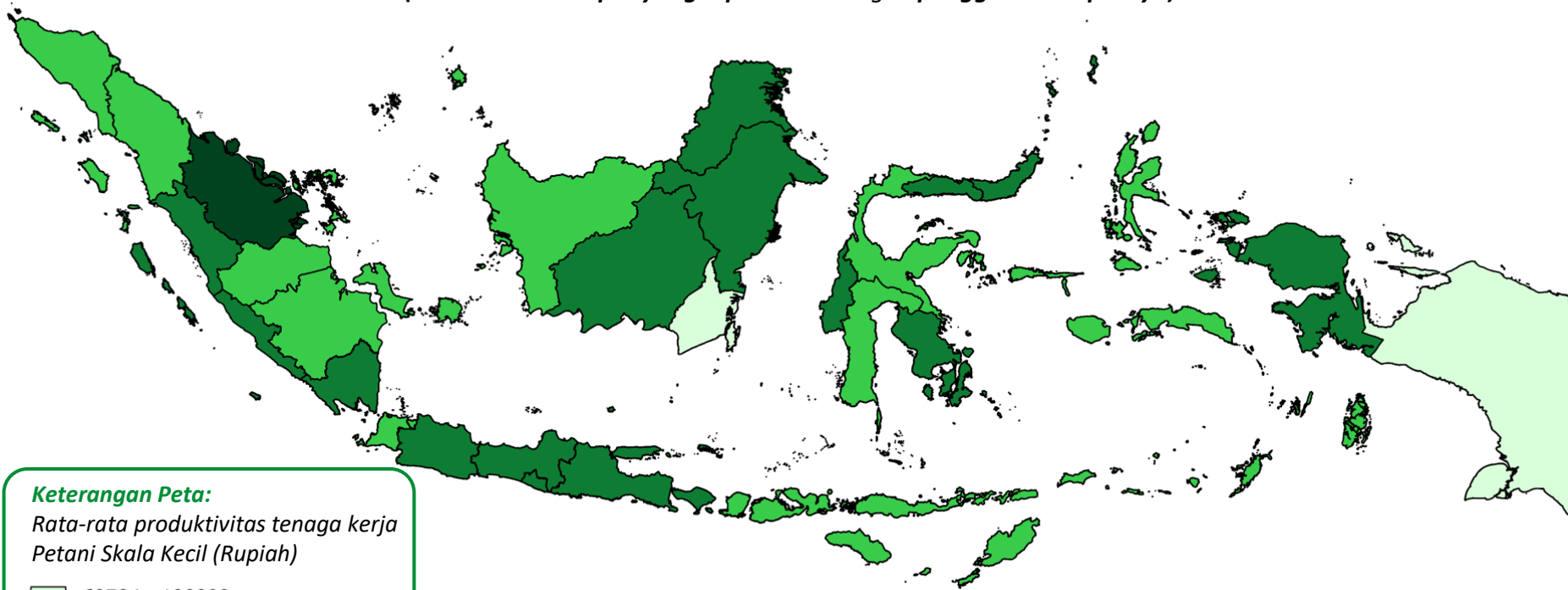


Rata-rata **Petani Skala Kecil** di Indonesia per hari kerja dapat menghasilkan:



Rp 215.650
≈ 45,32 US\$ PPP

Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Petani Skala Kecil menurut Provinsi (Rasio antara output yang diproduksi dengan penggunaan inputnya)



Keterangan Peta:

Rata-rata produktivitas tenaga kerja Petani Skala Kecil (Rupiah)

60584 - 100000
100000 - 200000
200000 - 300000
300000 - 310747

5 Provinsi dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja Petani Skala Kecil **tertinggi**

Provinsi	Pendapatan SSP per hari kerja
Riau	Rp 310.747
Jawa Tengah	Rp 298.893
Lampung	Rp 297.295
Kalimantan Utara	Rp 286.096
Bengkulu	Rp 270.930

5 Provinsi dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja Petani Skala Kecil **terendah**

Provinsi	Pendapatan SSP per hari kerja
Papua	Rp 60.584
Kalimantan Selatan	Rp 87.797
DKI Jakarta	Rp 105.385
Sulawesi Tengah	Rp 110.190
NTT	Rp 116.543



HASIL SITASI 2021

Indikator SDGs 2.3.2



Rata-rata pendapatan bersih dari
BUKAN petani skala kecil
Rp 22,98 juta \approx 4.829,18 US\$ PPP
dalam setahun

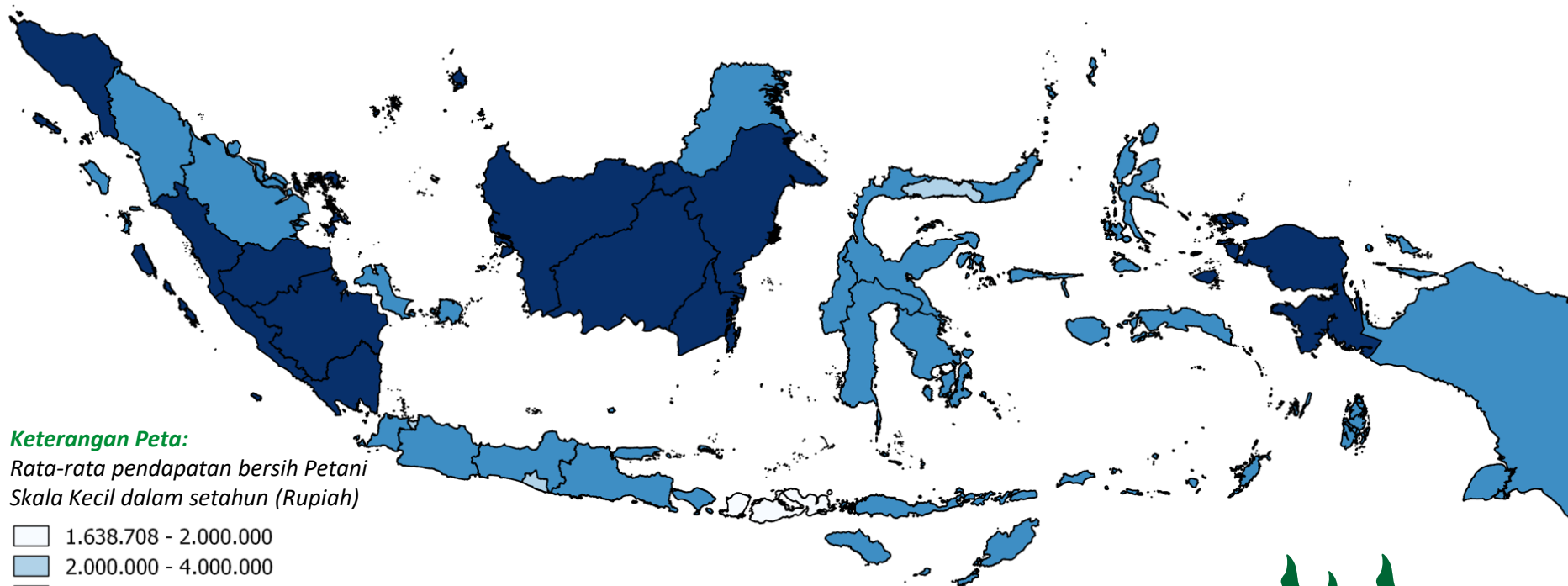


Rata-rata pendapatan bersih dari **petani skala kecil**

Rp 5,23 juta \approx 1.099,88 US\$ PPP

dalam setahun

Rata-rata Pendapatan Bersih Petani Skala Kecil dalam Setahun menurut Provinsi



Keterangan Peta:

Rata-rata pendapatan bersih Petani Skala Kecil dalam setahun (Rupiah)

1.638.708 - 2.000.000
2.000.000 - 4.000.000
4.000.000 - 6.000.000
6.000.000 - 7.973.787

5 Provinsi dengan rata-rata pendapatan bersih per tahun Petani Skala Kecil **tertinggi**

Provinsi	Pendapatan Bersih SSP per tahun
Lampung	Rp 7.973.787
Bengkulu	Rp 7.916.390
Kalimantan Barat	Rp 7.527.884
Kalimantan Tengah	Rp 7.472.073
Sumatera Barat	Rp 6.846.449

5 Provinsi dengan rata-rata pendapatan bersih per tahun Petani Skala Kecil **terendah**

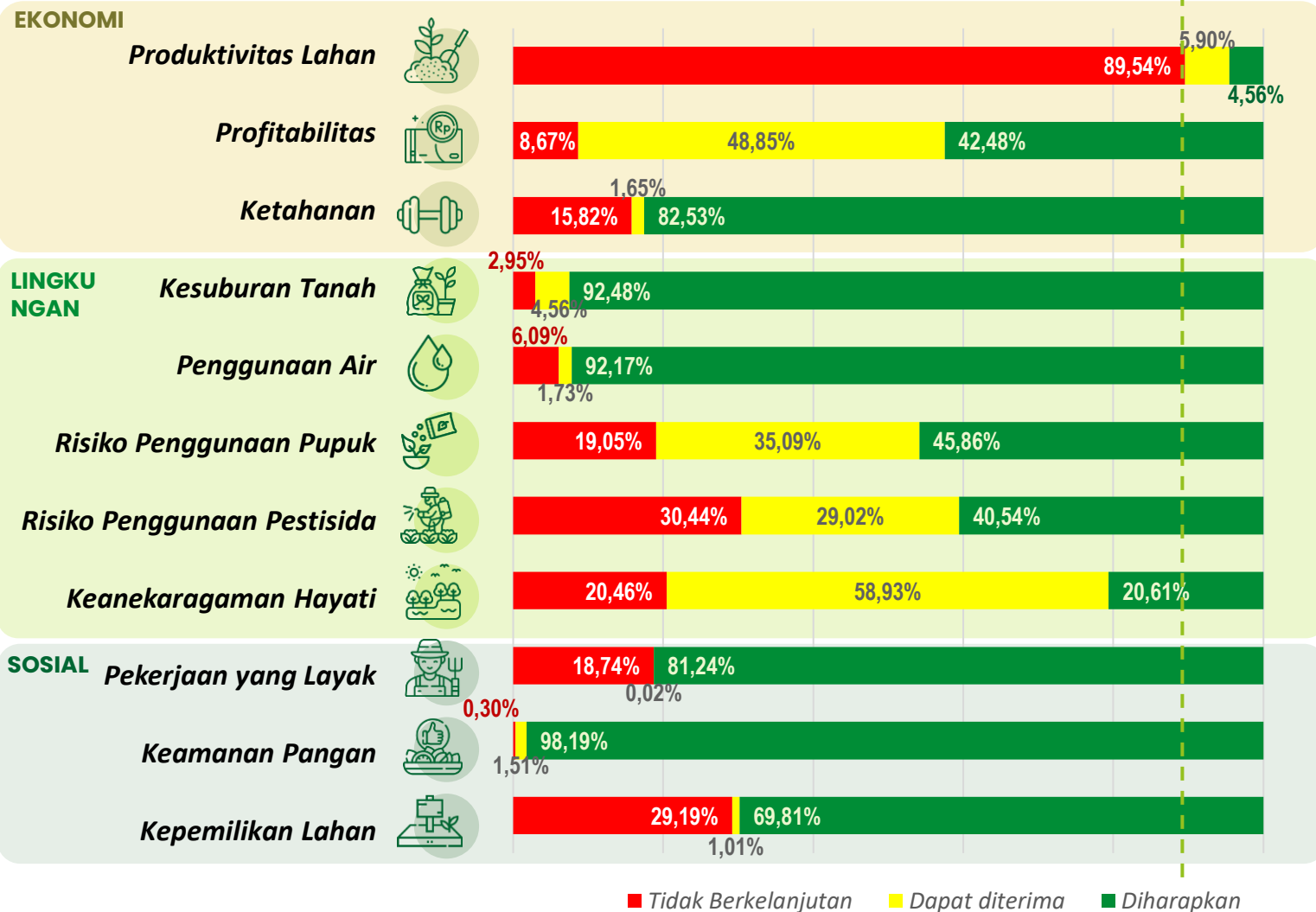
Provinsi	Pendapatan Bersih SSP per tahun
NTB	Rp 1.638.708
DKI Jakarta	Rp 2.373.501
Gorontalo	Rp 2.738.305
DI Yogyakarta	Rp 3.744.543
Maluku	Rp 4.238.753



HASIL SITASI 2021

Indikator SDGs 2.4.1

Proporsi lahan pertanian yang pengelolaannya di bawah batas kriteria produktif dan pertanian berkelanjutan



89,54%



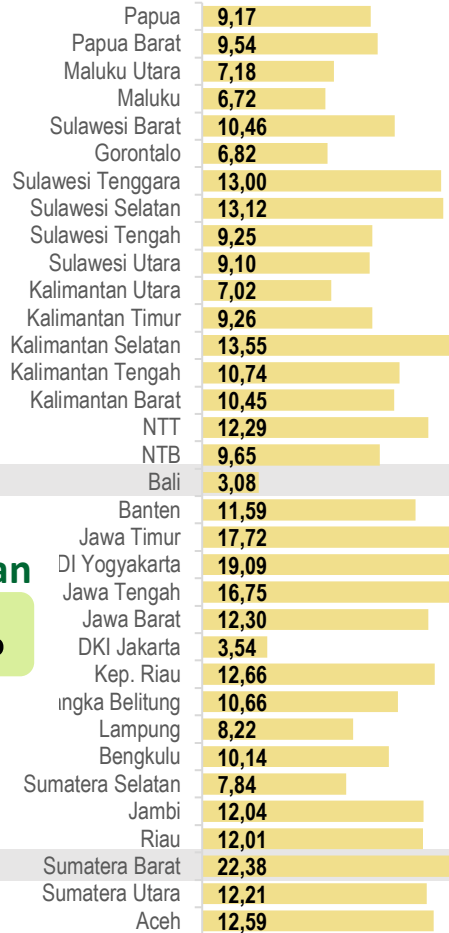
Sebesar **89,54%** penggunaan lahan pertanian di Indonesia dikategorikan sebagai **di bawah standar** produktivitas pertanian yang menjamin pertanian berkelanjutan



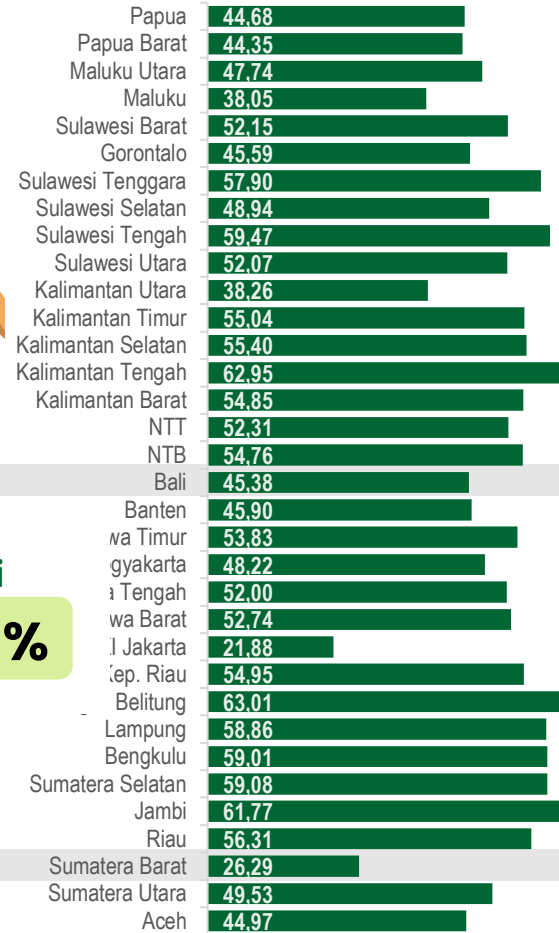


HASIL SITASI2021

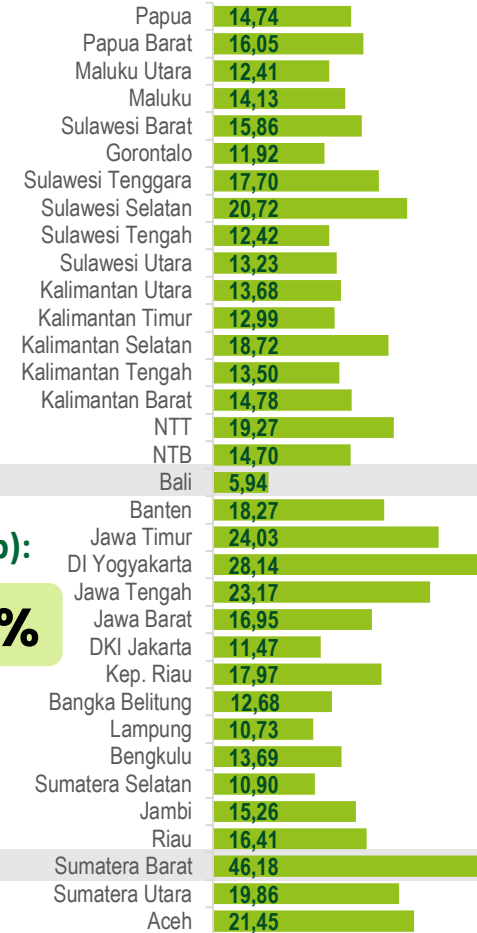
Indikator SDGs 5.a.1



5.a.1 (a):
Perempuan
13,61%



5.a.1 (a):
Laki-laki
52,09%



5.a.1 (b):
19,65%

Presentase penduduk dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian (dari total populasi pertanian), berdasarkan jenis kelamin.

Komposisi pengelola perempuan atau pemegang hak atas lahan pertanian, berdasarkan jenis kepemilikan.

Di Sumatera Barat, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan hak yang aman atas lahan pertanian relatif sangat kecil. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Sumatera Barat menganut sistem **matrilineal**

Di Bali, hanya sedikit perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian. Kecilnya kepemilikan lahan oleh perempuan di Bali dikarenakan budaya yang berlaku di Bali bahwa masyarakat Bali menganut sistem **patriarki**



02

PRODUKSI PERTANIAN INDONESIA

Padi dan Beras



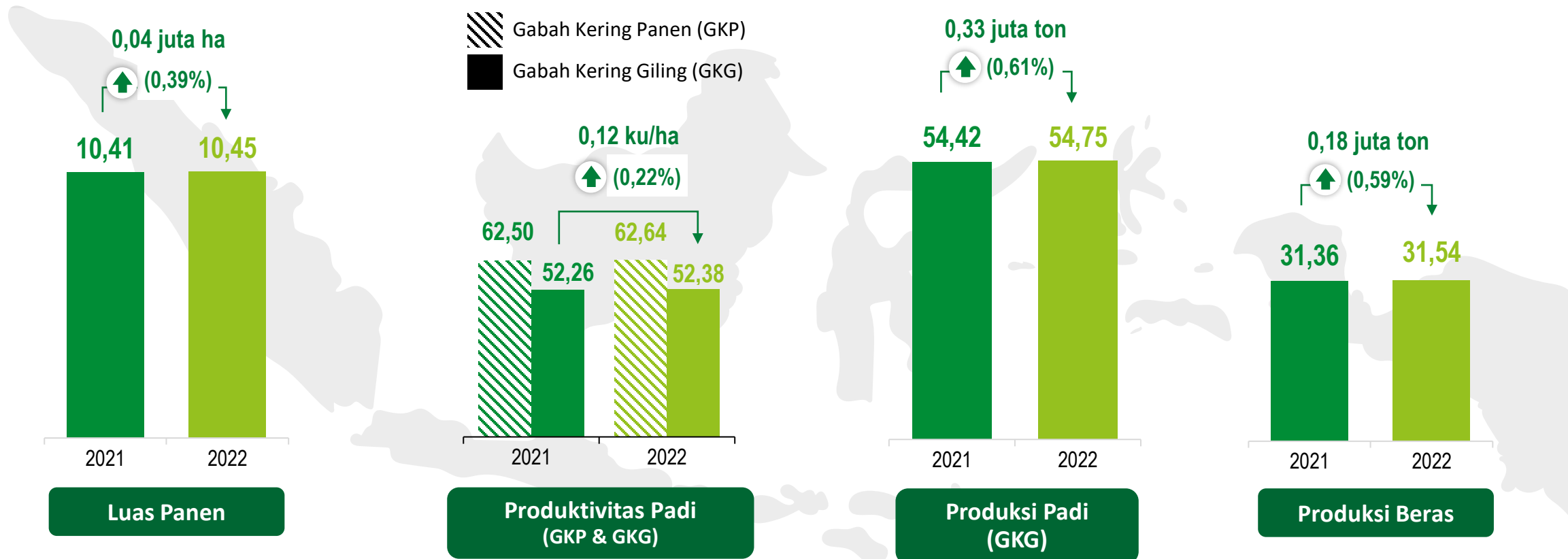


LUAS PANEN, PRODUKSI, DAN PRODUKTIVITAS PADI (GKG) NASIONAL

Angka Tetap Tahun 2022 (Hasil KSA Padi Amatan Januari 2022)



Kondisi Luas Panen, Produktivitas (GKP & GKG), Produksi Padi (GKG), Produksi Beras Nasional Tahun 2021-2022





PRODUKTIVITAS PADI (ku/ha GKG)

Tahun 2022 Menurut Provinsi (Angka Tetap)

Sumatera

Produktivitas GKG Tertinggi:
Prov. Aceh (55,55 ku/ha)

Kalimantan

Produktivitas GKG Tertinggi:
Prov. Kalimantan Selatan (38,13 ku/ha)

Sulawesi

Produktivitas GKG Tertinggi:
Prov. Gorontalo (51,29 ku/ha)

Maluku & Papua

Produktivitas GKG Tertinggi:
Prov. Papua Barat (43,89 ku/ha)

Jawa

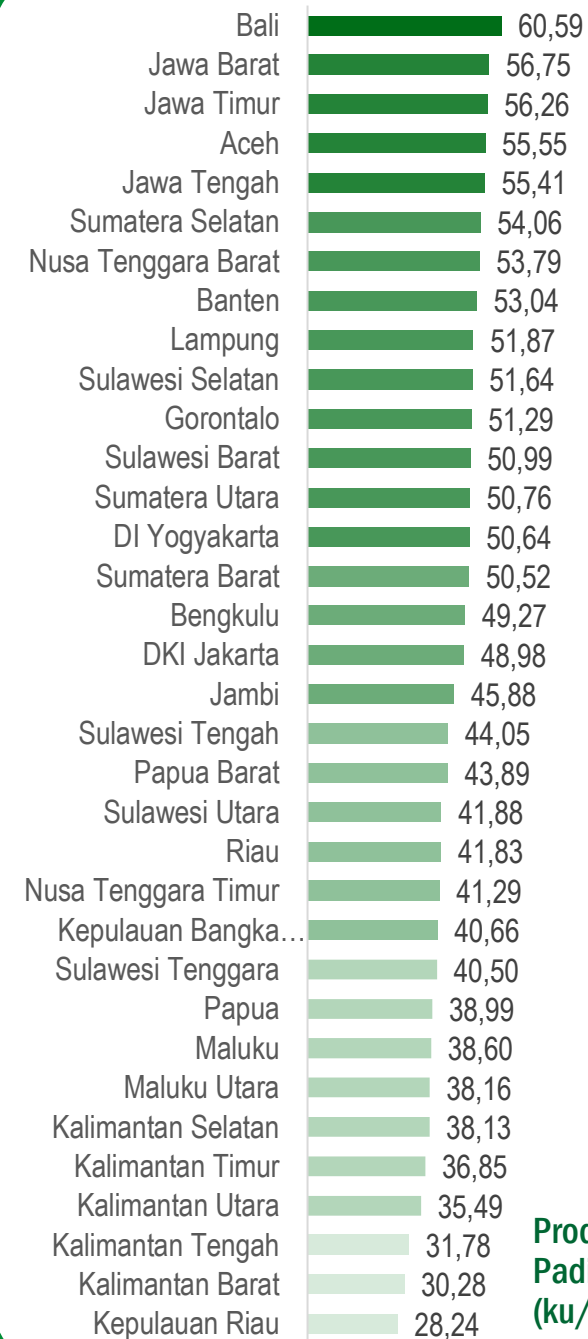
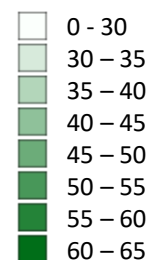
Produktivitas GKG Tertinggi:
Prov. Jawa Barat (56,75 ku/ha)

Bali & Nusa Tenggara

Produktivitas GKG Tertinggi:
Prov. Bali (60,59 ku/ha)

Keterangan warna peta:

Produktivitas Padi GKG (ku/ha)



Produktivitas
Padi
(ku/ha GKG)

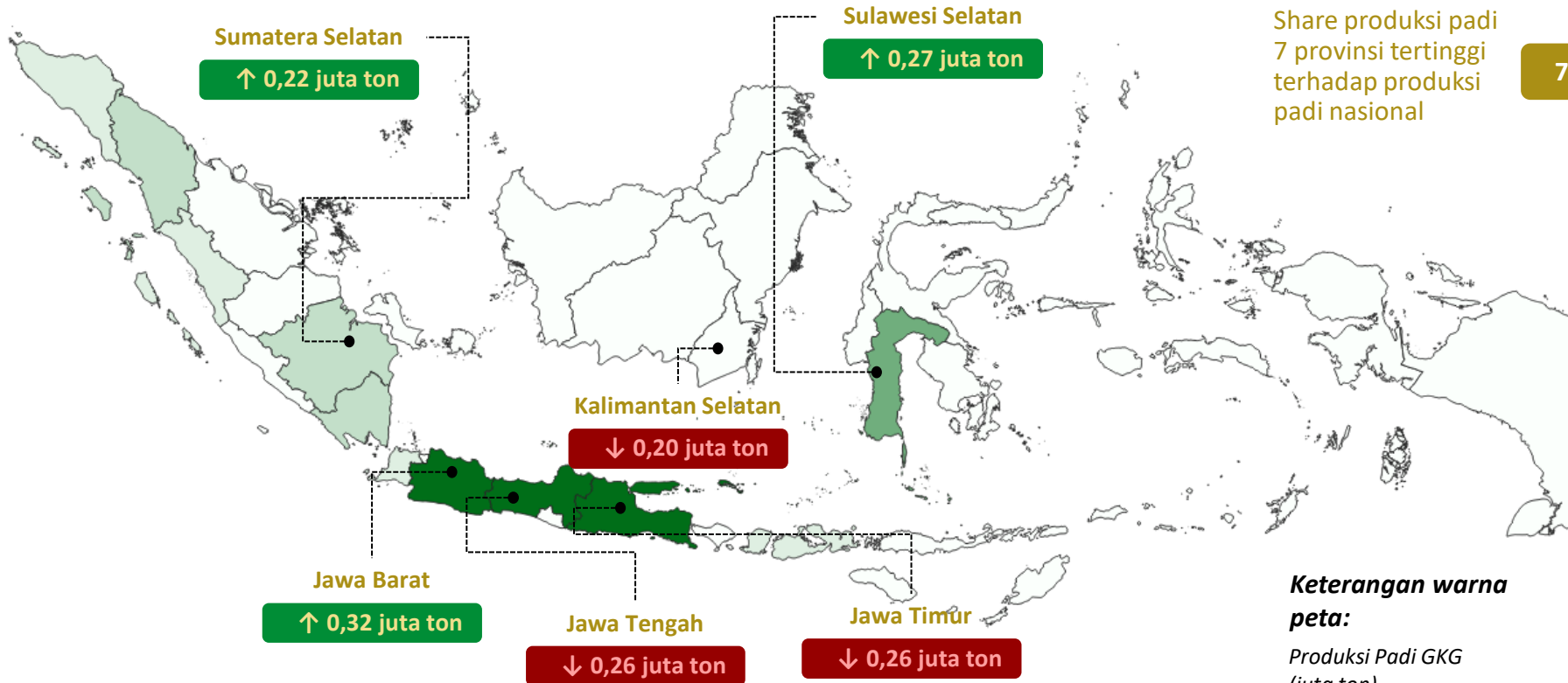
Provinsi dengan produktivitas padi di atas 50 ku/ha GKG mayoritas berada di pulau Jawa, Bali, beberapa di Sumatera, dan Sulawesi





PRODUKSI PADI (Juta Ton GKG)

Tahun 2022 Menurut Provinsi (Angka Tetap)



Share produksi padi 7 provinsi tertinggi terhadap produksi padi nasional

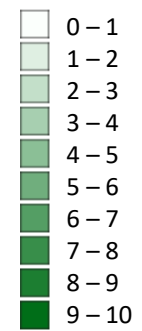
75,30%

Provinsi	Produksi Padi (juta ton GKG)
Jawa Timur	9,53
Jawa Barat	9,43
Jawa Tengah	9,36
Sulawesi Selatan	5,36
Sumatera Selatan	2,78
Lampung	2,69
Sumatera Utara	2,09
Banten	1,79
Aceh	1,51
Nusa Tenggara Barat	1,45
Sumatera Barat	1,37
Kalimantan Selatan	0,82
Nusa Tenggara Timur	0,76
Sulawesi Tengah	0,74
Kalimantan Barat	0,73
Bali	0,68
DI Yogyakarta	0,56
Sulawesi Tenggara	0,48
Sulawesi Barat	0,35
Kalimantan Tengah	0,34
Bengkulu	0,28
Jambi	0,28
Sulawesi Utara	0,24
Gorontalo	0,24
Kalimantan Timur	0,24
Riau	0,21
Papua	0,19
Maluku	0,09
Kep Bangka Belitung	0,06
Kalimantan Utara	0,03
Maluku Utara	0,02
Papua Barat	0,02
DKI Jakarta	0,00
Kepulauan Riau	0,00

Produksi Padi (juta ton GKG)

Keterangan warna peta:

Produksi Padi GKG (juta ton)



↑ 3 provinsi dengan peningkatan produksi padi tertinggi dibanding 2021

↓ 3 provinsi dengan penurunan produksi padi tertinggi dibanding 2021

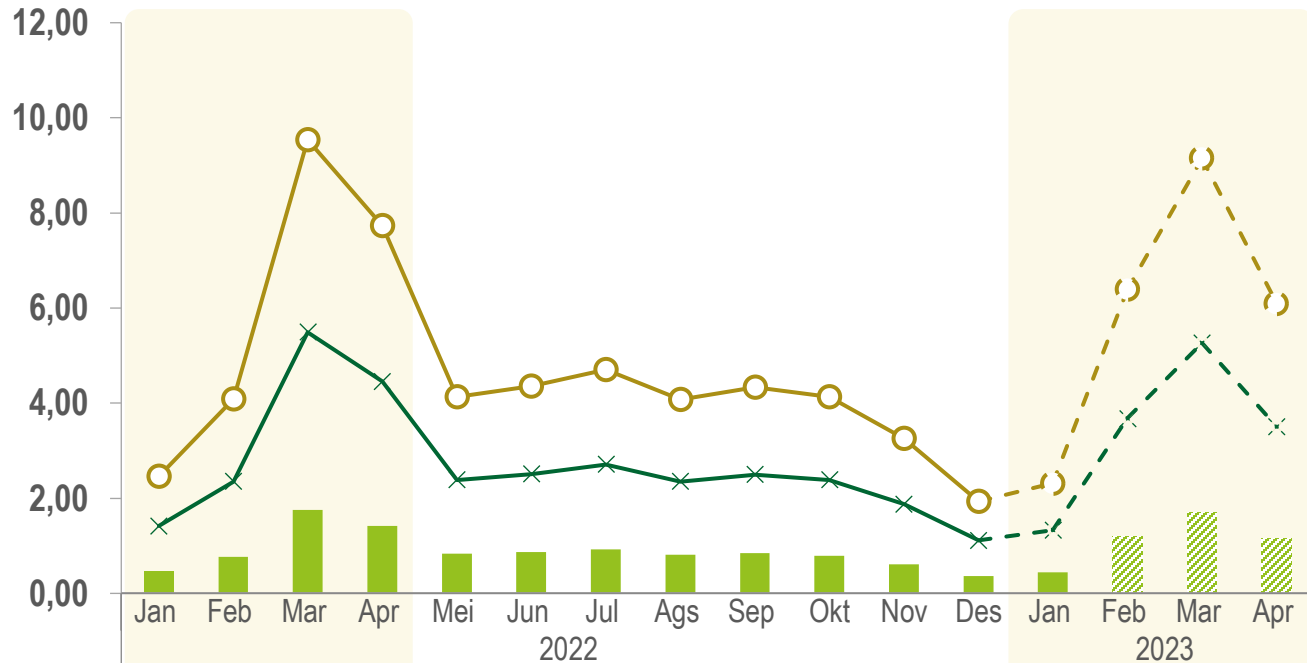


Sekitar 75% produksi padi nasional disumbang oleh 7 provinsi dengan produksi padi tertinggi tertinggi yakni Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Lampung, dan Sumut.

POTENSI LUAS PANEN, PRODUKSI PADI DAN BERAS INDONESIA FEB-APR 2023

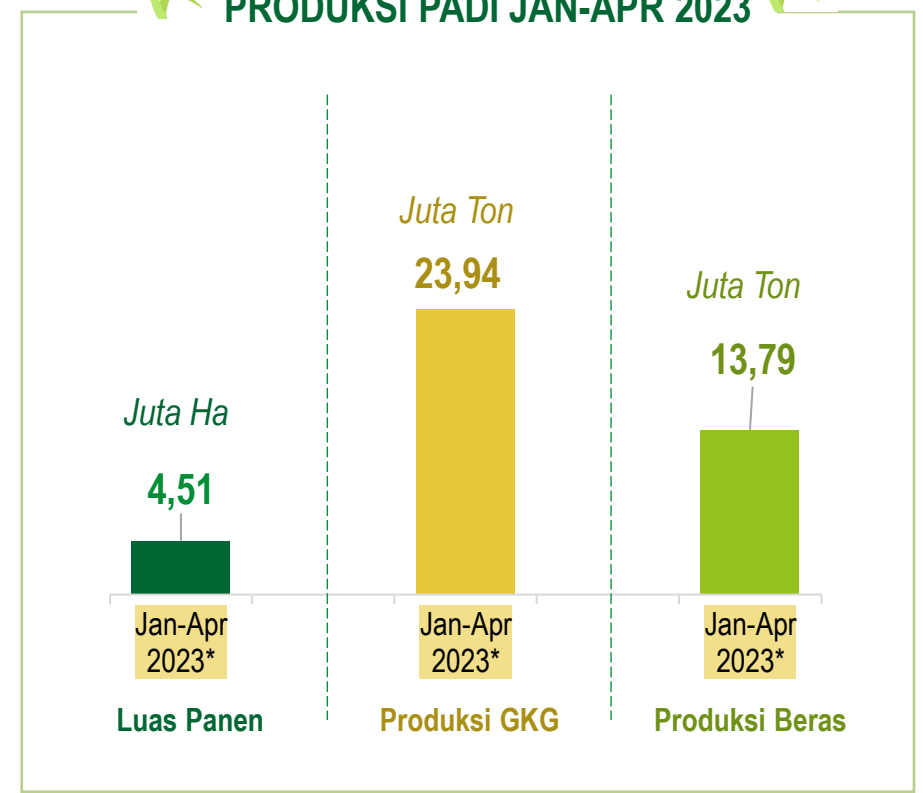


Berdasarkan KSA Amatan Januari 2023



■ Luas Panen	0,47	0,77	1,76	1,42	0,83	0,87	0,93	0,81	0,84	0,79	0,61	0,36	0,45	1,20	1,71	1,15
—×— Produksi Beras	1,42	2,35	5,49	4,45	2,38	2,51	2,71	2,35	2,50	2,38	1,88	1,11	1,33	3,68	5,27	3,51
—○— Produksi Padi (GKG)	2,46	4,08	9,54	7,74	4,13	4,36	4,71	4,08	4,34	4,13	3,25	1,93	2,31	6,39	9,15	6,09

TOTAL LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI JAN-APR 2023



- **Luas panen** Feb – Apr 2023 merupakan angka potensi, diperkirakan berdasarkan Fase Standing Crops Amatan KSA Januari 2023 (Fase Generatif, Fase Vegetatif Akhir, Fase Vegetatif Awal).
- **Produksi padi dan beras** Jan-Apr 2023 adalah angka sementara karena menggunakan angka luas panen Jan 2023 dan potensi luas panen Feb-Apr 2023 serta rata-rata produktivitas SR I 2018-2022.
- **Produksi Beras** diperoleh berdasarkan Konversi GKP ke GKG serta GKG ke Beras (Hasil SKGB 2018 per provinsi) dan menggunakan angka konversi susut/tercecer gabah berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2018-2020

INFORMASI KSA: POLA PANEN PADI TIAP PROVINSI

JANUARI 2022 – APRIL 2023* (Ribu Ha)

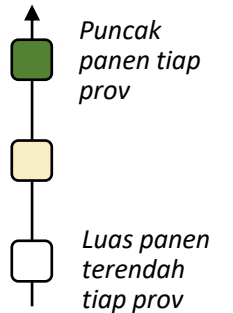


*Angka feb-apr 2023 merupakan angka potensi panen.

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Mei 22	Jun 22	Jul 22	Ags 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Des 22	Jan 23	Feb 23*	Mar 23*	Apr 23*
JAWA TIMUR		111.18	397.03	243.68	99.60	155.79	203.02	121.08	78.33	82.19	93.29	98.97	231.36	375.40	166.36	
JAWA TENGAH	63.47	176.24	350.30	163.18	106.88	216.01	216.71	127.04	68.92	84.26	71.75		98.80	292.52	276.66	110.69
JAWA BARAT		83.26	262.76	222.17	118.69	139.91	190.21	140.21	137.01	123.57	103.29		84.53	143.25	251.28	196.92
SULAWESI SELATAN	16.83		134.97	199.36	90.32			124.56	174.67	105.47	68.09			48.41	161.74	152.31
LAMPUNG		21.60	66.00	115.93	68.13	18.41	15.36	26.43	76.07	63.65	26.85	11.96		26.93	89.25	95.59
SUMATERA SELATAN	43.38	77.48	74.14	56.82	35.10	40.89	36.42	52.08	42.48	32.80	15.95		24.33	83.36	80.35	51.95
SUMATERA UTARA	37.32	44.03	53.39	32.37	24.95	48.80	29.73	32.41	31.87	38.26	23.83		25.86	61.51	43.18	49.88
BANTEN		41.06	59.59	34.92	14.03	31.89	31.34	25.63	39.33	32.13	10.99		17.85	48.61	62.79	17.66
SUMATERA BARAT	27.26	26.26	28.68	25.40	22.24	22.90	23.31	15.97		29.10	20.70	19.76	25.67	31.79	40.07	22.53
ACEH	6.26	15.40	38.69	56.34	30.94	15.61	11.01		9.41	23.61	40.39	17.04	12.35	24.01	38.60	38.97
NUSA TENGGARA BARAT		9.06	84.41	67.86	21.18	17.39	24.39	10.48	7.46	9.06	8.17			36.40	77.78	50.17
KALIMANTAN BARAT	25.07	40.25	57.86	24.49		11.13	17.99	15.72	15.50	12.51		8.99	26.96	49.04	43.88	13.11
KALIMANTAN SELATAN			12.76	19.22	19.91	17.41	9.45	35.43	41.41	33.06	20.99	9.34		4.11	18.83	29.23
NUSA TENGGARA TIMUR		9.55	17.65	30.45	59.44	18.25	7.32	9.77	9.02	11.01	9.90	7.40	5.35	5.36	20.53	43.92
SULAWESI TENGAH	11.53		5.86	17.24	31.25	17.93	7.04		11.00	26.77	23.01	9.21	6.99	11.04	16.46	19.02
SULAWESI TENGGARA	7.80		4.36	12.61	18.65	12.82	9.02	5.14	6.38	17.25	13.32	8.61	10.49	5.13	5.15	11.83
BALI	7.10		9.27	18.31	14.30	7.61	6.40	7.63	7.40	8.11	11.43	9.06	6.82	7.51	11.62	14.84
DI YOGYAKARTA	5.92	24.20	20.42	8.33	5.74	15.45	12.03	5.23		3.84	3.17	3.67	9.23	26.23	15.34	5.15
KALIMANTAN TENGAH		4.98	10.95	14.12	7.56	4.69	5.85	17.59	21.32	15.16	4.19			8.85	14.11	16.24
SULAWESI BARAT	7.46	5.08	7.40	6.53		7.19	5.82	6.40		5.97	5.03	4.91	5.16	5.49	7.11	5.19
KALIMANTAN TIMUR	3.91	7.08	14.72	6.29	7.41		7.34	6.43	13.73	5.47	1.73		10.08	6.64	15.71	6.30
JAMBI	3.80	5.45	9.02	5.13		3.82	4.45	3.26	7.11	7.13	4.32	5.14	3.83	6.01	7.64	3.39
SULAWESI UTARA	4.82	3.89	5.97	6.52	4.37	5.01	5.80		4.51	4.87	4.46	5.05		5.25	5.10	6.32
BENGKULU	6.63	5.17	6.54	8.30	6.27	3.66	2.85		7.34	3.29	6.20	4.17	3.65	7.79	9.66	6.58
RIAU	3.97	7.84	10.72	2.46		2.37	6.09	2.69	2.41	2.78	3.93	4.91	3.45	10.25	5.18	3.37
PAPUA	1.19		4.06	13.53	4.88		3.53	8.97	7.37	1.65	2.26	1.07	3.32	4.82	6.26	4.89
GORONTALO	6.28	4.63	3.60	4.09	3.68	4.48	5.91	3.63	3.19	3.44	3.59	3.36	9.44	4.04		4.18
MALUKU	2.53	2.50	4.56	1.92	1.05	2.77	1.12	2.20	2.38	1.45	0.95		0.96	3.48	1.79	1.77
KEP. BANGKA BELITUNG	0.94	1.16	0.41	0.82	3.92	1.58	0.34		0.25	2.10	2.03	1.52	0.96	0.71	0.54	3.39
KALIMANTAN UTARA	2.69	1.87	1.10	0.25	0.30	0.38	0.45	0.30	0.34	0.12		0.79	1.83	1.72	0.50	0.18
MALUKU UTARA	1.16	1.45	0.65	0.25	0.28	0.53	0.82	0.79	0.20	0.19			0.39	1.73	0.66	0.52
PAPUA BARAT		0.48	1.21	0.42	0.47	0.98		0.76	0.84	0.29	0.71	0.15	0.45	0.84	0.21	0.35
DKI JAKARTA	0.13		0.05	0.04	0.02	0.04	0.13	0.04	0.06	0.01	0.02		0.16		0.04	0.04
KEPULAUAN RIAU	0.02	0.01	0.03	0.03	0.06	0.04	0.01	0.01		0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02

Keterangan:

Luas Panen Padi



Provinsi diurutkan berdasarkan luas panen tertinggi 2022.

KONSUMSI PER KAPITA SEBULAN DI RUMAH TANGGA (NASIONAL)

Berdasarkan Susenas



Kelompok Komoditas	Satuan	Konsumsi Perkapita Sebulan Rumah Tangga					
		Susenas Mar 2018	Susenas Mar 2019	Susenas Mar 2020	Susenas Mar 2021	Susenas Mar 2022	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Beras (beras lokal, kualitas unggul, impor)	Kg	6,628	6,446	6,451	6,700	6,661	↓
Jagung basah dengan kulit	Kg	0,126	0,167	0,216	0,146	0,136	↓
Jagung pipilan/beras jagung/jagung	Kg	0,082	0,072	0,063	0,069	0,060	↓
Ketela pohon/singkong	Kg	0,389	0,359	0,397	0,508	0,454	↓
Ketela rambat/ubi jalar	Kg	0,258	0,263	0,252	0,304	0,279	↓
Tepung terigu	Kg	0,217	0,208	0,202	0,234	0,226	↓
Mie instan	80gr	3,836	3,684	3,626	3,963	4,087	↑
Mie bakso, mie rebus, mie goreng	Porsi	2,584	2,545	2,432	2,266	2,227	↓



- Hasil Susenas Maret 2020-2022
- Tidak termasuk Luar Rumah Tangga seperti Hotel, Rostaurant, Katering



03

Tantangan yang Dihadapi
dan bagaimana Sensus Pertanian 2023
dalam menjawab tantangan



ANCAMAN KRISIS PANGAN

dan Isu Pertanian Global-Nasional yang akan Dihadapi



Atensi terhadap isu krisis pangan semakin meningkat

... situasi global perlu disikapi oleh para gubernur, di antaranya krisis energi, krisis pangan, dan perang...

Pengarahan ke Gubernur Seluruh Indonesia (13/3/22)

...19.600 orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di dunia kondisi tahun depan akan lebih parah...

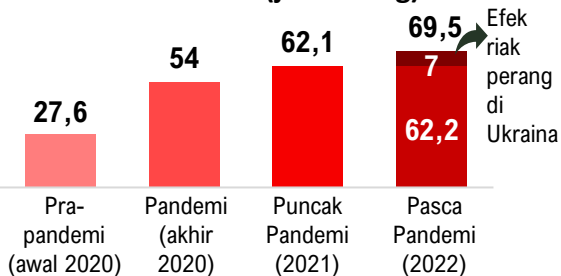
BUMN Start-up Day (26/9/22)

... ketidakpastian global menimbulkan krisis pangan... tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap...

Pengarahan oleh Presiden (29/9/22)

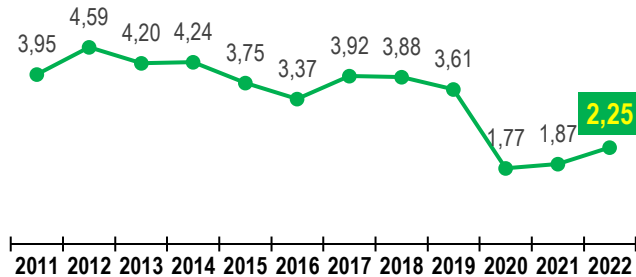
Konflik Ruisa - Ukraina memberi ripple effect yang berdampak pada krisis pangan

Jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan di Asia Pasifik (juta orang)



Pertumbuhan Sektor Pertanian masih di bawah level pra-pandemi

Series Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia (c-to-c, %)



Sumber: BPS, Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Isu Kunci Pertanian Global*



Ketahanan pangan (food security)



Kualitas dan keamanan pangan (nutrition)



Keberlanjutan (sustainability)

*) Sumber: The Future of Food and Agriculture – Alternative Pathways to 2050, FAO



Isu Pertanian Nasional

- Pengetahuan dan adopsi teknologi yang masih rendah
- Tekanan permintaan pangan domestik terus meningkat
- Dukungan sarana dan prasarana produksi belum optimal
- Lemahnya implementasi food losses dan waste management

- Prevalensi stunting dan gizi buruk masih relatif tinggi di sejumlah wilayah

- Ageing farmers & regenerasi petani
- Dominasi pertanian skala kecil dan tidak berkelanjutan
- Konversi lahan pertanian
- Dampak perubahan iklim
- Kesejahteraan petani



POTENSI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA

TANTANGAN

1 *Kualitas SDM pertanian*

- *Ageing farmers & regenerasi petani*
- Dominasi pertanian skala kecil dan tidak berkelanjutan
- Pengetahuan dan adopsi teknologi yang masih rendah

2 *Produksi pertanian*

- Konversi lahan pertanian
- Tekanan permintaan pangan domestik terus meningkat
- Dukungan sarana dan prasarana produksi belum optimal
- Lemahnya implementasi *food losses* dan *waste management*
- *Climate change*

POTENSI

1 *Potensi petani muda dan melek teknologi*

- Jumlah penduduk usia produktif 70,72 persen (Sumber: SP2020)

2 *Keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di dunia*

3 *Kondisi agroklimat yang sangat mendukung*

- Curah hujan dan energi matahari melimpah

4 *Potensi lahan pertanian dan sumber daya kelautan sangat besar*

- Luas daratan mencapai 1,9 juta km²
- Luas wilayah perairan mencapai 6,3 juta km²

TRANSFORMASI

Transformasi sistem pangan dan pertanian untuk lebih inovatif, berdaya saing, tangguh dan berkelanjutan adalah kunci

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

Bagaimana **Sensus Pertanian 2023** dapat menjawab tantangan transformasi sistem pangan dan pertanian





SENSUS PERTANIAN 2023

Momentum Peningkatan Kualitas Desain Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian Nasional



ST2023
SENSUS PERTANIAN



Penyelenggaraan Sensus Pertanian dilakukan oleh BPS **sejak tahun 1963**

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) adalah yang **ketujuh**



Variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian berkembang **sangat dinamis**



Sensus Pertanian harus dapat **menjawab kebutuhan data di level nasional** maupun **level global**

Dengan mengacu kepada program **FAO** yang dikenal dengan:

WCA

(World Programme for the Census of Agriculture)



Dasar dan Tujuan Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan:

- Rekomendasi **FAO** dan **Amanat UU. No. 16 Tahun 1997 (10 tahun sekali tiap tahun berakhir 3)**.

Tujuan & Manfaat:

- Memberikan gambaran secara **komprensif** terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga **wilayah terkecil**.
- Peningkatan kualitas statistik pertanian (sebagai **kerangka sampel** survei pertanian, sebagai **benchmark** statistik pertanian yang sudah ada).
- Peningkatan kualitas desain kebijakan: **rujukan** dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian. Contoh:



1

Landasan penyusunan **DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI** yang efektif dan efisien



2

Penyediaan **BASIS DATA UMKM SEKTOR PERTANIAN**



INFORMASI STRATEGIS SENSUS PERTANIAN 2023

Mendukung Peningkatan Desain Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian Nasional



Informasi strategis yang dihasilkan ST2023



Direktori pelaku usaha pertanian
(by name by address)



Geospasial Statistik Pertanian
(potensi pertanian menurut wilayah)



Struktur Demografi Petani



Lahan Pertanian
menurut penggunaan sampai level desa



Indikator Global:
Small Scale Food Producers SDGs,
2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, dan 5.a.1



Volume dan Nilai Produksi
Komoditas Pertanian dan Potensi
Produksi kedepannya



Potensi Kegagalan Panen sebagai
dampak OPT dan Dampak
Perubahan Iklim (DPI)



Penggunaan Bibit Rekayasa Genetika



Pendapatan Jasa Pertanian



Lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan



Klasifikasi Skala Perusahaan Pertanian



Penerapan Agroforestri, Perhutanan Sosial



Klasifikasi Urban Farming, Petani Milenial, Petani Plasma



Penggunaan Pupuk & Pestisida



Informasi Bantuan yang diterima Petani



Keanggotaan Kelompok Tani



Penerapan Teknologi Modern



Akses terhadap Kredit dan Asuransi

Dukungan terhadap
kebijakan strategis
pemerintah



- ✓ Reformasi penyaluran subsidi pupuk melalui perbaikan data *targeting*
- ✓ Perbaikan tata kelola basis data pertanian
- ✓ Pengendalian laju konversi lahan pertanian, khususnya sawah
- ✓ Rekrutmen petani milenial untuk mendorong regenerasi petani

- ✓ Kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan
- ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial
- ✓ Modernisasi sektor pertanian melalui adopsi mekanisasi modern dan digitalisasi pertanian (*smart farming 4.0*)



ST2023

Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani
Juni – Juli 2023

Terima Kasih

